

**AGAR PROSPEK
EKONOMI
LEBIH CERAH**

**MENYOAL
PENGELOLAAN
DANA HAJI**

**GUBERNUR
HERMAN DERU
MENGAGAS
TIGA POTENSI**

**PUAN BERHARAP
MUNCUL PEMIMPIN
PEREMPUAN**

**ANTARA PPN
SEMBAKO DAN PPN
BISNIS ONLINE**

**PARA PESOHOR
BERINVESTASI DI KLUB
BOLA LOKAL**

SRI MULYANI PAJAKI SEMBAKO & SEKOLAH

**MERINTIS PEMULIHAN
WISATA DENGAN
PESTA KESENIAN**

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN 1 HALAMAN

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL

RP 50.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

JUNI

Bukan sekadar pertengahan tahun. Juni juga akhir kuartal atau triwulan kedua. Saatnya untuk mengevaluasi banyak hal dalam siklus kehidupan umat manusia.

Di Indonesia yang beriklim tropis, Juni yang menjadi akhir triwulan II juga menjadi transisi antara musim penghujan dan kemarau. Dalam siklus normal, puncak kemarau berlangsung antara Juli-September, setelah dalam periode Maret-Juni matahari tampak berada di utara khatulistiwa dan memulai gerak semu menuju selatan khatulistiwa hingga September.

Belakangan, sebuah video viral dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, bernarasi tentang matahari yang terbit condong di utara. Namun, penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika agaknya cukup menjelaskannya secara ilmiah. Senada belaka dengan fakta bahwa periode Maret-Juni memang matahari tampak agak di utara khatulistiwa.

Pada periode yang bersamaan, tetangga kita di selatan, Australia dan Selandia Baru, mengalami musim rontok menuju panas menjelang akhir tahun --sebaliknya di bumi belahan utara khatulistiwa mengalami musim panas menuju gugur dan dingin.

Nah, kehidupan modern tampak melepaskan situasi cuaca dan iklim dengan kegiatan umat manusia, termasuk ekonomi dan politik tentu saja. Katakanlah misalnya pertemuan tahunan World Economic Forum yang biasa berlangsung di Davos, Swiss, setiap awal tahun, justru saat Eropa mengalami musim dingin.

Saat kehidupan manusia masih tradisional, cuaca dan musim, sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari. Musim dingin tentulah saatnya banyak berada di rumah dan memanfaatkan cadangan makanan. Hingga muncul tradisi makanan awetan semisal keju, juga ikan dan daging asap, selain yang memanfaatkan garam (asinan) serta asam (cuka). Namun sebenarnya, umat manusia bukan terlepas sama sekali dengan cuaca, melainkan mengupayakan penyesuaian diri agar hidup tetap sinambung dan selaras dengan lingkungan.

Sedangkan modernitas yang kebablasan mengupayakan lepas dari situasi lingkungan alhasil membawa kita kepada perubahan iklim, *climate change*. Sekali lagi, umat manusia di seluruh dunia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Akhirnya, pandemi Covid-19 yang mengglobal juga bagian dari dinamika manusia dengan lingkungannya. Kita semua sedang dalam penyesuaian di tengah pandemi. Begitulah gambaran besarnya.

Yang lebih rinci, penyesuaian-penyesuaian itu akan tampak di sajian kami pada edisi Juni 2021. Sampai jumpa Juli nanti, awal semester II, juga triwulan III tahun ini. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter
Facebook
Instagram
Email

: @1Infoindonesia
: infoindonesia.id
: @infoindonesia.idn
: redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
JUNI
2021



6 INFO UTAMA

Pajak biasanya menjadi urusan orang kaya. Namun, rakyat biasa kini terseret dalam pusaran wacana dengan isu pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok dan hajat hidup orang banyak lainnya.



18 INFO SUMSEL

Pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola sumber daya alam dan energi, serta ekspor nonmigas dapat menjadi andalan untuk mencapai Sumsel Maju Bersama. Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan gagasan-gagasannya. Perlu bersama-sama pula merealisasikannya.



24 GUBERNUR UNTUK NEGERI

Pembaca setia, Anda tentu sudah tidak sabar untuk menantikan babak selanjutnya dari polling Gubernur Untuk Negeri.

86 INFO SELEBRITI

Pesohor terjun ke bisnis klub sepakbola memang bukan barang baru di liga negara maju. Sebut saja misalnya Elton John, penyanyi Inggris, yang relatif akrab dengan publik Indonesia. Elton John malah pernah maju-mundur sebagai pemilik klub sepak bola favoritnya: Watford.





48 INFO PROFIL

Kebijakan fiskal (anggaran) negara mau tidak mau akan berdampak pada urusan dapur rumah tangga rakyat biasa. Di tengah polemik rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkunjung langsung ke Pasar Santa.



52 INFO EKONOMI

Sekali lagi terbukti, hasil investasi yang lebih tinggi sepadan dengan risikonya. Begitulah yang terjadi dengan dana deposito Rp20 miliar di salah satu cabang Bank BNI di Makassar, Sulawesi Selatan, yang ternyata tak tercatat dalam sistem bank pelat merah itu.



88 INFO KHUSUS

Jelas sudah, yang merintang keberangkatan haji tahun ini, sama dengan tahun sebelumnya: Kondisi dan upaya menahan laju perluasan wabah Covid-19. Sedangkan pengelolaan dana haji soal lain, meskipun ada yang menyoal dan mengaitkannya dengan pembatalan haji tahun ini.



- 3 DARI REDAKSI
- 22 INFO NUSANTARA
- 47 OPINI
- 68 INFO ISTANA
- 72 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 80 INFO WISATA
- 98 KAJI



ISU PAJAK SEMBAKO DAN SEKOLAH MUNCUL DARI DALAM

Pajak biasanya menjadi urusan orang kaya. Namun, rakyat biasa kini terseret dalam pusaran wacana dengan isu pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok dan hajat hidup orang banyak lainnya.

Rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu sebenarnya mengagendakan pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Toh di tengah rapat, soal PPN terhadap sembilan bahan pokok muncul tak terhindarkan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, misalnya, mengemukakan akibat rencana PPN untuk sembako membuat dirinya ditelepon berkali-kali oleh para pedagang pasar. "Pedagang pasar di Malang telepon saya berkali-kali, bilang masa DPR nggak tahu, saya merasa terpojok karena kita memang betul-betul belum

membahas ini," kata Andreas dalam rapat yang berlangsung pada Kamis, 10 Juni 2021 itu.

Kepada para pedagang pasar di daerah pemilihannya itu, Andreas mengaku DPR sebetulnya tidak mengetahui adanya wacana memajaki produk sembako, karena draft permohonan aturan tersebut belum sampai ke meja DPR. "Saya katakan bahwa sampai saat ini kami belum menerima draft resmi dari pemerintah. Mereka nggak percaya 'lho terus kamu kerjanya apa?' mereka mempertanyakan," ujarnya.

Tak hanya Andreas yang mengemukakan soal PPN tadi. Politisi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menyatakan seharusnya pemerintah mencoba alternatif penerimaan pajak

yang lain, bukan dari bahan-bahan kebutuhan pokok, apalagi kata dia saat ini pandemi Covid-19 belum juga usai. "Mestinya ketika dampak ekonomi pandemi Covid-19 ini dirasakan oleh berbagai level masyarakat, kita mengoptimalkan penerimaan negara bukan dari barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok mereka," kata putri politisi Ade Komarudin ini.

Dari pada mengenakan objek pajak baru kepada sembako hingga sekolah, Puteri menyarankan agar pemerintah menyisir anggaran Kementerian/Lembaga yang tidak penting. "Kita bisa menyisir anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalkan anggaran yang bisa kita



Puteri Anetta Komarudin

pakai untuk pandemi Covid-19 ini dari sektor kesehatan dan ekonomi," tambahnya.

Belum sampai Sri Mulyani menanggapi soal PPN itu, Ketua Komisi XI Dito Ganinduto meminta anggotanya fokus pada pembahasan sesuai agenda yakni soal pagu indikatif. Dia tidak mau membahasnya sebelum menerima bahan resmi dari pemerintah.

"Memang soal pajak ini agak ramai pemberitaan tapi toh sampai sekarang belum dibahas di Bamus, kita belum terima draft dari pemerintah. Jadi supaya nggak ada *misleading* (penyesatan) kita bahas setelah menerima bahan tersebut karena bisa saja informasinya juga bahan yang mana saya nggak tahu," tandasnya.

Sedangkan politisi Partai Demokrat Marwan Cik Asan yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI, menyasar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Natan Kacaribu. soal PPN untuk produk sembako juga.

Dalam rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR RI yang juga berlangsung pada Kamis, 10 Juni 2021, Marwan Cik Asan mengatakan pemerintah telah berkhianat kepada rakyat jika benar kebijakan ini diambil. "Itu (tarif pajak sembako) pengkhianatan ke rakyat, cari terobosan lain, yang tidak menyentuh rasa keadilan rakyat," tegas Marwan.

la pun tak habis pikir, kenapa



Andreas Eddy Susetyo

pemerintah punya pemikiran untuk memajaki produk sembako. "Kita nggak bisa memajaki terus menerus rakyat, apalagi ada pemikiran mau memajaki sembako," katanya.

Kemudian Marwan meminta pemerintah mencari terobosan lain untuk mendulang pendapatan lebih, tanpa harus membuat rakyat kecil makin susah di tengah pandemi Covid-19. "Di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain," tegasnya.

Hal senada juga datang dari anggota dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Dia meminta agar Ditjen Pajak Kemenkeu menyerahkan peta jalan perpajakan Indonesia sehingga kebijakan yang ditempuh lebih jelas.

"Kami perlu roadmap nya, sehingga banggar bukan sekedar mengetok dan paham strategi pemerintah. Ini momentum untuk menunjukkan di situasi berat, ada peluang yang lebih baik," kata Eriko.

Wacana pengenaan PPN untuk sembako dan kenaikan tarifnya sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2021. Pada Jumat, 4 Juni 2021, misalnya, sejumlah media sudah menerima draft atau rancangan awal revisi terhadap Undang-Undang (UU) yang memuat soal PPN ini.

Dalam draft dokumen perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu, terlihat pemerintah berniat



Dito Ganinduto

mendongkrak tarif PPN menjadi 12 persen. Pada dokumen yang sama, pemerintah juga tampak berniat mengenakan PPN multi tarif.

Namun, selain mengubah tarif PPN, ada enam reformasi perpajakan lainnya, yang berkaitan dengan UU KUP, UU Pengampunan Pajak, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga UU Pajak Penghasilan (PPh).

Beberapa reformasi pajak yang mencakup antara lain adalah pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) multi tarif, menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty, menambah layer penghasilan kena pajak beserta tarifnya dan pengenaan pajak karbon. ●



ANTARA PPN SEMBAKO DAN BARANG MEWAH

Menanggapi isu pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) juga pendidikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskannya dengan tenang.

Terkesan dingin malah. Ia balik menuding kemungkinan berkembangnya hoaks yang membenturkan PPN Barang Mewah dengan PPN sembako.

Meskipun Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menolak pembahasan soal PPN sembako, toh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi isu PPN dalam rapat beragenda pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 itu. Yang dikemukakan Menteri Ani dalam rapat kerja pada Kamis, 10 Juni 2021 itu, PPN terhadap sembako hanya penggalan dari keseluruhan rencana perubahan perpajakan.

Rencana PPN itu tertuang dalam rancangan draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). "Untuk pertanyaan masalah PPN, mungkin

Komisi XI memahami bahwa kita menyiapkan RUU KUP yang sampai saat ini belum disampaikan di paripurna, dibacakan. Kami dari etika politik, belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surat Presiden," kata Menteri Ani

Memang, soal perubahan tarif PPN untuk sembako dan sekolah, bahkan biaya persalinan, tercakup dalam draft RUU KUP itu. Tapi justru bagian ini yang menjadi polemik di tengah masyarakat. "Ini memang situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita," kata Sri Mulyani.



Yang lebih disayangkan bendahara negara, dokumen yang bocor tidak seutuhnya alias sepotong-potong. "Kemudian di-blow up dan seolah-olah menjadi sesuatu yang bahkan tidak mempertimbangkan situasi hari ini," ujarnya.

Sri Mulyani menyatakan pula, ada misinterpretasi (salah tafsir) di tengah masyarakat terkait masalah ini dan jadi bahan untuk menyebarkan informasi yang salah alias hoax. "Seolah-olah PPnBM untuk mobil diberikan, sembako dipajaki itu kan teknik hoax yang bagus banget memang," katanya.

Maka Menteri Ani meminta kepada Komisi XI DPR RI agar ikut membantu pemerintah dalam mengawal berbagai anggapan miring tersebut. "Saya mohon kepada seluruh pimpinan Komisi XI untuk kita mengawal dari tadi yang ditanyakan," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, siap membahas sekaligus menjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai revisi perpajakan yang tercakup dalam RUU KUP. "Nah ini yang ingin kita nanti akan dijelaskan pada saat kita membahas RUU KUP dengan komisi XI

DPR," tegasnya.

Pembahasan RUU KUP sendiri tergantung pimpinan DPR pada saat penutupan masa sidang Paripurna. Sudah disetujui, akan dibahas secara bersama-sama oleh Komisi XI DPR RI.

"Nanti kita bisa melihat secara keseluruhan dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timing-nya harus sekarang? Apakah pondasinya harus seperti ini?," jelas Sri Mulyani.

Sedangkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah tak akan sembarangan memberikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang pokok seperti sembako. Pengenaan tarif PPN ini juga membuka opsi pengecualian untuk barang kebutuhan umum masyarakat seperti sembako. Sehingga Yustinus mengklaim pemberian pajak tersebut tak akan banyak mengganggu harga sembako di pasaran.

"Mestinya tidak berpengaruh pada kenaikan harga. Kalau untuk kelompok kaya tadi bisa jadi memang ada kenaikan, tapi yang membeli kan memang kelompok yang penghasilannya juga

tinggi," ungkapnya.

Sebagai catatan, pemerintah dalam Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) coba membuat pengecualian untuk penerapan tarif PPN 12 persen. Dalam hal ini, tarif PPN dapat diubah jadi paling rendah lima persen dan paling tinggi 15 persen. Yustinus menyatakan, pemerintah juga telah memperhatikan program pemulihan ekonomi dalam rencana tarif PPN sembako. Sehingga ia memastikan kebijakan tersebut betul-betul akan seiring dengan tahap pemulihan ekonomi.

"Tidak mungkinlah pemerintah ini sedang merancang pemulihan ekonomi kok malah mau dibunuh sendiri. Sudah pasti timing-nya pasti diperhatikan," tegasnya.

Mengutip draft RUU KUP yang tersebar di media, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain sembako, pemerintah juga

akan menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Yustinus menjelaskan, pengenaan tarif PPN untuk sembako, sekolah, hingga jasa kesehatan adalah bagian

“
Jasa kesehatan juga sama. Seorang artis yang melakukan operasi plastik tak bisa dipukul rata dengan orang miskin yang operasi kutil. Sama-sama enggak kena PPN.

dari reformasi pajak. Harapannya, pengenaan PPN bisa menciptakan sistem yang lebih adil antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah.

Bukan tak mungkin, PPN hanya akan dikenakan untuk sembako dan sekolah tertentu.

“Kira-kira gini ilustrasinya. Kalau saya konsumsi telur omega, terus Bapak beli telur ayam kampung di pasar, itu sama-sama tidak kena PPN. Padahal daya beli konsumennya sangat

berbeda,” kata Yustinus.

Begitu juga PPN dalam komoditas beras. Yustinus menuturkan, konsumen beras premium tak bisa disamakan dengan beras raskin. Pun dengan konsumen daging wagyu dengan konsumen daging ayam di pasar

“Jasa kesehatan juga sama. Seorang artis yang melakukan operasi plastik tak bisa dipukul rata dengan orang miskin yang operasi kutil. Sama-sama enggak kena PPN. Adil enggak yang seperti itu?” tanya Yustinus.

Sama halnya PPN bidang pendidikan. Yustinus mengemukakan tak adil jika orang yang belajar di sekolah-sekolah nirlaba/bersubsidi dengan orang yang belajar privat dan di sekolah-sekolah mahal sama-sama tak dikenakan PPN. “Menu-rut hemat kami ini menjadi tidak adil, tidak fair, sehingga kita kekurangan kesempatan untuk memungut pajak kelompok kaya untuk didistribusi kepada orang miskin,” tutur Yustinus.

Lagi pula kata Yustinus, pengenaan PPN di Indonesia masih

jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara tetangga lain karena terlalu banyak barang/jasa yang disubsidi. Di lingkup global, tren kenaikan PPN dan penurunan PPh Badan mulai terjadi. Dalam kurun waktu 2007-2017, negara-negara OECD sudah mengurangi porsi PPh Orang Pribadi dan menaikkan PPN.

Berdasarkan penelitian, kata dia, dunia sudah memasuki era the death of income tax. Orang akan semakin sulit dikenakan PPh karena adanya sifat elusif (langka) dari uang akibat transformasi ekonomi digital. Namun, orang akan semakin mudah dipajaki lewat sisi konsumsi karena adanya integrasi single ID yang bisa di-capture dengan baik. “Jadi bukan soal PPN atau apa, tapi indirect tax lebih efektif saat ini karena situasi sekarang berbeda dengan tahun lalu, mobilitas orang dan modal tidak seelusif (selangka) saat ini,” pungkas Yustinus.

Satu hal lagi, PPN sembako, sekolah, dan per salinan itu baru wacana. Transparansi, dan juga edukasi, akan mengurangi kegaduhannya. ●





ANTARA PPN SEMBAKO DAN PPN BISNIS ONLINE

Menyimak penjelasan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, patut diduga salah satu pintu masuk PPN sembako adalah perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Terlebih perolehan PPN dari transaksi online ini menunjukkan kenaikan signifikan setelah setahun penempatannya.

Salah satu PPN dari kegiatan online ini, yang mungkin belum disadari sepenuhnya oleh warga kebanyakan, adalah transaksi permainan atau game online yang menyasar kalangan anak-anak hingga dewasa. Salah satu perusahaan yang baru masuk sebagai pemungut PPN adalah PT Dua Puluh Empat Jam Online yang dikenal dengan voucher game UniPin. Inilah perusahaan di bidang voucher permainan atau game online terbesar di Indonesia.

Perkembangan terbaru, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu

Neilmaldrin Noor mengatakan realisasi PPN antara Juli 2020 hingga Mei 2021 mencapai Rp2,01 triliun, dari 50 perusahaan digital. Sejak awal Juni 2021, sambungnya, yang menjadi pemungut PPN sudah mencapai 81 perusahaan, termasuk PT Dua Puluh Empat Jam Online tadi.

Indonesia mulai menerapkan PPN 10 persen dari perusahaan digital luar negeri atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sejak Juli 2020. Hasilnya, pemasukan PPN dari empat bulan pertama (Januari-April) 2021 ternyata sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan angka enam bulan pertama penerapannya (Juli-Desember 2020).

"Sampai dengan April 2021, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk 65 pemungut PPN PMSE. Di antaranya adalah Google, Amazon, Tiktok, Facebook, dan Netflix. Sebanyak 14 dari 65 pemungut PPN PMSE tersebut ditunjuk pada kuartal pertama 2021," ungkap laporan Kementerian Keuangan berjudul Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Kita Edisi Mei 2021.

Sepanjang Juli-Desember 2020, PPN PMSE terkumpul sebesar Rp731,3 miliar dari 27 pemungut yang telah ditunjuk. "Sedangkan data sampai 30 April 2021, sebanyak 48 pemungut PPN PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE ke kas negara senilai Rp1,89 triliun. Ini berarti ada PPN PMSE senilai Rp1,16 triliun masuk di kuartal pertama 2021," ungkap laporan Kemenkeu.

Kemenkeu berdasarkan APBN Kita Edisi Mei bakal terus mengupayakan penggalan potensi perpajakan di sektor ini. Para pelaku usaha digital dari luar negeri diajak untuk menjadi pemungut PPN PMSE. Bersamaan dengan itu, Bendahara Negara tetap mengawasi pemungutan PPN PMSE yang sudah berjalan dengan merancang sistem pengawasan yang lebih baik lagi.

Apakah kelak termasuk transaksi online sembako di gerai-gerai online itu? Masuk akal juga tuh. •

URUSAN PPN LEBIH MEREPOTKAN DUNIA USAHA

Penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) memang berbeda-beda antarnegara. Satu hal yang sama, penarikan PPN hanya melalui perusahaan yang menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Yang ribet dengan PPN sebenarnya adalah pengusaha atau perusahaan, sedangkan dampak terhadap konsumen adalah harga jual.

Sekadar informasi saja, di Singapura PPN yang dikenal sebagai *good and service tax* (GST, pajak barang dan jasa) berlaku rata tujuh persen. Sedangkan Thailand, yang skala ekonominya terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Indonesia, menurunkan PPN dari standard 10 menjadi tujuh persen sejak Oktober 2020 terkait bantuan sosial Covid-19.

Negeri gajah putih ini pun mengecualikan PPN untuk sejumlah hajat hidup orang banyak. Antara lain sekolah negeri maupun swasta, layanan pengobatan dan jasa kesehatan swasta maupun pemerintah, transportasi lokal, seta sewa properti.

Namun, pengertian PPN atau *value added tax* (VAT) yang juga biasa disebut *good and service tax* (pajak barang dan jasa) di kedua negara itu sama seperti di Indonesia: Dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari ba-

rang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen secara tidak langsung, tapi disetorkan kepada negara oleh perusahaan penyedia barang atau jasa.

Soal pengecualian, di Indonesia pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN.

Nah, belakangan, yang ramai menjadi polemik adalah rencana pemerintah menerapkan skema multitarif PPN dengan alasan akan lebih adil. Skema multitarif PPN dirancang akan membuat barang-barang esensial (termasuk sembilan bahan pokok, sembako) yang dibutuhkan masyarakat dikenai pajak lebih murah, dan pajak atas barang yang dikonsumsi masyarakat kelas atas akan lebih mahal.

Skema multitarif artinya pengenaan PPN berbeda-beda menurut jenis barang dan jasanya. Dari pengertian ini muncul dua jenis PPN yakni flat rate (merata untuk semua barang dan jasa yang dikenakan) dan standard VAT (ada patokan minimal, namun dapat naik atau turun seperti di Thailand, dapat juga lebih rendah untuk perusahaan tertentu seperti di Inggris. Sedangkan Australia relatif masih mengenakan PPN 10 persen. Namun, perkecualian berlaku untuk makanan pokok, dan beberapa jenis pendidikan serta layanan kesehatan.

Sebagai contoh penerapan PPN di Inggris, saat ini sebagian besar barang dan jasa kena PPN sebesar 20 persen. Tarif PPN turun lima persen untuk kep-



erluan energi rumah (listrik dan gas misalnya), juga barang-barang keperluan anak-anak. Tapi Inggris tidak mengenakan PPN untuk sebagian besar pangan, pakaian anak-anak atau properti dan transaksi keuangan. Inggris boleh dibilang menerapkan PPN secara rumit dengan berbagai multi-tarif berdasarkan barang dan jasanya juga menurut jenis perusahaannya, termasuk perusahaan baru atau lama, juga berapa banyak pembelian bahan baku oleh perusahaan penyeter PPN.

Satu hal, di Indonesia maupun negara lain, urusan PPN ini lebih menjadi masalah perusahaan yang menyeterkannya ke negara sebagai salah satu sumber pendapatan. Berbeda dengan Amerika Serikat ataupun Jepang yang lebih cenderung bertumpu pada sumber penerimaan negara berupa penerbitan obligasi pemerintah karena cakupan pajaknya relatif lebih baik, Indonesia yang masih tertinggal kini mengejar penerimaan yang bersumber dari dalam negeri yaitu dari penerimaan pajak.

Optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan sebenarnya bukan hanya dilakukan dengan sekadar meningkatkan tarif pajak baik Pajak Penghasilan, PPN, Bea Meterai, maupun Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat berakibat pada terganggunya perkembangan iklim investasi dan dunia usaha, namun juga bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Mengingat sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment yaitu memberikan kepercayaan kepada masyarakat pembayar pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang secara mandiri.

Pemerintah, dalam berbagai kajian pajak, mengakui bahwa kepatuhan masyarakat pembayar pajak dan pengawasan menjadi isu sentral yang harus diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Termasuk dalam penerapan PPN tentunya.

Menurut Prof Rochmat Soemitro yang banyak dikutip soal perpajakan,

tingkat kesadaran pajak masyarakat pembayar pajak Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga agar sistem self assessment dapat terlaksana dengan baik diperlukan campur tangan pemerintah secara intensif. Sedangkan prasyarat utama untuk menjamin pelaksanaan self assessment oleh masyarakat pembayar pajak yang

otoritas perpajakan sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan self assessment; dan

3. Tercipta sistem penegakan hukum baik secara administrasi maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Toh sampai dengan saat ini, sistem



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah:

1. Tercipta sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
2. Tersedia data dan/atau informasi yang lengkap terkait dengan aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat pembayar pajak pada

administrasi perpajakan nasional belum mampu mewujudkan prasyarat utama tersebut, sehingga otoritas perpajakan belum dapat menggali seluruh potensi perpajakan di Indonesia.

Dalam konteks PPN, dengan skema multitarif, sebenarnya pengusaha akan semakin repot mengurusnya. Termasuk pengusaha sembako, pengelola jasa pendidikan, dan juga layanan kesehatan yang tercakup dalam draft RUU KUP yang bocor itu. ●



Hidayat Nur Wahid

EKONOMI POLITIK PPN

Pajak memang salah satu titik penting pertemuan antara ekonomi dan politik. Ekonom dan politisi selayaknya angkat bicara.

Man kala ekonomi terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, sisi politiknya adalah siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Sepertinya klise saja termasuk jika terkait dengan pajak.

Namun, lebih dari itu, pajak adalah cerminan nilai (apa yang baik dan buruk) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraannya. Pada konteks ini Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga pernah menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Mukhamad Misbakhun, mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako, sektor pendidikan, dan kesehatan melalui perluasan objek PPN.

Menurut dia,, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan keseha-

tan tidak boleh dipungut pajak. Alasannya, ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun, Sabtu, 12 Juni 2021.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Kemendikbud tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. "Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ujarnya

Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana penge-

naan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Menurut dia, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong.

Politikus yang dikenal getol membe-
la kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulya-
ni soal PPN untuk sembako dan pan-
gan baru diterapkan setelah pandemi
Covid-19 berlalu. Menurut dia, alasan
itu tidak rasional karena sampai saat ini
belum ada satu pun ahli atau lembaga
terpercaya yang mampu memprediksi
akhir pandemi.

Seharusnya, kata Misbakhun, man-
tan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu
punya ide berkelas global tentang cara
menaikkan tax ratio dan penerimaan
pajak tanpa harus menerapkan PPN
pada sembako dan pendidikan. "Masih
banyak ruang kreativitas pengambil
kebijakan untuk menaikkan peneri-
maan pajak," ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jen-
deral Pajak itu pun menyarankan agar
Sri Mulyani segera menarik RUU KUP.
"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu
sangat tidak populer," katanya.

Terlebih lagi, ujarnya, wacana PPN
untuk tiga sektor mendasar itu sudah
menjadi polemik, bahkan penolakan
dari berbagai lapisan masyarakat. "Po-
lemik yang terjadi dan penolakan keras
di masyarakat atas rencana Kemenkeu
ini sangat mempengaruhi citra Pres-
iden Jokowi dan pemerintahan yang
dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar
Misbakhun.

Sedangkan Direktur Eksekutif Insti-
tute for Development of Economics
and Finance (Indef) Tauhid Ahmad
memprediksi munculnya efek domino
(dampak beruntun) jika sembako dan
sektor pendidikan tercakup dalam ek-
stensifikasi atau perluasan PPN. "Kalau
sembako keterangan resminya akan
naik 12 persen. Wah bayangkan kalau
sembako naik sekitar 12 persen kira-
kira apa yang akan terjadi?," ungkapnya,
Jumat, 11 Juni 2021.

Tauhid menyatakan jika bahan-ba-
han makanan pokok masyarakat atau
sembako dikenai PPN maka harganya
semakin mahal sehingga konsumen

otomatis akan menurun. "Pastinya
konsumen akan menjerit karena harga
semakin mahal. Konsumen akan me-
nyesuaikan terutama kelompok me-
nengah ke bawah," ujarnya.

Ia mengatakan jika barang-barang
yang dikonsumsi turun, maka pen-
jualan juga akan menurun yang pada
akhirnya mempengaruhi hulunya
yakni industri dan pengusaha. Tauhid
menjelaskan industri atau pelaku usa-

patan masyarakat akan berkurang.
"Ketika PPN naik otomatis dampak
besarnya pendapatan masyarakat tu-
run, konsumsi turun, daya beli turun,"
tegasnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan ren-
cana pemberlakuan PPN terhadap
sembako juga berpotensi menaik-
kan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Sedangkan untuk PPN pendidikan,
Tauhid menegaskan rencana ini san-



Himmatul Aliyah



Ferry Juliantono

ha akan mengurangi jumlah produksi,
akibatnya jumlah tenaga kerja harus
efisien baik pengurangan waktu jam
kerja hingga upah.

Tauhid berpendapat, secara umum
dampak berantainya yakni penda-

gat merugikan sekolah-sekolah swas-
ta, terutama di pedesaan. "Iya (teran-
cam tutup) seperti sekolah-sekolah
swasta di desa kan tidak bisa dikecual-
kan," ujarnya.

Secara keseluruhan Tauhid meng-

ingatkan pemberlakuan PPN terhadap sembako dan sektor pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu ia menyarankan agar upaya reformasi perpajakan dapat lebih didorong melalui upaya lain seperti intensifikasi, meningkatkan kepatuhan, penegakan hukum, dan perluasan basis pajak baru.

sekolah. Pandemi saja masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah,” ujar Himmatul di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021.

Jika pendidikan kena PPN, sambungnya, tentu paradoks dengan visi

kan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif,” ungkapnya.

Rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya justru dibebankan kewajiban, dan pemerintah yang berkewajiban membiayai tapi justru memungut biaya pendidikan dari rakyat. “Ini tentu tidak etis sekaligus tidak konstitusional. Jadi jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi,” tegas Himmatul Aliyah.

Sedangkan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menilai pengenaan PPN terhadap sembako tak sesuai sila kedua dan kelima Pancasila, yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Mereka, masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak. Sedangkan para orang kaya/konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0% untuk PPN-BM,” ujarnya.

Kebijakan seperti itu, kata dia, jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi. “Tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke 2 dan ke 5,” kata HNW, ringkasan nama politisi PKS ini.

Ia pun menolak tegas jika wacana pajak sembako, juga menyasar sektor pendidikan swasta atau negeri, baik formal maupun informal. Lebih lanjut, HNW mengingatkan DPR agar selalu mendengarkan aspirasi dan berlaku adil pada masyarakat.

“DPR agar benar-benar mendengarkan aspirasi publik, menghadirkan keadilan dengan memastikan bahwa tidak ada revisi UU perpajakan yang tidak adil yang justru menambah be-



Mukhamad Misbakhun



Herzaky Mahendra Putra

Senada dengan Tauhid, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah mengatakan pengenaan PPN untuk jasa pendidikan berpotensi menambah angka putus sekolah di Tanah Air. “Terlebih di tengah pandemi, akan menambah tinggi angka putus

pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Selain itu, pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan membuat biaya pendidikan meningkat sehingga akan membebani masyarakat.

“Hal ini tentu akan menciptakan ketidakadilan karena pendidi-

ban rakyat, seperti draft revisi RUU Perpajakan yang bocor dan beredar luas itu," tandasnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga menolak niat pemerintah yang ingin memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sembilan bahan pokok (sembako) dan pendidikan. "Rakyat sedang susah, sembako dan pendidikan mau dipajaki. Partai Demokrat menolak keras rencana pemerintah ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Juni 2021.

Ia mengatakan niat pemerintah itu hanya akan membebani rakyat yang telah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. "Beli sembako saja berat, sekarang mau dipajaki pula," kata dia.

Terkait itu, Herzaky, mengingatkan pemerintah agar membuat kebijakan yang dapat membantu kehidupan rakyat, bukan sebaliknya. "Niat pemerintah mengenakan pajak ke sembako dan pendidikan selain tidak masuk di logika juga tidak punya rasa. Rakyat itu manusia yang butuh makan dan bantuan, bukan sekadar angka statistik," ujar Herzaky menegaskan.

Menurut dia, jika niat memungut PPN sembako dan pendidikan diteruskan, maka itu akan mencederai keadilan di masyarakat. "Bungkus kata-kata manis tetap tidak membuat kebijakan yang mengoyak rasa keadilan masyarakat dapat dibenarkan," kata Herzaky.

Sedangkan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengemukakan, rencana pengenaan PPN terhadap pendidikan dan sembako ini merupakan kelanjutan dari reformasi perpajakan mengingat rendahnya *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Namun ia tak setuju sembako dan jasa pendidikan menjadi barang kena pajak mengingat barang tersebut bersifat kebutuhan dasar manusia.

"Barang dan jasa tersebut sifatnya *basic needs* yang seharusnya peran pemerintah ialah membantu warga untuk menyediakannya apa pun

kelompok golongannya," ungkap Yusuf.

Ia pun menuturkan sebenarnya agenda reformasi PPN juga menjadi langkah penting untuk dilakukan namun akan lebih baik jika substansinya lebih kepada kenaikan tarif dan bagaimana sistem yang harus diterapkan. "Apakah menggunakan sistem

mengoptimalkan kebijakan non-pajak seperti penerimaan negara nonmigas," katanya.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono yang berbicara dalam diskusi online pada Sabtu, 12 Juni 2021 menilai, wacana pengenaan pajak sembako hingga



Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy



Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad

multi tarif atau tidak. Bukan merambah pada isu pencabutan barang *basic needs* seperti bahan sembako dan jasa pendidikan," ujarnya.

Selain pajak, kata dia, pemerintah dapat menambah pendapatan dari sektor lain. "Perubahan kebijakan pajak dapat dikombinasikan dengan

pendidikan yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mencerminkan pemerintah mengejar setoran.

Dampaknya, pemerintah menjadi kejam kepada rakyatnya. "Pemerintah kayaknya lagi bokek lah. Kemudian kejam ke masyarakat," tandas Ferry. •



Sumsel Maju Bersama

GUBERNUR H HERMAN DERU MENGGAGAS TIGA POTENSI

Pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola sumber daya alam dan energi, serta ekspor nonmigas dapat menjadi andalan untuk mencapai Sumsel Maju Bersama. Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan gagasan-gagasannya. Perlu bersama-sama pula merealisasikannya.

Dari berbagai rangkaian gagasan Gubernur H Herman Deru, semakin tampak potensi peta jalan (*road map*) menuju Sumatera Selatan Maju Bersama yang menjadi visinya. Setidaknya ada tiga bidang strategis yang dapat menjadi prioritas yang selaras dengan upaya menyesuaikan diri dengan pandemi Covid-19.

Pertama, pengembangan pariwisata. Kedua, optimalisasi perolehan sumber daya alam. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan produksi komoditas berorientasi ekspor dan menembus pasar global.

Untuk yang pertama, pariwisata, terungkap dalam webinar Sumatera Travel Destination Summit, bertempat di Command Center Pemprov Sumsel, Rabu, 2 Juni 2021 lalu. Menurut Gubernur HD, meskipun pariwisata sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, hendaknya kita jangan sampai menyerah pada penyakit yang menyertai penularan virus corona itu.

"Justru kita harus cerdik menyiasatinya," ungkap Gubernur HD. Selanjutnya ia menggagas kolaborasi antarlembaga baik vertikal maupun horisontal untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di masing-masing daerah.

Menyimak pengalaman berharga sektor pariwisata yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19, maka warga Sumsel hendaknya berupaya untuk menekan angka penularan seminimal mungkin. "Kita melihat daerah yang menggantungkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya pada pariwisata mengalami kontraksi ekonomi hingga di atas 50 persen. Di sini kita dituntut kreativitas, khususnya pelaku usaha," kata dia dalam webinar yang juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Maka Gubernur HD pun menawarkan tantangan untuk mengembangkan po-



tensi wisata dan ekonomi kreatif di Sumsel. "Provinsi Sumsel memiliki Ranau Gran Fondo dan Sriwijaya Dempo Run yang insya Allah akan menjadi agenda tahunan pada kalender nasional. Sriwijaya Gran Fondo ini merupakan event di kawasan danau terbesar kedua di Indonesia yang menawarkan pemandangan alam dan berpotensi membangkitkan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Ranau," katanya.

Fondo adalah lomba balap sepeda masal yang dapat melibatkan

ribuan peserta. Para peserta bersaing dengan memperhitungkan waktu tempuh dan kecepatan dengan peserta lainnya untuk mencapai garis finish. Sedangkan Ranau Gran Fondo dijadwalkan akan berlangsung pada November 2021 di danau yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Lampung.

Menurut rencana, Ranau Gran Fondo melibatkan seluruh pesepeda dan jenis sepeda baik road

bike, mountain bike (MTB), sepeda lipat, ontel (vintage) zaman dulu, maupun sepeda mini. Lomba ini bersifat cycling for all sehingga seluruh pesepeda dapat menikmati wisata olahraga sekaligus bergabung dalam event tahunan yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel dan Pemkab OKU Selatan. Agenda wisata ini diharapkan dapat mengangkat ragam daya tarik wisata lainnya seperti wisata alam, olahraga, kuliner serta hal unik lainnya dalam satu kawasan.

Sedangkan Sriwijaya Dempo Run



adalah lomba lari di sekitar kawasan Gunung Dempo, tertinggi di Sumsel, dengan kota di kakinya Pagaralam. Gubernur D berharap Sriwijaya Dempo Tu akan menjadi agenda tahunan untuk pengembangan pariwisata, sama seperti Ranau Grand Fondo.

Dalam webinar itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengemukakan webinar ini diharapkan bisa mewadahi gagasan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, kata Menteri Sandi, gagasan itu diharapkan memberikan dorongan bagi masyarakat bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang bagus sehingga diperlukan kolaborasi spesifikasi produk dengan menerapkan

HD dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Hotel Wyndham Opi Palembang, Kamis, 3 Juni 2021.

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan memang sungguh luar biasa, mulai dari minyak, gas, energi, batubara dan SDA lainnya. Rakernas ADPMET yang berlangsung di Sumsel merupakan salah satu bukti Sumsel sebagai daerah lumbung energi.

Lebih dari itu, Gubernur HD yakin daerah-daerah penghasil migas dan energi yang tergabung dalam asosiasi ini tetap memberikan perhatian pada kesejahteraan

satu di antara penghasil migas termasuk Sumsel,” tegasnya

Di bagian akhir sambutannya Herman Deru berharap Rakernas ADPMET kali ini dapat menyamakan persepsi mengenai potensi-potensi yang berkaitan dengan migas dan energi baru serta terbarukan untuk kemaslahatan masyarakat. “Memang sudah seharusnya bahwa sumber daya alam di setiap daerah menjadi linear dengan kesejahteraan masyarakat,” tandas Gubernur HD.

Di sisi lain, Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil selaku Ketua ADPMET menyebut Sumsel begitu kaya dengan SDA khususnya Minyak, Gas dan Energi sehingga tidak salah jika daerah ini didaulat sebagai tuan rumah Rakernas. “Sumsel sangat pas sebagai tuan rumah Rakernas ADPMET, karena jika kita lihat hasil SDA di Bumi Sriwijaya memang SDA, migas dan energinya,” ucap Emil, panggilan akrabnya.

Menurut Emil agenda Rakernas kali ini adalah memberikan kewenangan kepada BUMD untuk mengelola perusahaan di bawah Pertamina, yang bekerja tidak maksimal. Serta membahas banyak hal terkait pemanfaatan energi migas dan energi terbarukan. Untuk menopang kebutuhan masyarakat daerah secara optimal dan berkesinambungan.

“Rakernas daerah penghasil migas dan energi terbarukan ini untuk merumuskan rencana kerja kami mendatang. Tujuan utamanya bagaimana sektor migas ini dapat menjamin kebutuhan masyarakat daerah secara optimal dan berkesinambungan” ungkap Emil.

Selain pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta optimalisasi tata kelola sumber daya alam migas dan energi, Gubernur HD juga menggagas peningkatan ekspor komoditas nonmigas dengan wirausaha lokal yang unggul sehingga dapat menembus pasar global.

Dalam webinar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan oleh Bank Sumsel Babel bekerja sama dengan KBRI Canberra, Australia, Gubernur HD yang diwakili oleh Plh Sekda Provinsi Sumsel H Akhmad Najib berharap dari UMKM muncul karakter-karakter wirausaha yang tangguh dan handal, memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi sehingga mampu



protokol kesehatan dan CHSE.

CHSE adalah program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan). “Strategi yang kita harapkan untuk mendorong pariwisata dan ekraf dengan gerak cepat, geber dan gaspol seluruh potensi lokal,” tandas Sandi.

Nah, bagaimana dengan potensi lainnya? Gubernur HD menggagas optimalisasi pendapatan dari Sumsel yang menjadi lumbung energi. “Saya bangga, Sumsel sebagai daerah penghasil migas menjadi perhatian. Saya berharap Sumber daya alam (SDA) Migas dan Energi ini manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ungkap Gubernur

SDA. Sinergi yang telah dibangun. ADPMET diharapkan dapat menopang kepentingan negara terkhusus bagi daerah penghasil.

“Saya meminta kepada asosiasi ini dapat mendorong daerah dalam hal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang penghasil energi dan gas dengan cara transparansi,” ujarnya. Gubernur HD juga memastikan, Sumsel proaktif dengan inisiasi ADPMET, yakni memaksimalkan pemanfaatan SDA migas dan energi terbarukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah.

“Hasil pemanfaatan sumber daya alam itu harus menjadi linear dengan kesejahteraan masyarakat. Ini tentu butuh kekuatan dan dorongan untuk ber-

bersaing di tengah era globalisasi perekonomian sekarang ini.

Ketika memasuki persaingan global di era pandemi seperti saat ini, HD juga mengajak UMKM dan pelaku bisnis di Sumsel untuk masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan Go-Internasional seperti pangan, komoditas perikanan, pariwisata dan industri pengolahan. Selain itu UMKM juga menurutnya harus bisa menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi digital dan transaksi online dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Gubernur HD, setidaknya ada dua hal yang diperhatikan dalam pengembangan UMKM agar bisa Go-Internasional. Selain meningkatkan dukungan kepada UMKM yang memiliki produk unggulan komparatif agar keunggulan kompetitifnya meningkat. "Kedua, ada lagi, UMKM harus berbasis digital dan teknologi tinggi baik dalam operasi maupun produknya," ungkapnya.

Selain dua hal tadi, sekurangnya ada lima strategi yang dapat dilakukan untuk menjadikan UMKM Go-Internasional. Strategi itu masing-masing yakni memperbesar akses pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk UMKM.

Kemudian peningkatan kualitas produksi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya pengembangan kapasitas manajemen dan usaha UMKM yang diwujudkan melalui pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan para ahli serta beberapa strategi lainnya.

"Semoga ini berkontribusi bagi peningkatan kualitas SDM. Dan ini sejalan dengan visi misi Pemprov Sumsel "Sumsel maju untuk semua" membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian industri dan UMKM," ungkapnya.

Sedangkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Yohanes Kristianto Soeryo Legowo mengungkapkan sangat mengapresiasi semua pihak terutama Pemprov Sumsel dan BSB yang telah menyelenggarakan webinar ini. "Penting untuk diketahui teman-teman di Sumsel, bahwa kami seluruh perwakilan Indonesia di Australia senantiasa siap

mendukung pelaku usaha khususnya UMKM di Sumsel-Babel melakukan penetrasi pasar di Australia," ujarnya.

Hal ini menurut Yohanes juga sesuai dengan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo tahun lalu kepada para Dubes Indonesia di seluruh dunia agar lebih meningkatkan diplomasi di bidang ekonomi. "Melalui webinar ini kita harap

mengembangkan mitra dengan UKM. Karena UKM kita ketahui merupakan pilar ekonomi bangsa," jelasnya.

Syamsudin menambahkan, ada empat hal yang selalu ditekankan BSB untuk mengembangkam UMKM. Antara lain terkait pendanaan, pembinaan dan penyediaan akses pasar. "Insya Allah ini menjadi tonggak pertumbuhan UMKM



mampu melihat bukan hanya peluang tapi juga tantangan yang ada jika mereka ingin memperluas pasar di Australia," terangnya.

Dalam webinar itu Dirut BSB Ahmad Syamsudin mengatakan webinar seperti ini rutin di masa pandemi. Hal ini tak lain bertujuan untuk mendorong UMKM di Sumsel dan Babel agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun pasar dunia.

"BSB senantiasa bersinergi mendukung pembangunan dan pertumbuhan kerakyatan dengan cara

di era pandemi. Alhamdulillah sejauh ini UMKM Sumsel-Babel sudah melakukan beberapa ekspor seperti kopi, karet, kelapa dan duku," ujarnya.

Sekali lagi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, optimalisasi tata kelola sumber daya alam dan energi. Yang tak kalah penting, ekspor komoditas nonmigas dari Sumsel.

Tiga itu saja merupakan modal besar untuk lebih cepat mencapai Sumsel Maju Bersama. Syaratnya, merealisasikan itu semua bersama-sama pula. •



PUAN BERHARAP MUNCUL PEMIMPIN PEREMPUAN

Beberapa kali Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara di lingkungan akademik Universitas Indonesia, almamaternya. Kali ini, dalam forum webinar series Majelis Wali Amanat (MWA) UI, ia mewacanakan juga pemimpin perempuan.

Berbicara sebagai pembicara kunci, Dr (HC) Puan Maharani menyerukan kampus-kampus perguruan tinggi keluar dari stigma menara gading yang membuat para peserta didik tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Menara gading adalah kondisi pendidikan menjadi tempat seseorang belajar namun terpisah dari masyarakat, dan setelah selesai maka kembali ke masyarakat tanpa memahami cepatnya perubahan yang terjadi di luar kampus.

"Kampus kemudian hanya menjadi

sebuah pabrik gelar-gelar akademis, dan menjadikan peserta didiknya minim kemampuan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," ucapnya dalam acara yang berlangsung pada Rabu, 6 Juni 2021 itu

Menurut Puan Maharani, salah satu gelombang perubahan zaman yang harus dihadapi generasi bangsa sekarang adalah perkembangan teknologi-informasi yang begitu cepat. Perkembangan robotik, kecerdasan buatan, blockchain, cryptocurrency, dan algoritma kesadaran adalah beberapa hal

yang harus dipelajari generasi masa kini untuk menambah kemampuan masa depan mereka.

Untuk itulah pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sebuah keharusan. Tantangan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang dihadapi oleh generasi masa depan ini juga disepakati oleh Rektor UI Prof. Ari Kuncoro yang mengatakan kegagalan untuk menguasai teknologi menyebabkan bangsa kita menjadi rentan terhadap arus serbuan berita palsu atau hoaks.

"Selain itu, kegagapan teknologi juga berkorelasi terhadap lahirnya kemiskinan di bidang literasi informasi. Di sinilah, pendidikan jelas memikul tanggung jawab utama," ujarnya

Untuk mengembangkan pendidikan yang adaptif terhadap teknologi ini tentunya membutuhkan komitmen dan investasi dari semua pihak, termasuk dari DPR RI sebagai sebuah institusi legislatif pemegang fungsi pengawasan alokasi anggaran negara. Menurut dia, alokasi anggaran dana pendidikan negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2010-2020.

Bahkan, sejak 2009 alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi batas minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia berharap bahwa alokasi anggaran yang begitu besar ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk pendidikan yang adil dan merata.

Puan menjadi pembicara kunci di webinar yang berusaha menjawab isu-isu krusial dunia pendidikan. "Seri ke-3 webinar MWA kali ini fokus terhadap pendidikan. Isu yang diangkat tidak hanya menyangkut pembentukan kecerdasan, namun juga tentang hal yang perlu dilakukan agar institusi pendidikan dapat berbagi tugas mendidik manusia Indonesia dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti industri, komunitas, ormas dan lembaga pemerintah atau swasta," ujar Ketua MWA UI, Saleh Husin SE, MSI.

Selain mengundang Puan Maharani, pada sesi kedua di Seri 3 webinar juga hadir narasumber antara lain Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, anggota MWA UI dan CEO Blue Bird Dr. (HC) Noni Purnomo, B. Eng., MBA, Randy Jusuf (Managing Director, Google Indonesia), dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UI, Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris.

Toh Puan juga mengapresiasi perguruan di tinggi Indonesia yang terus meningkatkan kualitas agar mampu bersaing di level internasional. Mengutip Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) merilis pemeringkatan universitas terbaik QS World University Rankings 2022 atau QS WUR yang diumumkan pada

2021, 16 universitas di Indonesia masuk daftar prestisius tersebut. Bahkan, tiga antaranya merupakan perguruan tinggi swasta. Artinya, kualitas pendidikan tinggi secara umum semakin meningkat dan tidak melulu diasosiasikan dengan kampus negeri.

Dengan demikian, kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas internasional semakin terbuka lebar. Harapannya, institusi pendidikan tinggi Indonesia dapat menghasilkan SDM unggul bangsa.

Meski demikian, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut menekankan

"Generasi muda harus cerdas memilah informasi, membedakan mana yang benar dan mana yang hoaks. Bahkan generasi muda bisa menjadi yang terdepan dalam melawan hoaks, memerangi hate speech, juga mengedepankan dialog yang cerdas tapi santun di media sosial," ucapnya

Selain itu, Puan juga menyinggung seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2021 yang mengungkapkan salah satu jurusan yang banyak diminati peserta SNMPTN adalah jurusan farmasi. Ia menyambut terbuka minat tinggi calon mahasiswa di Indonesia terhadap dunia farmasi, yang menurutnya akan semakin dibu-



bahwa SDM Indonesia yang unggul tidak hanya profesional dan berdaya saing, tetapi memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia. "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, sopan santun, toleran, religius, dan bergotong royong. Pembentukan SDM berkarakter dan tangguh itu harus didukung pendidikan yang diarahkan membentuk SDM berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, toleran, bergotong royong, cinta Tanah Air, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," tutur Puan.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyebutkan bahwa di zaman yang penuh gempuran teknologi ini, anak muda Indonesia memerlukan kepribadian yang kuat sekaligus sikap yang santun. Puan memberi contoh attitude terkait maraknya hoaks yang tersebar lewat berbagai media sosial.

"Akan menjadi kebanggaan kita semua ketika berbagai institusi pendidikan di Indonesia menjadi tempat lahirnya berbagai penemuan yang dapat membantu kita dalam melawan Covid-19," ujar legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Puan juga melihat bahwa jumlah perempuan yang mengenyam kuliah semakin meningkat. Sebagai sesama perempuan dia merasa bangga. Kelak, Puan yakin akan lahir perempuan yang menjadi pemimpin.

Nah ini kata Puan. "Indonesia punya harapan bahwa di masa depan, perempuan Indonesia akan tampil maju bahkan jadi sosok pemimpin yang tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga tetapi juga bangsa dan negara," ungkap perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini. ●

Gubernur Untuk Negeri





Tahap Final

GUBERNUR UNTUK NEGERI

Pembaca setia, Anda tentu sudah tidak sabar untuk menantikan babak selanjutnya dari polling Gubernur untuk Negeri.

Polling Gubernur untuk Negeri telah mengakhiri tahap keduanya pada 30 April lalu. Polling ini menampilkan 34 nama kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia saat dibuka pada 1 April 2021.

Semangatnya adalah menawarkan paradigma baru tentang kontes politik nasional di tahun 2024, sekaligus membuka opsi politik lebih luas bagi publik.

Mengapa kepala daerah? Kami menyadari, kepemimpinan lokal, khususnya di luar Jawa, kurang mendapat atensi dalam isu perpolitikan nasional. Sementara, banyak contoh kebajikan dan keteladanan yang disokong oleh kemampuan tingkat tinggi dalam memimpin justru datang dari daerah-daerah.

Kami percaya para gubernur yang saat ini aktif menjabat dapat menjadi calon-calon alternatif untuk melaju ke panggung Pemilihan Presiden 2024.

Setelah melalui dua tahap, yang hasilnya kami laporkan secara transparan kepada publik dan pembaca, polling Gubernur Untuk Negeri kini memasuki tahap final.

Pada tahap sebelumnya polling menampilkan 14 besar nama gubernur yang lolos tahap pertama berdasar pilihan para pembaca.

Dimulai dari teratas, sepuluh nama yang berhasil lolos dari tahap kedua adalah sebagai berikut. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan perolehan 29,2 persen. Di urutan kedua, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dengan perolehan 18,7 persen. Di nomor tiga ialah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang memperoleh dukungan 16,7 persen responden.

Secara berurutan selanjutnya adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (10,4 persen); Gubernur Banten, Wahidin Halim (6,3 persen); Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah (4,2 persen); Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor (4,2 persen); Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana (4,2 persen).

Kemudian Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan (4,2 persen); dan di urutan terakhir adalah Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, dengan perolehan 2,1 persen.

Sepuluh Besar

Hasil polling tahap terakhir ini akan menentukan lima Gubernur teratas yang menurut Anda paling pantas untuk menjadi kandidat calon presiden di tahun 2024.

Babak final, yang telah menampilkan 10 kepala daerah ini akan berlangsung lebih lama dari tahap-tahap sebelumnya. Persisnya akan kami tutup pada pukul 24.00 WIB di tanggal 31 Juli 2021.

Masih kami selenggarakan melalui Google Form yang dapat pembaca akses di laman infoindonesia.id, polling berlangsung dengan metode satu akun hanya dapat mengirimkan satu respons atau pilihan. Sederhana namun cukup akurat, demi memudahkan pembaca menyalurkan aspirasi politiknya untuk tokoh Capres 2024 dari kalangan pemimpin daerah.

Anda pun dapat langsung berpartisipasi melalui laman www.infoindonesia.id lewa, yang dapat Anda akses dari mana saja.

Kembali kami ingatkan bahwa apapun pilihan Anda, pastikan itu adalah demi kemajuan Indonesia yang kita cinta. Salam Inovasi Untuk Negeri. ●



Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru

DIGDAYA TAHAN PANDEMI, BANGKIT DAN MAJU BERSAMA

Salah seorang kepala daerah yang masuk dalam tahap final ialah Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Bersama Wakil Gubernur Mawardi Yahya, segudang prestasi ditorehkan pada periode pertama memimpin Bumi Sriwijaya.

Kepiawaiaannya membangun Sumsel dari sektor ekonomi, dinilai pembaca Info Indonesia sebagai sepuluh besar "Gubernur Untuk Negeri".

Menghadapi pandemi COVID-19 ini, Sumsel termasuk salah satu provinsi yang mampu bertahan dari tekanan kontraksi ekonomi. Kedigdayaan menahan pagebluk pun mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Kita puji Sumsel yang dapat bertahan dan konsisten dilihat dari belanja 2019-2021 yang meningkat, meskipun di masa pandemi. Bahkan pendapatan daerah juga meningkat. Ini berbeda sekali dengan daerah lain di Indonesia," kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri, Hamdani mewakili Mendagri dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel 2020 pada 23 April 2021 lalu.

Pertumbuhan ekonomi di Sumsel, pada 2021 terkontraksi mencapai sebesar minus 0,11 persen. Angka yang baik dibanding nasional sebesar minus 2,07 persen. Bahkan Sumsel menduduki peringkat keenam secara nasional, dan tertinggi kedua di Pulau Sumatera.

Sumsel juga membukukan tingkat pengangguran terbuka yang cukup baik, sampai Agustus 2020 sebesar

5,51 persen.

Selain mempertahankan kedua capaian tersebut, dia berharap kepala daerah di Sumsel dapat melakukan terobosan serupa, dalam hal penu-

runan persentase angka kemiskinan.

"Ini PR dan tugas bagi semua, gubernur, wali kota dan bupati di Sumsel. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, untuk menurunkan persentase di Sumsel. Yang berada di bawah nasional," ujar Hamdani.

Meski mendapat pujian, namun Herman Deru tak ingin berpuas diri. Angka-angka itu di kondisi normal bahkan tidak dapat disebut prestasi menurut dia.

Tapi di masa pandemi yang semuanya serba terbatas, pertumbuhan itu sangat baik.

"Itu artinya kontraksi ekonomi kita kecil. Ini menandakan soliditas kita kuat dibandingkan provinsi lain," kata pria pemilik gelar Magister Manajemen dari STIE Trisna Negara Belitang itu.

Untuk itu, dia mengajak seluruh kepala daerah di Sumsel bergotong-royong membangun Bumi Sriwijaya. Dimulai dari desa hingga perkotaan. Salah satunya adalah mengkoneksikan seluruh wilayah, hingga tidak ada lagi yang terisolasi.

Langkah dan strategi itu dituangkan melalui RKPD 2022, yang diharapkan dapat dikerjakan bersama oleh seluruh kabu-





paten dan kota di Sumsel. Serta dicariikan solusinya, untuk mewujudkan pembangunan Sumsel yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Ini penting untuk merajut konektivitas, agar visi misi Sumsel terangkum. Sehingga tidak ada yang bekerja parsial dan sendiri-sendiri," ucapnya.

Menurut HD, perlu dilakukan penyesuaian persepsi bahwa apapun prestasi provinsi juga karena kerja dari kabupaten dan kota. Penilaian itu, baik atau buruk, adalah hasil kerja bersama.

Pujian dari pemerintah pusat, adalah bukti kerja, yang dilakukan bersama-sama untuk pembangunan Sumsel.

"Saya mengajak kita semua berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, sesuai potensi masing-masing melalui pembentukan BUMD atau kemitraan. Juga setiap perencanaan ke depan agar bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi di Sumsel, agar dalam kinerja kita ada yang memantau dari kalangan akademisi. Saya harap musrenbang dilakukan dengan baik agar hasilnya maksimal," tuturnya

Secara virtual, Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko mengata-

kan, RKP 2022 secara nasional yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi. Hal ini harus menjadi acuan pemerintahan daerah dalam membuat RKPD.

Fokus pembangunan RKP 2020 yaitu peningkatkan di sektor industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi kesehatan.

"Sumsel dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui proyek strategis daerah, antara lain pengembangan KEK, Pelabuhan Tanjung Carat dan pembangunan lainnya," ujarnya.

Ia ungkapkan bahwa sembilan usulan Pemprov Sumsel telah tertuang dalam RKP 2022. Selanjutnya, dia berharap agar Pemprov Sumsel menyiapkan dukungan kegiatan dalam RKPD penyiapan RKP 2022. Langkah ini menyatukan tekad untuk mewujudkan Sumsel yang lebih maju. ●





Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan

KERJA SAMA JEPANG TINGKATKAN KEMAMPUAN SDM

Menjadi pemimpin yang berada di wilayah kepulauan, merupakan tugas berat bagi Erzaldi Rosman Djohan. Namun, dia tak mampu berpangku tangan, dan terus mendorong peningkatan sumber daya manusia yang unggul demi pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di Bangka Belitung.

Gubernur keempat di Bangka Belitung itu sadar benar mengenai potensi sumber daya alam di wilayahnya. Dikelilingi perairan yang luas, serta mineral yang melimpah merupakan modal utama dari Babel.

Namun, potensi-potensi seperti perikanan, pertambangan mineral, akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia.

Baru-baru ini Pemprov Babel bersama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk menjajaki pembangunan pusat teknologi, informasi, dan komunikasi guna mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia, dan alam di daerah itu.

"Dengan adanya pusat pengembangan teknologi ini, tentu sangat membantu sektor pendidikan dan lainnya, seperti perikanan dan pertambangan," kata Erzaldi usai bertemu dengan perwakilan JICA pada 9 Juni 2021.

Dengan adanya kerja sama dengan JICA, diharapkan ada pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan antara kedua belah pihak. Apalagi Jepang adalah negara yang juga memiliki kemiripan dengan Babel. Yakni dikelilingi perairan, dan merupakan negara kepulauan yang wilayah daratannya tak begitu luas.

Melalui pusat teknologi informasi dan komunikasi, siswa di Babel akan mempelajari dan terbiasa dengan kemajuan teknologi yang tak dapat terhindarkan

lagi saat ini. Sehingga, dapat meningkatkan prestasinya di kemudian hari.

"Saat ini teknologi semakin advance, kita akan membiasakan siswa kita mengembangkan dirinya agar lebih berdaya dan memiliki skill yang tinggi," ujar dia.

Program ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Amri Cahyadi. Menurutnya pusat teknologi dan informasi memang

m e m b u t u h k a n
dana yang besar. Tapi bukan tidak mungkin untuk

dibangun.
Untuk itu, kerja sama dengan JICA

akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan mimpi tersebut.

"Ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung untuk menyiapkan SDM yang berkualitas," papar dia.

Selain itu, Erzaldi juga fokus untuk memajukan pendidikan berbasis vokasi. Program yang digalakan sejak 2019 ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM dari perusahaan di Babel.

Sebab, dunia pendidikan dan usaha menurutnya, sudah saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan saat ini. Bahkan, dia telah menginstruksikan perusahaan yang berada di sana untuk memprioritaskan tenaga kerja hasil lulusan perguruan tinggi lokal.

"Dunia pendidikan dan dunia usaha di masa sekarang sudah menjadi kebutuhan serta saling membutuhkan. Mahasiswa dan perguruan tinggi tentunya sangat mendambakan proses belajar yang lebih terarah dengan melakukan aktivitas pekerjaan yang sesuai bidangnya," ujarnya.

Ia mencontohkan terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dengan Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi sekolah yang dikerjasamakan dengan dunia usaha. Para siswa dapat secara langsung terjun ke dunia usaha, dibandingkan dengan praktik kerja lapangan yang





Gubernur untuk Negeri

dirasa kurang efektif.

"Kami berharap kepada pimpinan perusahaan atau yang mewakilinya dalam kesempatan itu dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga saat merekrut tenaga kerja nanti sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan harapkan," katanya.

Pelan-pelan Tinggalkan Pertambangan

Sadar dengan potensi perikanan yang melimpah, saat ini dia bersama Wakil Gubernur Abdul Fatah, tengah menyiapkan cold storage atau tempat pendingin ikan di wilayah pulau terluar yang berada di dalam administrasi Kabupaten Bangka Selatan.

Gudang pendingin tersebut akan mulai beroperasi pada Juli 2021 ini. Dengan adanya tempat pendingin itu, nelayan lokal tidak perlu panik hasil tangkapannya busuk. Sehingga kualitas hasil tangkapan laut akan lebih terjaga.

"Sehingga nelayan tidak lagi kesulitan menjaga mutu hasil tangkapannya," ujar Erzaldi, usai berkunjung ke Pulau Pongok, Minggu (6/6/2021).

Menurut dia, kehadiran gudang pendingin merupakan solusi bagi masyarakat nelayan di pulau kecil ini dalam terjaganya kualitas ikan maupun hasil tangkapan lainnya.

Sektor perikanan memang menjadi fokus utama Erzaldi saat ini. Mengingat industri pertambangan timah kerap menjadi masalah. Bahkan, saat ini ucapnnya sudah tak lagi menjadi primadona.

Sebab, apabila tambang sudah habis, maka penggantinya tidak ada. Selain itu, pemerintah pun akan mengalami tantangan yang besar dan sulit dalam mengelola kawasan yang rusak sebagai akibat dari penambangan.

Gubernur Erzaldi berusaha mencari solusi dari pertambangan yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. "Betul-betul dapat memberikan solusi bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung ke depannya. Makanya, di pertengahan jalan ini, tambang sudah tidak menjadi primadona," ujarnya.

Pada 2021 ini saja, Pemprov Babel

tengah menyiapkan 13 lokasi untuk pengembangan kepiting bakau bersama dengan PT Sarana Hatchery Abadi. Program budidaya perikanan, berskala industri merupakan langkah solutif untuk mendorong perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

la mengatakan Bangka Belitung memiliki potensi budi daya kepiting

la berharap dengan budi daya kepiting bakau ini, masyarakat 'terpaksa' memelihara hutan bakau untuk menjaga kehidupan kepiting bakau agar dapat berkembang biak dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

"Kami butuh solusi terbaik untuk menghidupkan kepiting, mulai dari sistem pembibitan, pembesaran hingga perkembangbiakan kepiting, kami



bakau, namun potensi ini tidak menjadi apa-apa jika tidak dimulai dengan aksi nyata. Oleh karena itu, Pemprov memulai pengembangbiakan kepiting bakau skala industri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Selama ini, kami memiliki program di kawasan hutan hanya digunakan untuk pemeliharaan bakau saja. Namun sering kali pemeliharaan tidak dilakukan dengan tertib. Bakau dibiarkan hidup dan tidak lagi diurus, yang penting daunnya masih ada, ya sudah dibiarkan begitu saja," ujarnya.

ingin kepiting bisa diproduksi dalam skala masif, kalau bisa jadi komoditi Babel. Jadi, sistem budi daya seperti apa yang efektif untuk digunakan?" tanyanya.

Direktur PT Sarana Hatchery Abadi, Peter Nugraha, mengatakan 13 lokasi yang sudah diajukan Pemprov Babel tidak bisa disamaratakan perawatannya. Perlu ada observasi lebih lanjut untuk mengetahui kebutuhan dari setiap lahan agar dapat mengembangkan kepiting dengan metode yang tepat. ●



Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji

PENUHI KEBUTUHAN MENDASAR, BIKIN DESA MAKIN MANDIRI

Namanya kian wangi di kalangan nasional setelah dua tahun menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Bang Midji, panggilan akrabnya, mampu memenuhi kebutuhan fundamental bagi masyarakat Kalbar, yang akhirnya memberikan prestasi membanggakan di level nasional.

Sebagai salah seorang dari sepuluh kandidat "Gubernur Untuk Negeri", Sutarmidji dinilai pembaca Info Indonesia, sebagai kepala daerah yang berprestasi. Bahkan mampu bersaing dengan nama-nama wahid.

Wali Kota Pontianak selama dua periode itu, dinilai mampu memberikan kebutuhan paling mendasar dari hidup masyarakat. Seperti pelayanan, dan kemajuan pembangunan dari kota sampai desa.

Tidak seperti pendahulunya yang menekankan pada pembangunan 'wah', Sutarmidji menekankan pada perbaikan-perbaikan fasilitas dan pelayanan. Di antaranya pelebaran jalan-jalan

utama, perbaikan lebih dari seribu rumah yang tak layak huni, pembangunan kembali pasar-pasar tradisional dan sekolah-sekolah negeri, perbaikan gang dan saluran air, meningkatkan kualitas puskesmas, pembangunan RSUD baru yang menerapkan sistem rumah sakit tanpa kelas, pembangunan dan penataan taman-taman publik seperti Taman Alun Kapuas dan Taman Digulis.

Hasil nyatanya terlihat pada data yang baru dirilis. Indeks desa membangun (IDM) di Kalbar naik drastis.

Bahkan untuk pengetasan desa tertinggal, provinsi yang berbatasan dengan bagian Sabah Malaysia itu, melewati target nasional, yakni mencapai 105 persen.





Gubernur untuk Negeri

Saat ini, desa mandiri menjadi 385 desa. Padahal pada tahun lalu, hanya sekitar 200 desa. "Keberhasilan kita tahun ini juga adalah menghilangkan 12 desa sangat tertinggal. Artinya kita tidak ada lagi desa sangat tertinggal, dan yang lainnya yaitu menghilangkan 285 desa tertinggal," kata dia.

Sebagai informasi, saat ini Kalbar memiliki sebanyak 385 desa mandiri, 456 desa maju, 910 desa berkembang, tersisa 280 desa tertinggal dan bebas dari desa sangat tertinggal.

Menurunkan angka desa tertinggal, merupakan salah satu target yang ingin dicapai dalam Rencana Pempa-

“

Desa itu harus berubah jadi desa mandiri, kalau sudah mandiri, mau apa saja bisa

ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Sehingga, target untuk pengentasan desa tertinggal kita sudah melebihi target nasional, sudah 105 persen. Target untuk merubah status desa berkembang menjadi desa mandiri ada di angka 27 persen," kata dia.

Namun, satu atau dua tahun ke depan, sekitar 200 desa tertinggal yang masih ada di Kalbar, ditargetkan berubah status, menjadi desa berkembang, bahkan menjadi desa mandiri.

Namun, pencapaian itu tak dapat dilakukan sendiri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga diminta memperhatikan desa yang telah meningkat menjadi desa mandiri dengan meningkatkan dana desanya.

"Saya akan sampaikan kepada Menteri Desa dan PDTT seharusnya desa yang berhasil naik status jadi desa mandiri itu diberikan penghargaan dengan meningkatkan dana desanya, bukan sebaliknya malah dikurangi," ujarnya.

Menurutnya, tak sulit untuk menjadi

kan suatu desa menjadi desa mandiri. Cukup memenuhi 54 indikator yang ditetapkan.

"Desa itu harus berubah jadi desa mandiri, kalau sudah mandiri, mau apa saja bisa," kata Midji.

Dia pun menegaskan, akan terus

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalbar berkoordinasi dengan Bappeda untuk bersama-sama DPRD merumuskan program dalam rangka percepatan pembangunan di desa.



berkolaborasi dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam percepatan IDM. Mulai dari TNI-Polri yang sudah berjalan selama ini, termasuk juga pihak kejaksanaan, perguruan tinggi hingga perusahaan atau pihak swasta.

"Pak Kajati nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa di Kalbar tentang pemanfaatan dana desa dalam percepatan pembangunan desa," kata dia.

Menurutnya bisa disinergikan dalam bentuk pokok pikiran (Pokir) DPRD. "Saya harap tahun depan itu, masing-masing desa yang sudah berstatus desa mandiri mendapat insentif berupa kegiatan pembangunan di daerahnya, dua kegiatan yang masing-masing mungkin maksimal Rp200 juta, satu sampai dua kegiatan. Nanti diawasi disampaikan ke DPRD nanti itu harusnya dimasukkan ke Pokir mereka," pungkasnya. ●



Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor

BANTU PRESIDEN PINDAHKAN IBU KOTA, PELAN-PELAN TINGGALKAN PERTAMBANGAN

Gubernur yang satu ini sering bikin sensasi untuk warga Bumi Etam. Alhasil, Isran Noor menjadi magnet bagi media, di samping terus membenahi persoalan di Kalimantan Timur yang tak ada habisnya.

Sehingga sangat wajar, namanya menjadi sepuluh kandidat "Gubernur Untuk Media". Karena tingkah dan lakunya, kerap diunggah di media sosial, yang sering membuat orang mengernyitkan dahi.

Salah satu yang sempat viral adalah ketika dia menyebut Presiden Joko Widodo akan masuk surga, karena telah memindahkan ibu kota negara. Ungkapan tersebut diucapkannya, sebelum memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia pada 7 April 2021.

Keesokan harinya, Isran mengaku ditelpon oleh Jokowi. "Tanggal 8 (April 2021) sore, saya dapat telepon dari beliau (Jokowi). 'Apalagi tuh Pak Isran, kan sudah lama itu'," ujar Isran menirukan percakapannya dengan Jokowi.

Isran melanjutkan, bila Jokowi berhasil

memindahkan ibu kota, dia akan dikenang oleh seluruh anak bangsa.

"Bapak tidak usah pikir juga. Karena kalau Bapak bisa pindahkan ibu kota ini. Bapak akan dikenang oleh anak bangsa ini sampai kapan pun sebagai sebuah wujud karya besar kepala negara," sebutnya.

Tapi di samping kelakukannya, sebenarnya pria kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, pada 63 tahun itu, serius bekerja untuk masyarakat Bumi Etam. Terutama mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim.

IKN bagi Isran dan seluruh rakyat Bumi Etam, sebagai berkah yang tak ternilai harganya. Pasalnya, selama ini provinsi tersebut hanya bergantung pada sumber daya alam.

Dengan adanya mega

proyek tersebut, diharapkan akan memberi efek domino yang besar bagi seluruh masyarakat Kaltim. Terutama dari sisi ekonomi.

Sebab, dalam proses pembangunan IKN, disebutkan Isran akan menyerap 150.000 tenaga kerja.

"Saya baru tahu dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas yang bekerja di ibu kota itu tidak kurang dari 150.000 orang," ujar Isran.

Hal ini dikatakan Isran pasti akan berdampak positif pada perekonomian di Kalimantan Timur. Sektor-sektor UMKM seperti di bidang penyediaan jasa catering ia sebut menjadi salah satu yang mendapat peningkatan jika pemindahan IKN berjalan.

"Kalau 150.000 orang untuk cateringnya anggaplah satu hari itu Rp50.000 untuk makan pagi, siang, dan malam. Kurang Rp7,5 miliar dalam satu hari. Itu baru makanan, belum lagi jasa-jasa barang lainnya dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah," jelasnya.

Harapan Isran Noor, untuk mengubah kebiasaan ekonomi yang selama ini digerakkan oleh roda pertambangan batu bara, serta minyak dan gas dapat terealisasi. Sebab, bergantung pada hasil bumi ucapnya tidak akan bertahan lama.

Isran meminta pemda tak terlena dengan pendapatan dari sektor sumber daya alam tak terbarukan itu. "Kita jangan merasa kenyamanan ada batu bara, minyak dan gas. Itu habis, tunggu aja. Habis tuh," ungkap Isran.

Oleh karena itu, Isran meminta pengembangan sektor perta-





nian di Kaltim sebagai pengganti. Bagi dia, pertanian adalah kegiatan usaha ekonomi terbarukan sebagai lokomotif ekonomi masa depan Kaltim. "Itu sangat penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat," tutur Isran.

Dia meminta kepala daerah di Kaltim bisa agar membuat program pro rakyat di sektor pertanian dalam arti luas, seperti perkebunan, pertanian pangan, peternakan, perikanan, juga kegiatan kehutanan. 'Silakan kembangkan sesuai potensi wilayah dan lahannya. Tempat kita ini apanya yang tidak bisa diusahakan. Tanam padi bisa, jagung bisa. Sayuran apa aja tumbuh, pelihara sapi, itik, ayam bisa. Mau budidaya ikan, banyak kawasannya," jelas dia.

Meski begitu, kata dia, perlu ada komitmen kepala daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan dan kawasan dengan pengembangan sektor pertanian tersebut.

Salah satu yang telah berhasil dilakukannya, untuk bisa keluar dari ketergantungan pada hasil alam, adalah dengan mengubah lahan bekas tambang di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara menjadi area penggembalaan mini, atau disebut mini ranch. Program itu dikerjakan oleh PT Bhramasta Sakti.

Setidaknya lahan seluas 2.400 hektare dikelola, sebagai tempat pem-

angunan ekosistem untuk fasilitas peternakan dan perkebunan yang terintegrasi pada tempat yang disebut Mini Ranch Jayatama. 200 hektare untuk peternakan, dan sisanya dimanfaatkan sebagai budidaya jagung.

Dia pun tak ragu untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada perusahaan, dan pemerintah daerah, karena mampu keluar dari zona nyaman, sekaligus menyelamatkan lingkungan. ●





Gubernur Banten, Wahidin Halim

AKSELERASI BANK BANTEN MENUJU ERA TEKNOLOGI DIGITAL

Wahidin Halim mengabdikan seumur hidupnya untuk Banten. Sejak mengawali karir sebagai pegawai negeri Kota Administratif Tangerang pada 1979, hingga kini menjadi orang nomor satu di provinsi tersebut.

Menjabat sebagai gubernur sejak 2017 silam, kiprah dan karir politik Wahidin Halim dimulai dari nol. Dari pegawai negeri biasa, kemudian camat, kepala dinas, asisten pemda, sekretaris kota, lalu Wali Kota Tangerang selama dua periode, hingga akhirnya Gubernur Banten pada 2017 silam.

Maka sangat wajar, pembaca Info Indonesia terutama yang berasal dari Banten, memilih dirinya untuk masuk dalam jajaran sepuluh besar "Gubernur Untuk Negeri".

Selama menjabat sebagai gubernur, sejumlah problematika dialami dirinya, bersama dengan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy. Terutama soal tata kelola pemerintahan, dan proses birokrasi.

Sebagai birokrat yang memulai perjalanan dari titik paling bawah, Wahidin Halim paham betul sulitnya proses pelayanan di masyarakat. Untuk itu, dalam masa pemerintahannya, dia memprioritaskan pengelolaan pemerintahan yang transparan.

Hasilnya, beberapa waktu lalu, Pem-
p r o v

Banten kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk lima kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Pencapaian ini merupakan bukti konkret Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pencapaian ini juga merupakan bentuk keberhasilan Pemprov Banten dalam melaksanakan misi pertama Pemprov Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Sejak mewakafkan dirinya sebagai gubernur, Wahidin Halim berkomitmen menjadikan Banten lebih maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.

Suatu harapan yang tidak mudah diwujudkan, tetapi bukan berarti hal mustahil terealisasi. Terlebih saat itu Pemprov Banten tengah didera sejumlah persoalan hukum yang menjadikan masyarakat sempat ragu dengan kepemimpinan sosok birokrat





Gubernur untuk Negeri

senior yang religius.

"*Alhamdulillah*, kita kembali meraih WTP untuk kelima kalinya. Mari kita syukuri, dan anggaplah ini sebagai berkah menyambut bulan suci meskipun masih dalam situasi pandemi," tutur WH dalam sambutannya.

Dia meyakini, pencapaian Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Tidak hanya aparaturnya di OPD Pemprov Banten, melainkan seluruh stakeholder terkait, yang tidak pernah lelah membimbing dan mendampingi serta mengawasi Pemprov Banten dalam mengelola keuangan daerah agar senantiasa akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain WTP, salah satu yang menjadi prioritas utama yang dikerjakan Wahidin Halim adalah menyelamatkan Bank Banten. Pasalnya, bank pembangunan daerah itu, sempat didera masalah di awal kepemimpinannya. Bahkan masuk sebagai bank dalam pengawasan khusus (BDPK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah dilakukan restrukturisasi pada Mei 2021 lalu, OJK pun melepas status BDPK. Dengan pencapaian tersebut, Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) pun akan dikembalikan kembali ke Bank Banten, meski sebelumnya sempat dicabut.

Kini Bank Banten siap mengakselerasi jalannya bisnis, sebagai mitra pemerintah provinsi. Wahidin Halim sebagai gubernur, ikut menyokong dengan penguatan permodalan dari kas daerah sebesar Rp1,55 triliun melalui aksi korporasi penawaran umum terbatas.

Hal tersebut berdampak pada peningkatan yang signifikan dengan ekuitas sebesar Rp1,36 triliun, meningkat 147,77 persen dari 2019 sebesar Rp549,53 miliar. Sehingga rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Perseroan meningkat menjadi 34,75 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9,01 persen.

Dalam rangka perbaikan kinerja ke depan, perseroan melanjutkan upaya peningkatan efisiensi terhadap pos-pos biaya. Bank Banten juga memperbaiki kualitas aktiva produktif, melalui penjualan Aset yang Diambil Alih (AYDA) dan pengelolaan penyelesaian kredit bermasalah melalui restruk-

turisasi, penagihan, dan penjualan agunan.

"Dukungan permodalan yang semakin besar menjadi salah satu faktor bahwa pencapaian kinerja akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi digital dalam upaya membangun keunggulan kompetitif

dan kolaborasi dengan perusahaan financial technology (Fintech) untuk mengembangkan potensi bisnis usaha UMKM guna pertumbuhan perekonomian daerah Banten," lanjut Agus.

Berdasarkan data RTI pada 20 Mei 2021, saham Bank Banten (BEKS) menyentuh harga Rp86 per lembar saham atau meningkat sebesar 7,50



berkelanjutan, khususnya di tengah pandemi," jelas Agus.

Untuk itu, perseroan akan mengembangkan analisis big data, dan business intelligence. Sehingga dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi pada masa mendatang.

"Kami juga akan memperkuat sinergi

persen pada perdagangan bursa.

"Tentunya dukungan pemegang saham kepada Bank Banten dengan disetujuinya seluruh mata acara Rapat, memberikan sentimen yang positif bagi segenap pemangku kepentingan sekaligus menambah keyakinan kami dalam menangkap peluang bisnis ke depan," tutup Agus. ●



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

URAI KEMACETAN AGAR JAKARTA LAYAK DIHUNI

Terlepas dari sosoknya yang sering mengalami pro dan kontra di masyarakat, popularitas Anies Baswedan tak perlu diperdebatkan lagi. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, kebijakan yang dibuatnya pasti akan disorot media nasional, hingga menjadi perbincangan masyarakat luas.

Maka, sangat wajar pembaca Info Indonesia memilih mantan Rektor Universitas Paramadina itu ke dalam jajaran sepuluh besar "Gubernur Untuk Negeri". Bahkan, Anies Baswedan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Dengan kelebihan sebagai 'media darling' dan menjadi perhatian banyak pihak, sejumlah prestasi tetap diraih Anies Baswedan dalam mengelola DKI Jakarta. Bahkan dia masuk ke dalam daftar 21 Pahlawan Transportasi 2021, versi Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI), bersanding dengan CEO Tesla, Elon Musk.

Anies terpilih sebagai pahlawan transportasi dari Indonesia karena dinilai berkontribusi dalam mengembangkan sistem transportasi

tasi yang terintegrasi dan inklusif di Jakarta.

"Kota ini bekerja mewujudkan tujuan bersama dalam membangun transportasi yang terjangkau dan inklusif bagi semua," kata TUMI dalam keterangannya.

Ada beberapa aspek yang disinggung TUMI sehingga Anies di-

anugerahi penghargaan ini. Yakni integrasi moda transportasi, jalur sepeda sepanjang 63 kilometer, renca-





na operasional bus listrik, dan renovasi stasiun sehingga terhubung dengan stasiun moda transportasi lain.

Sejak menjabat sebagai gubernur pada 2017 silam, salah satu program utama Anies adalah mengurai kemacetan. Dimulai dengan menyelesaikan proyek MRT dan LRT, hingga mengintegrasikan kendaraan umum seperti Kopaja dan Transjakarta ke dalam Jak Lingko. Program ini mendapat perhatian dunia.

Hingga pada 2019, sampai sekarang Anies terus berkomitmen menjadikan Jakarta, kota yang nyaman dan aman kepada masyarakatnya untuk menggunakan moda transportasi umum.

Pemprov DKI Jakarta bersama Jak Lingko juga merilis sepeda sewa yang dapat digunakan masyarakat turun dari fasilitas transportasi umum. "Hari Sabtu yang sejuk dan cerah ini Wakil Kepala Dinas Perhubungan Bapak Chaidir beserta rombongan bersepeda menuju kota tua," sebut Anies dalam unggahan media sosialnya untuk mengajak masyarakat mencoba sepeda yang diberi nama bike sharing.

Dengan upaya Anies itu, kini Jakarta telah keluar dari daftar sepuluh kota termacet di dunia. Mantan Menteri Pendidikan itu pun memamerkan prestasi itu langsung di hadapan Presiden Joko Widodo, ketika Hari Pers Nasional 9 Februari 2021 silam.

"Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lakukan perbaikan pembangunan," kata Anies.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, peringkat Indonesia terkait kemacetan terus mengalami perbaikan. "Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar. Kalau urusan kemacetan kita ingin keluar. Di 2017 Jakarta nomor empat di dunia, 2018 nomor tujuh, 2019 jadi nomor sepuluh, dan 2020 kita rangking 31," jelas dia.

Selanjutnya yang tak kalah menghebohkan adalah, wacana mengganti bus Transjakarta berbahan bakar gas, dengan listrik, yang diketahui lebih ramah lingkungan. Rencana ini sekaligus dalam rangka mengurangi polusi udara di langit Ibu Kota. Anies men-canangkan Program Langit Biru lewat penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019.

Juli 2020, PT Transjakarta melakukan uji coba dua bus listrik EV1 di rute layanan Blok M-Balai Kota selama tiga bulan. Bus yang diuji coba yakni tipe single low entry tipe K9 dan bus medium tipe C6.

Kedua bus ini memiliki daya baterai yang tahan lama dengan jarak tempuh diperkirakan mencapai 250 kilometer sebelum baterainya harus diisi ulang, dengan durasi pengisian kurang dari empat jam setiap harinya.

PT Transjakarta menargetkan pengoperasian bus listrik secara bertahap pada pertengahan semester kedua tahun ini. Transjakarta akan bekerja sama dengan sejumlah operator angkutan umum untuk mencapai target ini.

Terakhir adalah membuat integrasi untuk seluruh moda transportasi, dalam satu stasiun. Proyek ini dikerjakan bersama seluruh stakeholder mulai dari PT Mass Rapid Transit Jakarta, selaku operator MRT dengan PT Kereta Api Indonesia yang menjalankan

KRL.

Penataan dimulai dari Stasiun Tanah Abang, Sudirman, Senen, dan Juanda. Sekarang yang sedang dalam tahap pekerjaan Stasiun ASEAN yang berada di Blok M.

Tujuannya agar sistem pengelolaan transportasi publik saling terhubung. Dalam penataan ini, pemerintah juga menyediakan lokasi antar-jemput penumpang ojek online dan pangkalan, bajaj, bus kecil, halte bus Transjakarta, mikrotrans, dan jenis transportasi lainnya.

Anies mengatakan penghargaan Pahlawan Transportasi 2021 dari TUMI bukan saja untuk dirinya. Dia mengatakan pahlawan sebenarnya adalah ribuan orang yang bekerja setiap hari mendorong integrasi transportasi Jakarta.

"Jutaan warga yang ikut menyuksekkan dengan memilih berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik. Pengakuan ini adalah buat kita semua," kata Anies Baswedan ●





Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

AJAK GENERASI REBAHAN MENYELESAIKAN MASALAH

Pamor Ridwan Kamil sebagai kepala daerah yang nyentrik, dan dikenal luas oleh masyarakat tidak perlu dipertanyakan lagi. Di dunia nyata tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat mendapat apresiasi tinggi dari berbagai kalangan. Di media sosial, unggahan-unggahannya direaksi dengan sangat positif oleh milenial.

Maka sangat wajar pembaca Info Indonesia, memilih mantan Wali Kota Bandung itu sebagai sepuluh besar "Gubernur Untuk Negeri". Pria yang memiliki gelar arsitek dari University of California, Berkeley ini memang dikenal kreatif, dan mampu menjadikan Tanah Sunda, yang memiliki keindahan alam dan hasil pangan berlimpah semakin lebih berkelas.

Sejak awal berkampanye dalam

Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018 silam, Kang Emil selalu membagikan visinya terhadap satu kawasan. Kepiawaiannya sebagai arsitek dituangkan dalam program pembangunan yang terintegrasi antara pariwisata, potensi alam, dan juga ketahanan pangan.

Imajinasi yang kreatif, menjadi kunci dalam suksesi pemerintahan Gubernur Jabar ke-14 itu. "Saya mempresentasikan, Jabar sebagai provinsi paling

terdepan dalam pengembangan ekraf. Kenapa terdepan? karena satu-satunya provinsi yang telah memiliki Perda Ekraf," jelas Kang Emil.

Kreativitas itu juga yang mendorong Kang Emil dalam membuat setiap kebijakan. Baru-baru ini, dia mengajak seluruh generasi muda terutama milenial untuk menjadi petani.

Padahal, pertanian merupakan sektor terbesar ketiga yang menyumbang perputaran roda ekonomi di Jawa



Barat. Namun di saat yang sama sektor kian ditinggalkan oleh para generasi milenial. "Target saya ada 100 ribu petani milenial," kata Ridwan Kamil.

Selain bidang pertanian, program Petani Milenial mencakup juga bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dengan mengembangkan dan membudayakan pola smart farming, Petani Milenial akan menjadi terobosan penggerak roda ekonomi Tanah Sunda dalam jangka panjang.

Selain mengajak anak muda, dia juga akan mempersiapkan infrastruktur dan perangkat. Ridwan Kamil, menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agro Jabar, untuk merancang fasilitas etalase untuk produktivitas komoditas yang dikembangkan Petani Milenial. Di antaranya green house untuk pertanian, perikanan dengan teknologi bioflok, budi daya ayam, yaitu menerapkan close house.

Program ini rencananya akan mulai berjalan pada akhir 2021 ini. Program Petani Milenial merupakan

sektor potensial dalam pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19. Program itu menjadi salah satu solusi karena bertemu dua

solusi antara masalah banyaknya lahan yang tidak tergarap dengan para pencari kerja, selain demi mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Barat.

"Ada satu lagi bahwa akan ada krisis pangan, bahwa negara-negara lain tak mau mengeksport pangannya ke Indonesia, ada kejadian kita mengalami disrupsi kedua, yakni disrupsi ketahanan pangan," tuturnya.

"Saya lahirkan konsep Petani milenial, anak-anak muda yang pengang-

Animonya pun terbilang cukup tinggi. Generasi milenial di Jawa Barat yang mendaftar telah mencapai 8.998 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.240 orang dinyatakan lolos seleksi.

Bidang pertanian dengan komoditas tanaman hortikultura paling banyak diminati calon petani milenial.

Saat ini, para Petani Milenial itu, tengah dilatih oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap program tersebut. Pemagangan dan



guran karena COVID lebih banyak rebahan sekarang bertani, lahannya kita siapkan kalau tidak punya lahan, modalnya kita siapkan kalau tidak punya modal dan produknya kita beli kalau bingung jual ke mana, selama ini

program bagi petani muda tidak pernah menyelesaikan tiga urusan ini," ujar Kang Emil.

Layaknya sebuah program bisnis, Petani Milenial saat ini sedang dilakukan tahap kajian mendalam terhadap hasil riset analisis manajemen risiko. Terutama pada masalah pembiayaan. Rencananya perbankan akan diajak untuk bekerja sama dalam skema pembiayaan.

pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon Petani Milenial.

Untuk menggenjot motivasi para petani, dia menampilkan contoh-contoh petani yang sudah berhasil.

"Saya selalu memberikan harapan, bahwa ini bisa loh. Ada contoh-contoh orang yang sudah berhasil, orang yang tinggal di desa, rejeki kota dan bisnis mendunia. karena petani milenial ini petani digital, dia ngasih makan tidak pakai tangan tapi lewat hape, IoT tidak ke pasar tapi lewat unicorn, e-commerce, sehingga tidak ada halangan lagi tinggal di desa," ujarnya.

Ia menyebut program ini sempat menjadi pro dan kontra karena banyak pihak yang salah kaprah, dengan menganggap ribuan orang yang menjadi peserta Petani Milenial ini telah mendapatkan penghasilannya.

"Kan semua harus berkeringat dulu, namanya ngolah lahan, dipupukin dulu dan sebagainya," tutup dia. ●



Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

LAWAN PANDEMI DENGAN KEARIFAN LOKAL

Nama Ganjar Pranowo sedang wangi-wanginya. Terlepas dari isu kontroversial, sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia sangat aktif membagikan sejumlah program di media sosial.

Kebolehan memanfaatkan medsos sebagai platform berinteraksi juga digunakan-nya sebagai edukasi kepada masyarakat. Baru-baru ini dia bahkan mengajak masyarakat Jateng yang positif COVID-19 untuk nge-vlog selama menjalani proses penyembuhan.

Bukan tanpa tujuan, permintaan Ganjar Pranowo tersebut dimaksudkan agar masyarakat di luar sana mendapat edukasi bahaya Covid-19 dari para pasien yang menjalani isolasi.

Dengan demikian, Ganjar Pranowo berharap masyarakat bisa mengerti bahaya COVID-19 dan menghindari hal-hal yang bisa memperluas penyebarannya.

"Kita minta mereka untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat karena di antara mereka ada yang dari klaster kerja, ibadah, dan ada dari keluarga. Saya berharap mereka bisa bercerita, saya minta

ngevlog agar bisa mengedukasi masyarakat," katanya.

Video yang dibuat oleh para pasien yang sedang menjalani isolasi tersebut diminta untuk diunggah ke media sosial. Ganjar juga secara langsung meminta kepada para penyintas agar menjadi agen untuk sosialisasi protokol kesehatan di lingkungannya.

"Saya minta, teman-teman ini kalau sudah sehat agar menjadi petugas (agen) untuk mengingatkan mereka yang tidak taat prokes," ujarnya.

COVID-19 menjadi momok menakutkan bagi Jawa Tengah.

Terutama bagi Ganjar, mengingat sejumlah fasilitas kesehatan belum memadai untuk menghadapi pagebluk yang mengerikan ini.

Untuk itu, Ganjar yang akan habis masa jabatannya di periode kedua pada 2023 nanti meminta seluruh untuk gotong-royong jaga COVID-19. Program ini





dinamakannya “Jogo Tonggo”.

Menurut dia, “Jogo Tonggo” ini akhirnya melahirkan ide-ide kreatif, dan inovatif dari masyarakat. Hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat, saling gotong-royong untuk saling membantu.

“Jangan sampai ada stigmatisasi kepada mereka yang sakit karena mereka sakit itu butuh bantuan. Cuma prosedurnya saja, maskernya jangan dilepas. Ke mana-mana pakai masker. Kerumunan hindarkan semua. Kalau toh harus berkerumun maskernya jangan dilepas, segera pulang,” pesan

dengan tetap menjaga kearifan lokal. Selain itu, program ini juga menuntut adanya peran serta aktif masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota ‘Jogo Tonggo’.

Masyarakat yang tergabung dalam program Jogo Tonggo berasal dari berbagai organisasi dan sektor berbeda seperti karang taruna, dasa wisma, Satlinmas, Posyandu, bidan desa, pendamping desa, Gapoktan, PPL, dan organisasi/pihak terkait lainnya.

Program yang hanya dilaksanakan di satu daerah di Indonesia ini memiliki skala yang tergolong kecil. Jika

lebih mudah dilakukan. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa program ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 sepenuhnya.

“Penyebaran COVID-19 masih tetap terjadi, tetapi laju penyebarannya dapat sedikit ditekan dengan tanpa menutup aktivitas perekonomian masyarakat. Berbeda dengan pembatasan sosial yang biasanya berfokus pada aspek kesehatan, Jogo Tonggo menyeimbangkan antara aspek kesehatan (menjaga kesehatan warga), aspek ekonomi (memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi),



Ganjar.

Jogo Tonggo, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ‘jaga tetangga’. Merupakan gerakan untuk saling menjaga antar tetangga, saling bahu membahu dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Melalui program ini, Pemprov Jateng ingin menghadapi pandemi COVID-19



dibandingkan dengan PSBB atau PPKM yang berskala provinsi atau kabupaten/kota, Jogo Tonggo hanya berskala RW dengan ketua RW sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) Jogo Tonggo.

Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa semakin kecil ruang maka upaya pengendalian akan

aspek sosial dan keamanan (menjaga keamanan dan kenyamanan warga), serta aspek hiburan (mengurangi kejenuhan warga dengan melaksanakan hiburan mandiri sesuai kearifan lokal masing-masing daerah),” jelas Ganjar.

Alhasil, program Jogo Tonggo telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak seperti BNPB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) dan DPR RI. ●



Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X

PILIH STRATEGI ALA KUSIR ANDONG, KETIMBANG LOCKDOWN

Raja Kesultanan Yogyakarta ini mempunyai lima tekad dasar dalam memimpin wilayahnya. Selaku raja dan gubernur, dasar itu digunakan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Maka, tak salah pembaca Info Indonesia memasukkan dirinya ke dalam sepuluh besar "Gubernur Untuk Indonesia". Kepimpinannya Sri Sultan Hamengkubowono X di Yogyakarta sejak 7 Maret 1989, telah terbukti membuat dia dicintai masyarakat.

Pasalnya, Yogyakarta tumbuh dan berkembang sebagai kota modern yang tetap mempertahankan kearifan lokal. Kota pendidikan sekaligus pariwisata ini, mampu membangun dengan bertumpu pada nilai dan etika, dengan menghargai dan menjunjung tinggi tanggung jawab.

Maka ketika pagebluk menghajar Yogyakarta, Sultan langsung total menghadapinya dengan gagah berani. Dimulai dari melakukan pembatasan masyarakat secara lokal. Hingga, penyelamat ekonomi ala kusir andong.

Strategi ini dilakukan demi menciptakan keseimbangan ekonomi, termasuk wisata dengan sektor kesehatan. Hal ini mutlak dilakukan terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

"Layaknya seorang kusir andong pemula, perlu belajar tarik-ulur tali kekang untuk mengendalikan arah dan laju lari sang kuda," ujar Sultan saat mengumpulkan kalangan perbankan di DIY guna merumuskan strategi pemulihan perekonomian di masa pandemi COVID-19, Senin 14 September 2020.

Hal ini dilakukan demi menanggapi pertumbuhan ekonomi DIY yang negatif sepanjang dua kuartal berturut-turut. Seperti Bali yang juga tergantung pada sektor pariwisata, aktivitas perekonomian di DIY juga langsung melambat akibat berhentinya sebagian aktivitas manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang

mencapai minus 6,74 persen itu juga memicu inflasi yang rendah. Lebih jauh, Sultan menjelaskan soal filosofi tarik ulur ala kusir andong itu. Ia mengatakan, di masa pariwisata dan ekonomi menurun ini, inflasi rendah di satu sisi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, inflasi rendah akibat COVID-19 itu justru mempersulit stabilitas ekonomi karena harga komoditas turun dan pendapatan masyarakat juga rata-rata turun drastis.

"Meski harga murah, tetap tidak terjangkau oleh daya beli," ujarnya.

Sebaliknya, jika deflasi, pasti akan disertai penurun-

an harga dan menurunkan tingkat pendapatan serta laba perusahaan.

Ngarsa Dalem melanjutkan bahwa DIY telah mengalami deflasi per Agustus 2020 sebesar 0,04 persen (month to month/mtm). Deflasi ini terjadi di tengah aktivitas ekonomi yang mulai bergerak, terutama industri pariwisata dan perdagangan ritel.

Angka tersebut menjadikan laju inflasi secara akumulatif hingga Agustus 2020 sebesar 0,68 persen (year to date/ytd) atau 1,64 year on year/yoy) secara tahunan. Sultan pun mengatakan ketika tidak ada banyak pilihan untuk membangkitkan ekonomi itu, ada baiknya untuk menggencarkan modernisasi konsep among tani.

"Kita perlu menyediakan cadangan lumbung pangan yang menciptakan kedaulatan pangan, untuk melawan wabah dengan berkarya di lahan sendiri," ujar Sultan.

Menurutnya, perekonomian harus tetap bergerak jika tidak ingin mengalami resesi berkepanjangan akibat pertumbuhan ekonomi minus berturut-turut. Jika ekonomi tidak diperhatikan, masyarakat akan kesusahan memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya berdampak pada kesehatannya.

"Silakan ekonomi tumbuh tetapi protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Masyarakat juga bisa dengan ke-





sadaran mematuhi protokol. Kalau itu bisa dilakukan beriringan, sehingga masyarakat beradaptasi,” katanya.

Sebagai upaya menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan, DIY tetap membuka sektor pariwisata dengan penerapan protokol kesehatan, serta pencatatan data diri bagi setiap wisatawan. Seperti yang sudah dilakukan di Malioboro dan beberapa tempat wisata lainnya.

“Ini semua untuk bisa memberi jalan tengah bagaimana antara ekonomi dan kesehatan bisa seimbang. Itu yang saya maksud adaptasi. Saya kira dengan kondisi seperti itu ekonomi juga bisa tumbuh. Jangan hanya (masyarakat) di suruh di rumah sehingga cari sesuap nasi pun susah,” ujarnya.

Makanya ketika pandemi kembali melonjak, menghadapi gelombang penyebaran COVID-19 kedua ini, pilihan lockdown di DIY, jadi yang terakhir bagi Sultan. “Itu pilihan terakhir,” ujar Sri Sultan.

Dia akan terus mencari cara yang terbaik, demi menyelamatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat, bersama-sama. Raja Keraton Yogyakarta ini menuturkan, kebijakan pengendalian penularan COVID-19 yang ditempuh saat ini tetap berupa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro melalui Ingub yang telah diteken pada 15 Juni 2021.

Menurut dia, lockdown memiliki konsekuensi yang tidak mudah. Karena pemerintah harus mengganti biaya hidup seluruh warga selama kebijakan itu diterapkan sehingga opsi tersebut tidak mungkin ditempuh saat ini.

“Enggak ada kalimat ‘lockdown’. Saya enggak kuat ‘ngeragati’ (membiayai) rakyat se-Yogyakarta,” ucap Sultan.

Dengan menerapkan lockdown, lanjut dia, artinya seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ditiadakan. Aktivitas ekonomi di luar rumah harus ditutup, kecuali apotek atau pusat perbelanjaan.

“Yang lain tutup. Pemerintah (harus) ganti duwit (uang) masyarakat untuk makan. Lha kalau kita kan enggak kuat,” kata dia lagi.

Sultan memastikan bahwa kebijakan

yang diterapkan di DIY tetap sejalan dengan pemerintah pusat, yakni menyeimbangkan aspek ekonomi dengan kesehatan.

Ia meyakini seluruh warga DIY paham dengan pentingnya protokol kesehatan. Khususnya kedisiplinan memakai masker serta menghindari kerumunan untuk mencegah penularan. “Wong sudah satu setengah tahun (pandemi) kok tidak tahu,” kata dia.

Untuk itu, ketika program vaksinasi mulai berjalan, Sultan meminta warga DIY untuk segera mendapatkan suntikan. Hal itu dilakukan agar mendapat kekebalan komunitas.

Tapi tetap, vaksinasi bukan jalan

COVID-19 di Yogyakarta. Sri Sultan menyebutkan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dengan bersabar dan tidak mengadakan acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Saya punya acara-acara gunungan dan sebagainya itu kan (punya potensi) berkerumun. Itu memang dua tahun ini kan saya batalkan semua, dengan harapan untuk menghindari kerumunan,” ujarnya.

Pesan tersebut berhubungan dengan pandemi yang belum selesai, dan banyaknya masyarakat yang masih ingin melakukan hajatan. Oleh karena itu, Sri Sultan meminta agar masyarakat da-



akhir dari pandemi ini. Karena apabila lalai, tetap akan tertular COVID-19 yang kini virusnya bermutasi dengan lebih cepat.

“Vaksinasi itu bukan berarti tidak bisa positif, kan gitu. Di mana vaksinasi ini bisa menumbuhkan imunitas tapi bukan berarti untuk tidak bisa positif. Jadi ya tetap hati-hati,” pesan dia mengingatkan.

Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam menekan lonjakan kasus

pat membaca kondisi.

“Saya berharap semua masyarakat saya kira paham aturan itu, sehingga jangan sombong, maunya sendiri, mengabaikan hal-hal seperti itu (protokol kesehatan). Tidak peduli, kan gitu. Kalau saya melihatnya itu kesombongan pribadi saja. Yang perlu dibetulkan dalam kondisi seperti ini, perlu toleransi, tidak hanya pikiran tapi roso itu yang dipakai,” tutup dia. ●



Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah

BERSIAP GELAR BALAPAN MOTOR PALING BERGENGSI DI DUNIA

Sejarah akan ditorehkan Zulkieflimansyah sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mampu menggelar kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP. Walau pun akhirnya batal, karena persoalan pandemi, namun berkah ini membuat namanya melambung di kancah politik nasional.

Maka tak heran, Zulkieflimansyah dipilih pembaca Info Indonesia, sebagai sepuluh "Gubernur Untuk Negeri". Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu, mampu menjadi kepala daerah satu-satunya yang merepresentasikan wilayah timur Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, popularitas dan elektabilitasnya merangsek naik sebagai gubernur yang mampu membangun daerahnya. Hal itu terbukti dengan terpilihnya NTB sebagai lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika, yang digadang akan menjadi tuan rumah MotoGP.

Walaupun batal, tapi dia tak berkecil hati. Sebab, efek dari adanya Sirkuit Mandalika, akan berdampak signifikan pada sektor pariwisata. Karena event balapan motor lainnya bertajuk World Superbike, seri penutup tahun ini akan digas di Mandalika.

Untuk itu sejumlah persiapan tengah dilakukannya demi kesuksesan perhelatan World Superbike tersebut. Bersama dengan pemerintah pusat, dia terus berkoordinasi agar event yang satu ini tetap berhasil dilaksanakan.

Terkait kesiapan sirkuit, saat ini pembangunannya telah mencapai 77 persen. Tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo dipastikan aman untuk bisa rampung pada Maret 2022.

Meski sempat mengalami keterlambatan akibat pandemi, namun, pembangunannya kini sudah kembali dikebut. "Ini lebih karena keadaan atau situasi bukan kendala teknis dan keinginan kita," sambung Doktor Zul

Baru-baru ini, dia juga meminta kepada pemerintah pusat, untuk mem-

buka jalur penerbangan internasional langsung atau *direct flight* menuju Bandara Lombok.

Dia menerangkan, NTB memiliki banyak destinasi unggulan. Namun sayangnya, penerbangan langsung ke NTB masih minim.

"Ketika ada *direct flight*, kunjungan dari negara tetangga seperti Australia meningkat berkali-kali lipat. Jadi, *direct flight* ini adalah kemestian yang harus dilakukan," papar pria pemilik gelar Doktor bidang ekonomi industri dari Universitas of Strathclyde, Inggris.

Dukungan tersebut, diwujudkan dari Kementerian Perhubungan yang menyiapkan pengembangan sarana dan prasarana untuk menyaksikan sejumlah adu balap motor internasional. Pembangunan difokuskan pada semua transportasi darat, udara, dan laut.

Contohnya, perpanjangan runway dan perluasan terminal Bandara Interna-

sional Zainudin Abdul Majdi (BIZAM) oleh Angkasa Pura ditargetkan rampung Agustus 2021.

Untuk infrastruktur moda transportasi darat, semua fasilitas keselamatan jalan pendukung di Desti-

nasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika terus dilakukan pengembangan.





"Pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan alat angkut berupa bus bus penumpang sedang disiapkan. Insya Allah akan dicairkan dananya tahun ini dan sisanya tahun 2022," paparnya.

Selain itu, pengembangan infrastruktur laut dengan mempercepat Pembiayaan Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D) di 5 Pelabuhan Regional akan dilakukan. Di sisi lain, pembangunan sarana perhubungan laut khususnya di dermaga Gili Mas sudah mulai beroperasi.

Dermaga pelabuhan Gili Mas juga sudah dikembangkan tahun lalu untuk kapal-kapal pesiar ukuran besar. Serta, pelabuhan Gili Mas Lembar bisa juga dijadikan hotel terapung bagi ribuan penonton MotoGP.

Kesiapan pendukung lainnya, juga telah rampung. Yakni, bantuan jaringan internet yang kencang demi menyiarikan event balap internasional itu ke seluruh penjuru dunia.

Pemerintah, bersama PT Telkom telah memasang jaringan fiber optic di Kabupaten Lombok Utara, dan Mandalika. Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, terutama di pinggir lintasan sirkuit MotoGP sudah terpasang fiber optic agar wisatawan dapat menyaksikan acara balapan itu dengan baik.

Untuk sumber daya manusia, Pem-

prov NTB juga mempersiapkan pendukung pengembangan pariwisata dan event balap motor itu.

Doktor Zul, sapaan akrabnya, telah memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk anak-anak di NTB. Pasalnya, dalam perhelatan MotoGP diperkirakan dibutuhkan seribu pekerja yang terlibat untuk menyaksikan event.

Jumlah ini, belum termasuk tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sirkuit, rumah sakit dan hotel yang mencapai ribuan orang. Karena itu, dia meminta kepala OPD terkait untuk segera mengidentifikasi SDM dengan

kualifikasi yang dibutuhkan.

"MotoGP ini menjadi magnet yang luar biasa. Sehingga, jangan sampai kita menjadi pasif," tutur dia.

Menurut dia, NTB harus bersiap menghadapi banyak kegiatan berskala nasional dan internasional, yang digelar seperti MotoGP, World Superbike dan perhelatan besar lainnya.

Gubernur berharap ajang berkelas dunia itu bisa menjadi pemicu bangkitnya pariwisata NTB pasca-pandemi.

"Event internasional MotoGP ini bukan hanya milik masyarakat NTB, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan semua pihak sangat diharapkan," kata gubernur. ●



Gubernur Untuk Negeri



untuk memilih klik www.infoindonesia.id

Polling Gubernur Untuk Negeri memasuki tahap final
Mulai sekarang, kami menampilkan nama-nama yang berhasil
menduduki **10 besar** pada hasil polling kedua.



Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta



Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan



Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat



Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah



Wahidin Halim
Gubernur Banten



Zulkieflimansyah
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Isran Noor
Gubernur Kalimantan Timur



Sri Sultan Hamengkubuwana X
Gubernur D.I. Yogyakarta



Erzaldi Rosman Djohan
Gubernur Kepulauan Babel



Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat

PERCAYAKAN KPK

Beri kepercayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Insya Allah mereka akan bekerja lebih baik dari sebelumnya... Tugas kita sebagai warga negara adalah taat hukum... Semakin baik hukum, rakyat akan semakin taat... Negara adil, bangsa aman dan rakyat makan.... dan ibadah tenang.

Bukan balik arah. Faktanya Undang-Undang KPK sudah berubah. Beri kepercayaan kepada KPK pimpinan Pak Firlil Bahuri dan kawan-kawan untuk kerja transformatif.

Sekarang ada dewan pengawas

Penyidik tak bisa asal tancap gas

Semua harus melalui proses yang pas

Supaya semua jadi lugas dan tuntas

Demi kepastian hukum, saya bukan saja harus mau, melainkan juga harus rela menjadi tersangka KPK. Jika itu hasil sebuah penemuan bukti awal yang valid.

Tak usah takut. Saya tak akan lari. Ini tanah tumpah darah saya. Asalkan saya diberi hak membela diri secara terbuka di depan mahkamah.

Kita sebagai bangsa harus menciptakan suasana kejiwaan kepada kawan-kawan di KPK, bahwa memberantas korupsi bukanlah pekerjaan serAm dan luar biasa. Hukum harus menjamah jiwa manusia secara lembut karena ia milik Tuhan yang maha lembut. Penegakan hukum bukan perang.

Ah, saya sdh terlalu banyak bicara soal KPK sampai UU sudah berubah. Dengan segala hormat saya kepada kawan-



kawan yang menjadikan KPK sebagai alat perjuangan, saya mohon maaf Anda salah arah.

KPK itu lembaga negara bukan LSM. KPK sama dengan lembaga negara lain. Perjuangan saya yang paling berat selama ini adalah melawan jiwa muda yang frustrasi dan meyakini bahwa di negeri ini semua sudah rusak dan sisanya hanya ada di KPK. Sisanya hanya 75 orang baik itu kini habis sudah. Dunia sebentar lagi kiamat. Dari mana semua ini?

Mistifikasi kerja KPK di masa lalu dan eksklusivisme yang muncul sungguh sebuah sihir yang menyesatkan. Sekarang dunia sudah berubah.

Mari kembali ke dunia rasional. Lupakan tokoh-tokoh tua yang ekstrem. Pijaklah bumi kalian, sayangi bangsa ini, tanahnya, manusianya dan air matanya.

Jangan menegakkan hukum sambil frustrasi, sebab itu artinya kalian mengalami masalah kejiwaan. Penegak hukum adalah hamba Tuhan yang terpilih. Lembutkan jiwa kalian. Peganglah prinsip keadilan sebab hati manusia sdh cenderung pada keadilan apapun latar dan SARA-nya.

Selamat bekerja KPK yang harapan kami sebagai rakyat tetap besar. Bersatulah menjadi juru bicara keyakinan dan harapan bahwa bangsa kita akan segera terbang tinggi ke angkasa.

Rajawaliku terbanglah tinggi. Bawa harum nama bangsa. Merdeka! •

Dari linimasa twitter @fahrihamzah
16 Juni 2021





Sri Mulyani Indrawati

DARI KEUANGAN NEGARA HINGGA DAPUR RUMAH TANGGA

Kebijakan fiskal (anggaran) negara mau tidak mau akan berdampak pada urusan dapur rumah tangga rakyat biasa. Di tengah polemik rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkunjung langsung ke Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertemu langsung dan menjelaskan soal PPN sembako itu. Kunjungannya viral setelah Menteri Ani memuatnya di akun Instagram.

Dalam rekaman video itu, salah satu pedagang mengungkapkan keresahannya terkait wacana pemungutan PPN untuk bahan pokok atau sembako. Sri Mulyani pun menyampaikan penjelasan kepada pedagang, bahwa pemerintah tidak memungut pajak sembako yang dijual di pasar tradisional.

"Kena pajak sembako? Aku nggak ngambil pajak, nggak ada PPN sekarang. Yang barang-barang untuk rakyat ini nggak dikenai," ungkap Menteri Ani.

Sedangkan dalam narasi di akun Instagramnya, Bu Menteri mengungkapkan:

"Pagi tadi saya ke pasar Santa di Kebayoran belanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan. Sambil ngobrol dengan beberapa ped-



angang di sana.

Bu Rahayu pedagang buah bercerita akibat pandemi Covid-19 pembeli di pasar menurun. Namun, mereka bertahan dan tetap bekerja tak menyerah.

Bu Runingsih pedagang sayur yang meneruskan usaha ibunya yang sudah 15 tahun, bahkan mulai melayani pembeli secara online, dan mengantarkan barang belanja menggunakan jasa ojek online. Ia bercerita menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp2,4 juta dan Rp1,2 juta dari Pemerintah yang bermanfaat untuk menambah modal bahan jualannya. Anaknya yang masih SMP juara kelas dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Hebat Bu!

Ibu pedagang bumbu menyampaikan kekhawatirannya membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual. Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan asas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium im-

por seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak.

Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi kobe, wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharusnya berlaku pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak. Itu asas keadilan dalam perpajakan di mana yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi.

Dalam menghadapi dampak Covid-19 yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan. Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru."

Begitulah posting Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyertai video serta foto kunjungannya di Pasar Santa, Senin, 14 Juni 2021. Dalam waktu beberapa jam, posting tentang kunjungan itu langsung viral. Belum sampai 24 jam sejak muncul di akun Insta @smindrawati, postingan itu sudah

mendapat tanda suka (like) dari 50 ribu pengunjung lebih, menjadi postingan kedua terbanyak mendapat like setelah postingan tentang olahraga yang menyebut penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua.

Lepas dari itu semua, rekam jejak Sri Mulyani menunjukkan ia cukup akrab dengan urusan dapur, dan karena itu masuk akal pula jika hirau dengan perkembangan harga sembako. Menjelang Idul Fitri 1442 H pada Mei 2021 lalu, misalnya, pemerintah menerapkan larangan mudik, dan Menteri Ani memilih memasak di dapur, selain mengikuti silaturahmi online keluarga besarnya memanfaatkan aplikasi zoom, dan mengajak cucu berjalan-jalan ke tengah kota Jakarta.

Bu Menteri mengakui memang tidak terlalu aktif memasak sebab pekerjaan sebagai Menteri Keuangan sudah sangat menyita waktu. Namun di hari terakhir Ramadan 1442 H, ia menyempatkan turun ke dapur, dan memasak.

Bukan satu, melainkan dua jenis masakan. "Saya sampai dengan hari terakhir puasa masih ada rapat. Tapi saya sudah bilang sama suami saya kepingin masak lidah dan sambel goreng hati. Walaupun kita ada pesanan, tapi saya pengen masak masakan saya sendiri," katanya.

"Jadi lidahnya udah dibeli, sama hati-

• INFO PROFIL

nya udah dibeli, udah direbus. Waktu selesai rapat terakhir, jam setengah dua. Saya mulai masak jam tiga. Itu hari puasa terakhir. Tapi karena nggak bisa dicicipin, jadi agak gak pede karena udah lama nggak masak. Jadi kita teruskan sesudah buka puasa. Malam takbiran kita lihat lagi dicicipin, untung rasanya agak enak," ungkapnya.

Sambal goreng hati itu salah satu favoritnya di hari lebaran, kombinasi dengan opor ayam yang sudah menjadi tradisi lebaran di Indonesia. "Saya suka opor apalagi kalau dikasih kacang kedelai bubuk yang diawurkan di atasnya dengan sambal goreng ati, karena itu rasanya enak sekali antara manis, gurih

han Maret 2021 lalu.

"Saya selalu katakan di luar saya itu Menteri Keuangan yang punya 84.000 staf dan jajarannya. Begitu saya masuk rumah saya istri kamu dan ibu anak-anak. Saya bukan madam minister anymore," ujar isteri Tonny Sumartono itu.

Ia mengungkapkan hobi di rumah adalah memasak. Hobinya ini terbawa sampai ketika dia bekerja di Bank Dunia dan berkantor di Amerika Serikat.

Menurut dia, memasak adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri. "Saya senang dan menikmati masakan yang enak seperti ayam bumbu kecap, cabe ijo, bakmi ayam karena suami saya suka sekali bakmi. Saya suka membuat lumpia, masak

liki oleh semua orang. "Tapi juga harus dilihat mana yang paling butuh penanganan lebih cepat. Lalu harus dihitung juga harus dihitung berapa banyak waktu yang sudah saya habiskan dalam pekerjaan. Lalu berapa untuk keluarga."

Hal ini jika dilakukan oleh perempuan single memang akan lebih mudah. Tapi ketika sudah memutuskan untuk berkomitmen untuk berkeluarga dan punya anak juga harus memperhatikan prioritas tersebut. "Waktu saya pertama kali berkarir itu aja fokus ke dua anak, keluarga dan karir. Kalau bisa combine bagus. Dulu saya suka bawa anak saya ngajar dan mereka ikut di kelas dan tidak mengganggu, jadi mereka tahu



dan pedas untuk sambal goreng ati nya," ungkapnya

Bagaimana dengan semur lidahnya? Ternyata semur yang cenderung memiliki rasa manis gurih, ia tambahkan cabai sehingga ada sensasi pedas di dalamnya. "Rasanya agak enak. Tapi saya menyuruh orang di rumah untuk memberikan testimoni. Semur lidah pedas dibidang enak, tetapi sambal goreng hati kurang pujian jadi saya harus belajar lagi," tandasnya.

Di kesempatan lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan sebagai pejabat, ia tetap menjadi istri sekaligus ibu saat di rumah. Simak saja video Ngobrol Sore Semaunya (NSS) CXO Media dengan tuan rumah Putri Tanjung pada pertenga-



lidah cabe ijo, masak sate padang, itu membuat saya senang," ujar dia.

Memasak juga menjadi salah satu cara Sri Mulyani mengungkapkan cinta sebagai istri dan ibu. "Saya pasti tidak perfect sebagai perempuan, tapi yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Kalau saya lagi gombal, ini aku bikin teh. Itu agar relationship kita terpelihara kita harus bisa memposisikan kalau bukan menteri ketika di rumah. Jadi kalau saya pengen dimanja mereka tahu dan bilang 'jangan anggap kita staf loh ya'," ujarnya.

Dia menambahkan untuk mengatur antara karir dan rumah tangga perlu prioritas dan fokus ke pekerjaan. Sri Mulyani mengungkapkan di mata Tuhan yang mengatur hidup, 24 jam itu dimi-

apa yang ibunya lakukan," tandasnya.

Menurut dia hal ini penting agar ketika anaknya di rumah dan ibunya bekerja sang anak bisa respect dan tidak mencari-cari sang ibu sebelum jam pulang. "Tapi jangan semua untuk keluarga dan pekerjaan dan jangan menzalimi diri sendiri sampai kita nggak bisa mengerjakan apa yang kita senang. Misalnya kepengin ke spa, potong rambut atau pengen shopping," tambah Sri Mulyani.

Biar Menteri Keuangan, tetap saja Sri Mulyani Indrawati seorang perempuan dan mengurus dapur rumah tangganya. Boleh jadi itu akan terlihat juga dalam kebijakan PPN yang akan mengalami perubahan. Semua dapat menyaksikannya. ●



KALI INI KE PASAR KARENA JABATAN

Kunjungan Sri Mulyani Indrawati ke Pasar Santa pada Senin pagi, 14 Juni 2021 itu, memang bukan urusan dapur rumah tangganya. Melainkan urusannya sebagai Menteri Keuangan.

Jadi, yang menyertai Bu Menteri kali ini adalah staf di kementerian. Antara lain, Direktur Kepabebean Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Syarif Hidayat. Ia menjelaskan, sebagian besar pedagang lebih menyoroti ketersediaan pasokan dan pendapatan, bukan PPN.

"Yang menarik mereka lebih ke arah ketersediaan bahan pokok dan rata rata menurun omzetnya karena Covid-19," katanya. Dia menambahkan, sebagian pedagang bercerita sudah tidak bisa bayar sewa, sehingga pemerintah bergerak mengatasi persoalan itu.

"Di Pasar Santa banyak yang mendapatkan bantuan kredit UMi (usaha mikro). Pemerintah berpihak pada rakyat kecil, itu garis dasar kebijakan yang sedang digodok, sebagian dari mereka sudah online juga," tandas Syarif.

Kunjungan pagi hari itu berakhir sekitar pukul 07.45 WIB setelah Bu Menteri berdialog langsung dengan para pedagang. Beberapa antaranya justru menyampaikan kesaksian (testimoni) tentang kehadiran pemerintah membantu masyarakat melalui BPUM (bantuan produktif usaha mikro), pinjaman kredit, dan UMi.

Usai kunjungan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga menyelenggarakan media briefing mengenai rencana perubahan ketentuan PPN. Mengenai sembako, DJP menegaskan bahwa sembako di pasar-pasar tradisional tetap tidak akan dikenakan PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, mengungkapkan akan ada pembedaan terkait jenis bahan-bahan pokok atau sembako yang akan dikenakan PPN. Ia menegaskan bahwa sembako di pasar tradisional tetap akan dikecualikan dari PPN.

"Misalnya barang-barang kebutuhan

pokok yang dijual di pasar tradisional, ini tentunya tidak dikenakan PPN. Akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium. Jadi barang kebutuhan pokok yang dikenakan adalah yang premium," jelas Neilmaldrin Noor.

Ia menjelaskan, pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis barang, harga dan juga kelompok yang mengkonsumsi. Sehingga secara ekonomi menciptakan distorsi dan kurang tepat sasaran. Contohnya, beras, daging, jasa kesehatan dan pendidikan. Untuk daging, misalnya, ada berbagai jenis dan memiliki rentang harga yang sangat lebar seperti antara daging segar di pasar tradisional dan daging wagyu.

"Padahal maksud dari pengecualian dan fasilitas ini sesungguhnya kita berikan kepada masyarakat klaster bawah. Dan hal ini menandakan bahwa fasilitas yang diberikan selama ini kurang tepat sasaran. Oleh karena itu kita lakukan perbaikan-perbaikan," ungkapnya. •



GEGARA IMING-IMING BUNGA TINGGI

Sekali lagi terbukti, hasil investasi yang lebih tinggi sepadan dengan risikonya. Begitulah yang terjadi dengan dana deposito Rp20 miliar di salah satu cabang Bank BNI di Makassar, Sulawesi Selatan, yang ternyata tak tercatat dalam sistem bank pelat merah itu.

Kekesalan Hendrik, 41, memuncak setelah berbulan-bulan mengupayakan pencairan depositonya dan ayahnya, Heng Pao Tek. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat Hendrik bagaikan pengunjung rasa yang berorasi sambil mengacung-acungkan poster.

Namun, yang ia acung-acungkan bukanlah poster layaknya pengunjung rasa, melainkan dokumen bank yang hendak ia cairkan namun gagal. Sejumlah me-

dia memberitakan Hendrik mengamuk di salah satu kantor Bank BNI di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat, 11 Juni 2021. Dalam rekaman video tampak petugas keamanan berupaya menenangkan Hendrik yang datang bersama istrinya.

Hendrik mengaku kehilangan uangnya senilai Rp20 miliar lebih yang telah didepositokan di bank milik negara tersebut sejak 2019 lalu. Uang tersebut, menurut dia, hendak dicairkan untuk

membiayai pengobatan orang tuanya yang saat ini terbaring sakit.

Tak sangka, uangnya hilang begitu saja di dalam tabungan. Hendrik pun meminta kejelasan pihak bank. "Kejadian ini menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat. Kerugian saya sebesar Rp20 miliar. Uang itu untuk masa tua orang tua saya dan untuk pengobatan orang tua saya," kata Hendrik.

Ia berkisah, bersama ayahnya memanfaatkan layanan deposito di Bank



BNI Sudirman Makassar sejak 2019 lalu dengan iming-iming bunga sebesar, 8,25 persen per bulan. Selama dua tahun, sambungunya, pembayaran bunga selalu beriring dengan notifikasi atau pemberitahuan masuk ke rekening koran miliknya. Jadi, Hendrik yakin deposit dana Rp20 miliar di bank BNI aman.

Ia dan ayahnya memutuskan untuk mentransfer uang tabungannya dari Bank Maspion ke BNI Cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar dengan total nilai sekitar Rp20,1 miliar. Transfer menggunakan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), sampai hampir seketika. "Jadi, tak pernah bawa uang cash atau tunai," kata Rudy Kadiaman, salah satu anggota tim advokat nasabah Bank BNI itu, Rabu, 16 Juni 2021.

Hendrik menjadi nasabah BNI per 4 Desember 2018. Ia menabung uangnya senilai Rp10,6 miliar di BNI dengan cara transfer dari Bank Maspion. Sementara Heng Pao Tek tercatat menjadi nasabah BNI sejak 23 Desember 2019 dengan menabung uangnya kurang lebih Rp9,5 miliar

melalui transfer dari Bank Maspion juga.

Namun pada Februari 2021, ia terkejut. Saat bermaksud mencairkan uang miliknya, dana itu tidak ada di Bank BNI. Notifikasi dana masuk ke rekeningnya pun sudah berhenti sejak Maret 2021 lalu.

"Saya dan ayah saya serta seluruh keluarga tidak menyangka uang saya bisa hilang begitu saja, sedangkan uang saya dan uang ayah saya sebelum didepositokan," kata Hendrik.

Semula, kata dia, uang tersebut merupakan tabung biasa dan sudah masuk BNI. "Tapi, pada 23 Maret 2021 saya ingin mencairkan bilyet deposito milikku dan bapakku untuk dipakai biaya berobat, pihak BNI tidak bisa mencairkan," lanjut Hendrik.

Lebih dari itu, Hendrik mengungkapkan, BNI menuding bahwa bilyet miliknya dan ayahnya palsu. "Dari situ saya dan ayah saya serta seluruh keluarga sangat stres karena tidak menyangka uang kami yang ada di BNI lenyap begitu saja. Padahal, ayah saya memerlukan biaya yang begitu banyak untuk bero-

bat," tuturnya.

Usai deposito gagal dicairkan, Hendrik berulang kali mendatangi kantor cabang dan mempertanyakan nasib uang depositonya ke BNI. Tapi hingga kini tak ada penjelasan kenapa uang yang ditabungnya tetap tidak bisa kembali.

Di tengah proses meminta uang depositonya kembali, BNI sempat menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh nasabah. Surat itu intinya berisi bahwa nasabah yang bertanda tangan tak akan memperlakukan BNI. Selain itu, surat tersebut juga menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah antara nasabah dan oknum karyawan BNI.

Para nasabah langsung menolak permintaan tanda tangan surat pernyataan itu. "Dia (BNI) menunjuk karyawannya. BNI selalu lepas tanggung jawab. Kalau karyawannya (BNI) menggelapkan dana, masak bukan urusan BNI?" kata advokat Rudy Kadiaman.

Jadi, Hendrik bersama keluarga pun berupaya mempertanyakan deposi-

tonya ke BNI. Pertemuan pun terjadi beberapa kali dengan pihak BNI, tetapi tidak kunjung ada jalan keluar yang didapatkannya.

"Saya pun bersama beberapa pengacara melakukan pertemuan dengan pihak BNI untuk terus mempertanyakan keberadaan uang saya. Namun, sampai saat sekarang pun tidak ada kejelasan dari pihak Bank BNI. Saya pun telah men-

kami, sehingga kami telah melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum," ujar Corporate Secretary BNI Mucharom dalam keterangan resmi.

Mucharom menegaskan, manajemen BNI sangat menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. BNI juga berkomitmen untuk selalu menjaga seluruh dana nasabah yang disimpan di BNI.

bank yang dicicil. Tapi kami tidak mau kalau dana itu dibayar cicil," ungkapny.

Anggota tim advokat lainnya, Charoline Lumba menambahkan, tak ada konfirmasi atau penjelasan dari Bank BNI bahwa dana itu dicicil. Oleh sebab itu ia meminta kepada BNI agar memberikan penjelasan secara resmi. Itu agar ada kejelasan terhadap kliennya. Kalau pun dicicil maka BNI harus mengembalikan



BNI Mucharom pernah menjabat CEO Wilayah BNI di Makassar).

empuh jalur hukum dengan melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib dan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar," ungkap Hendrik.

Sedangkan Bank BNI sejauh ini memastikan tidak ada dana yang masuk sebagai cover deposito dari nasabah dalam kasus dugaan pemalsuan bilyet deposito di Kantor Cabang BNI Makassar. Oleh sebab itu, BNI memilih penyelesaian secara hukum untuk mendapatkan titik terang terkait keberadaan dana yang sebelumnya telah dikeluhkan oleh nasabah tersebut.

"Kami telah menerima komplain nasabah dan menemukan adanya pemalsuan bilyet deposito BNI yang dipastikan tidak ada dana masuk dalam sistem

"Dana nasabah dijamin aman di BNI dan pelayanan tetap berjalan normal. Kami mengapresiasi nasabah yang tetap setia bertransaksi dengan BNI," ujarnya.

Mucharom juga mengimbau agar nasabah mengaktifkan BNI Mobile Banking, sehingga dapat memeriksa kondisi rekeningnya setiap saat, baik terkait dana masuk maupun dana keluar, serta transaksi-transaksi keuangan lainnya. "Nasabah berkewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dan fasilitas perbankan yang dimilikinya," pesannya.

Toh Hendrik mengaku sempat ada uang Rp3 miliar masuk ke rekening korannya. Namun karena menganggapnya janggal, Hendrik lantas mempertanyakan ke pihak bank.

"Alasannya uang itu adalah bunga

sisanya lagi sebesar Rp 17,1 miliar sehingga dana yang didepositokan bisa kembali utuh.

Menurut Charoline, raibnya dana deposito di BNI, bukan hanya dialami oleh satu korban saja. "Bukan klien kami saja, korban diduga ada lagi. Kami mendapat informasi dari tim pemeriksa Mabes Polri, tapi belum tahu siapa saja korbannya," lanjut Olin, panggilan Charoline.

Oleh sebab itu Hendrik menemui pihak BNI hingga tujuh kali, namun pencairan membentur jalan buntu. "Kami curiga kemungkinan besar ada sindikat karena korbannya ada tiga orang," ucap Wilson Imanuella Lasi, advokat Hendrik lainnya.

Total dana yang diduga raib sebesar Rp 110 miliar. "Ada nasabah lain juga men-

galami kasus yang sama,” ungkap Wilson.

Wilson menyebutkan, pada Mei 2021 lalu, kliennya Hen Pao Tek juga sempat diminta keterangan sebagai saksi oleh Badan Reserse Kriminal Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri. Menurut Wilson, setidaknya ada sembilan bilyet dengan total Rp110 miliar tadi.

Namun, sambungnya, semua tak tercatat sistem di BNI. Sedangkan nomor

kelas Bima, telah ditindaklanjuti dengan melaporkan oknum pegawai ke pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. “Kita sendiri yang melaporkan ke polisi dan saat ini dalam penyelidikan. Ada oknum pegawai yang telah kita laporkan,” ungkap Bima.

Menanggapi kasus nasabah Bank BNI di Makassar itu, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana

bunga penjaminan LPS, dan tidak menyebabkan bank gagal. Ia menuturkan LPS dan OJK akan berkoordinasi ketika terjadi fraud dan moral hazard yang membuat bank menjadi gagal.

Sedangkan pengawasan bank termasuk potensi adanya fraud dan moral hazard masih dalam kewenangan pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalau banknya masih aktif atau



Hendrik mengaku kehilangan uangnya senilai Rp20 miliar lebih yang telah didepositokan.

rekening yang tercantum adalah tabungan taplus bisnis nasabah.

Pemalsuan bilyet tersebut diduga dilakukan oknum pegawai BNI Cabang Makassar berinisial MBS. “Kami sebatas saksi karena BNI yang melapor, dana hilang dilakukan oknum. Tapi persoalan kita dengan BNI, bukan oknum itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Wilayah Regional 7 Bank BNI, Bimawan Singgih Yulianto mengungkapkan saat ini masih menunggu keputusan hukum. “Pada prinsipnya kami ini adalah bank pelat merah, segala sesuatunya kami menunggu dari proses hukum dan apapun keputusan hukum kami tetap hormati itu,” kata Bima.

Sedangkan komplain dari nasabah,

Soelistianingsih mengingatkan para deposan atau investor untuk kritis bertanya terkait risiko-risiko atas investasi mereka agar terhindar dari terjadinya kesalahan dalam berinvestasi.

“Deposan atau investor harus kritis bertanya terkait risiko atas investasinya tersebut,” katanya. Ia menegaskan para deposan atau investor jangan hanya tergiur dengan return dari investasi mereka saja, tapi juga harus kritis dalam berbagai hal termasuk terkait besaran suku bunga.

“Jangan tergiur dengan return saja. Deposan bisa menanyakan berapa suku bunga penjaminan LPS kepada banknya,” tegasnya.

Ia menyebutkan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan deposan yakni rekeningnya tercatat, tidak melebihi suku

hidup kewenangan itu masih di OJK,” ujarnya.

OJK pun telah memanggil Bank BNI untuk diminta keterangan ihwal kasus ini: mengapa bisa terjadi dan bagaimana hasil evaluasi internalnya. Alhasil, bank pelat merah itu memperkarakan karyawan yang diduga terlibat. “Ya kita tunggu keputusan hukumnya,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua, Mohammad Nurdin Subandi.

Sedangkan pihak Hendrik menggugat perdata Bank BNI di Pengadilan Negeri Makassar sebagai upaya agar dananya kembali, selain melapor ke kepolisian. Sementara, begitulah perkembangan dana Rp20 miliar yang kena iming-iming deposito berbunga tinggi. ●

AGAR PROSPEK EKONOMI LEBIH CERAH

Bank Dunia melihat perlunya investasi tambahan untuk menjamin pertumbuhan Indonesia sesuai dengan proyeksinya. Sekalian menyuntik dananya ternyata.

Kabar baiknya, sepanjang 2020, tahun pertama pandemi Covid-19, penyusutan atau kontraksi perekonomian Indonesia tak separah skala global secara keseluruhan. Ini bekal yang baik sebenarnya. Namun, tak urung, penyusutan ekonomi berdampak langsung pada peningkatan jumlah orang miskin.

"Ekonomi dunia menyusut 3,5 persen dibandingkan dengan 2,1 persen di Indonesia. Di Indonesia sekitar 2,9 juta orang jatuh miskin. Tetapi respons kebijakan pemerintah (berupaya) menghindari kemungkinan hasil ekonomi dan sosial yang lebih buruk," ungkap Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, dalam diskusi online (menggunakan jaringan internet) peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects: Boos-

ting the Recovery, Kamis, 17 Juni 2021.

Ke depan, kata Kahkonen, prioritas kebijakan publik di seluruh dunia adalah mengakhiri resesi yang merugikan ini secepat mungkin dan membangun ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Ia berharap Indonesia juga akan menyelaraskan diri dengan asas-asas berkelanjutan dan inklusif itu.

Pada titik ini, Wakil Dubes Australia Allaster Cox yang juga tampil dalam diskusi menegaskan, kebijakan pemerintah Indonesia akan sangat menentukan hasil dari upaya itu. "Bahkan ketika vaksin diluncurkan, sulit untuk melihat masa depan ekonomi. Pemerintah memiliki peran kunci untuk mengurangi ketidakpastian ini yang berarti mendapatkan respons kesehatan yang tepat yang akan menguntungkan ekonomi," ujarnya.



Boleh jadi Cox menyoal jumlah cakupan vaksinasi di Indonesia dan juga kecepatannya. Jadi, mengikuti alur pandangan Cox, salah satu kunci pemulihan ekonomi Indonesia adalah bagaimana kebijakan vaksinasi Covid-19 akan meningkatkan kualitas kesehatan bangsa ini, dan pada gilirannya akan berkonsekuensi pada perekonomian nasional.

Sedangkan dari kalangan pemerintah Indonesia, tampil Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. "Mulai Maret tahun ini mobilitas masyarakat meningkat. Kami berharap kuartal kedua akan mendorong pemulihan kami, tetapi kami harus tetap berhati-hati sehingga kebijakan fiskal harus fleksibel," ungkapnya.

Rupanya Wamenkeu juga menyinggung kecenderungan peningkatan tarif pajak. "Dalam reformasi perpajakan, bukan hanya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, melainkan juga, yang lebih penting, prinsip kesetaraan yang dapat dibantu oleh pajak," tukasnya.

Sedangkan Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab mengungkapkan, gabungan guncangan kesehatan dan ekonomi jelas-jelas berdampak pada perusahaan dan rumah tangga. "Pada kuartal III 2020, lebih dari 40 persen perusahaan Indonesia melaporkan penurunan penjualan, yang pada akhirnya mempengaruhi pasar tenaga kerja dan menyebabkan 2,8 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan," tambahnya.

Kesaksian datang dari Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, salah satu perusahaan jasa transportasi terbesar di Indonesia. "Ini pertama kalinya dalam sejarah kami membukukan kerugian bersih. Industri transportasi kehilangan satu juta pekerja pada 2020. Kami pulih lebih awal karena merek tepercaya kami, tetapi pemulihan tetap tidak merata," ungkapnya dalam diskusi itu.

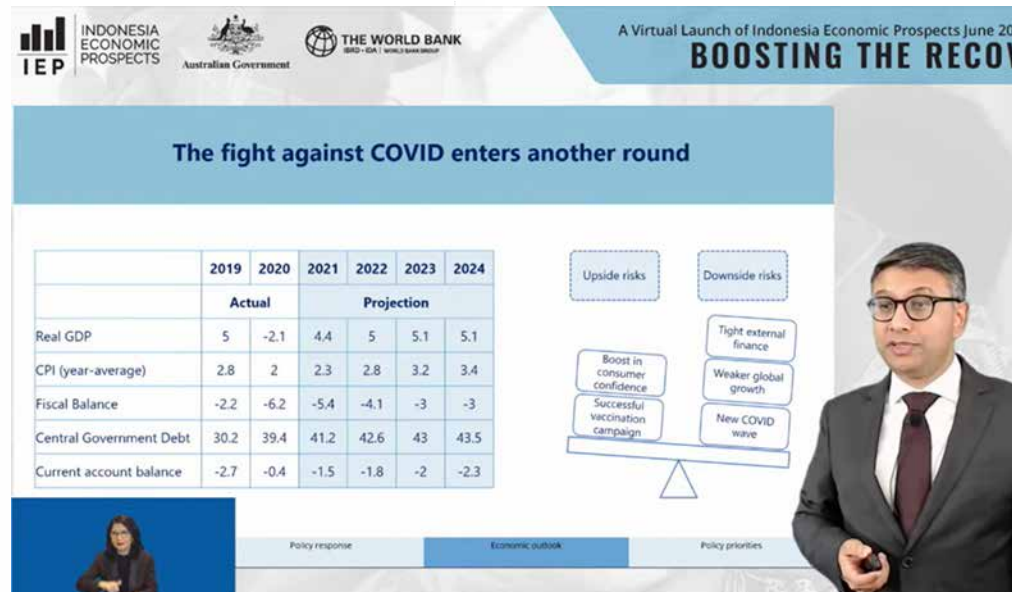
Sedangkan CEO PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti berkisah tentang disrupsi dan dampak Covid-19 terhadap produk kebutuhan sehari-hari dari perusahaannya. "Covid-19 memaksa kami mengubah cara berbisnis. Kami menghadapi gangguan dalam operasi, pasokan, dan yang terbesar

adalah permintaan. Konsumen telah mengubah pola perilakunya. Digital dan e-commerce sekarang menjadi kuncinya," kata dia.

Sebagai konsekuensinya, ia melihat perlunya kelanjutan investasi di bidang sumber daya manusia. Apa yang membuat kita menang di masa lalu belum tentu membuat kita menang di

berlebih," kata Wakil CEO Pan Brothers Anne Patricia Sutanto.

Toh di tengah keterpurukan itu, Habib Rab menghargai respon fiskal Indonesia berupa alokasi anggaran yang cukup baik dibandingkan dengan negara lain, baik dalam ukuran maupun kecepatan realisasi. "Secara keseluruhan belanja bantuan sosial



masa depan. Dan dengan gangguan ini kita harus melakukannya lebih cepat," ungkap Ira.

Nah, pengusaha tekstil dari PT Pan Brothers Tbk mengakui persaingan di masa pandemi Covid-19 memang tetap berat. "Kita belum memiliki normal baru dan permintaan lebih sedikit. Indonesia diuntungkan dari ketegangan geopolitik tetapi kita harus menghindari dumping dari negara-negara dengan barang-barang manufaktur

hampir tiga kali lipat. Tanpa ini, jumlah orang yang jatuh miskin akan berlipat ganda," ujarnya.

Jadi, kata dia, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen pada 2022. Proyeksi ini lebih baik dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya di angka 4,8 persen.

Sedangkan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi RI bisa mencapai 4,4 persen. Namun demikian, proyeksi ini di bawah target pemerintah pada

• INFO EKONOMI

rentang 5,2 persen-5,8 persen.

"Baseline untuk proyeksi pertumbuhan: 4,4 persen (2021); lima persen (2022). Tapi masih ada ketidakpastian besar. Skenario penurunan: 2,1 persen (2021); 3,1 persen (2022)," sambung Habib Rab.

Habib menuturkan, angka pertumbuhan pada tahun 2022 diasumsikan

fiskal jangka menengah seperti meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. "Pertama, memenangkan perlombaan melawan infeksi," tandasnya.

Prioritas vaksinasi, kata dia, harus diperluas ke daerah-daerah lain dengan transmisi tinggi. "Kemudian testing, tracing, dan akselerasi untuk intervensi menjadi penting, bersamaan

vaksinasi baik, maka menjaga kepercayaan masyarakat," kata Habib.

Langkah ketiga yakni mengembangkan strategi fiskal jangka menengah, termasuk rencana yang jelas untuk meningkatkan pendapatan pajak dan menekankan belanja prioritas. Habib melihat, upaya meningkatkan pendapatan dari pajak dapat membantu Indonesia kembali pada defisit fiskal 3 persen dari PDB pada 2023.

"Revenue atau pendapatan kalau ada krisis naiknya susah sekali. Tapi pada saat yang bersamaan belanja negara harus naik. Oleh karena itu belanja prioritas dan peningkatan basis pajak menjadi sangat relevan," tandasnya.

Menurut dia, ini merupakan upaya menyeimbangkan dukungan fiskal dengan kesinambungan fiskal. "Jangka pendek: memberikan keringanan kepada keluarga dan kebijakan fiskal untuk mendukung permintaan produk swasta. Jangka menengah: kurangi anggaran dalam transfer publik yang kebutuhannya lebih rendah. Ini akan membutuhkan kombinasi angka pengeluaran dan pendapatan," kata Habib.

Selain itu, ekonom ini juga mengemukakan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan inklusif, termasuk partisipasi ekonomi perempuan untuk mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan standard kehidupan masyarakat. "Sekitar 47 persen pekerja Indonesia terjebak di bawah status kelas menengah. Setengah dari wanita dewasa tidak secara formal bekerja. Ada peluang bagi Indonesia untuk membangun ke depan lebih baik dengan strategi empat cabang," tambah Habib.

"Pertama, prioritas segera adalah memastikan bahwa orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau tidak dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja mendapat pekerjaan dan penghasilan," ungkapnya. Kedua, mendorong produktivitas industri untuk menebalkan kelas menengah yang masih terbatas karena selama dua dekade terakhir, lapangan kerja yang tercipta produktivitasnya rendah dan daya serapnya lebih besar untuk pekerja berketerampilan rendah.

Cabang ketiga, sambungnya, peningkatan produktivitas akan men-



Non Purnomo.

dari lebih cepatnya pemberian dosis vaksinasi Covid-19 kepada rakyat. Namun agar sesuai prediksi, Indonesia dinilai perlu menyelesaikan tiga tantangan.

Tiga tantangan yang dimaksud adalah menang melawan penyebaran Covid-19 dengan vaksinasi massal, mensejajarkan strategi fiskal dan moneter sampai pemulihan ekonomi lebih kuat, dan mengembangkan strategi

dengan restriksi pergerakan dari warga," ungkap Habib.

Kelangsungan paket bantuan sosial seperti pada 2020 di tahun ini, menurut dia, berpotensi menjaga 4,7 juta orang agar terhindar dari jurang kemiskinan. "Dalam asesmen kami, menjaga paket bantuan akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan cukup signifikan, dan kebijakan fiskal akan turut mendorong program vaksinasi. Bila

dorong permintaan lebih banyak keterampilan sehingga akan membutuhkan lebih banyak pasokan keterampilan di pasar domestik. "Namun tantangannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan; dan lembaga vokasi atau balai latihan kerja memberikan pelatihan yang diperlukan pasar kerja; yang perlu pula adalah perbaikan peraturan ketenagakerjaan," kata Habib.

Sedangkan cabang keempat, potensi ekonomi kaum perempuan lebih dioptimalkan untuk produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. "Jika Indonesia dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan hingga 59 persen pada 2025, maka sumbangannya dapat meningkatkan pertumbuhan tahunan sebesar 0,7 persen," ungkap Habib.

Secara umum, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pada 2020 lalu pendekatan pemerintah adalah melakukan apapun yang diperlukan dan melakukannya dengan cepat, dan fokusnya adalah membantu populasi termiskin. "Pada 2021 ada sektor-sektor tertentu yang perlu kita perhatikan lebih dekat tentang bagaimana memberikan dukungan terbaik," ungkapnya.

Rupanya kajian Bank Dunia tentang prospek ekonomi bukan lembaran kertas laporan belaka. Ternyata, Bank Dunia menyuntikan dana lagi demi pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Namanya bank, apalagi jika dana itu jika bukan berbentuk pinjaman.

Febrio mengungkapkan, pemerintah telah mendapatkan pendanaan senilai 800 juta dolar AS dari Bank Dunia. Jika dikonversikan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 14.500, maka nilai pembiayaan dari Bank Dunia itu setara dengan Rp 11,6 triliun.

Kepala BKF Kemenkeu itu menjelaskan, dana tersebut akan dialokasikan untuk reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia. Sehingga mampu membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi dalam negeri.

Sedangkan pelaksanaannya akan menggunakan dua pilar. Pilar pertama bertujuan untuk mempercepat investasi den-

gan membuka lebih banyak sektor untuk investasi swasta, khususnya investasi langsung, dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan.

Pilar kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan komoditas pangan pokok dan

estasi langsung yang berorientasi ekspor, meningkatkan integrasi perekonomian Indonesia ke dalam ekonomi global, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas, dan meningkatkan daya saing.

Ia menambahkan, reformasi tersebut akan mendukung transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas menuju yang berbasis pada



Wakil CEO Pan Brothers Anne Patricia Sutanto.



CEO PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti.

bahan baku serta untuk memfasilitasi akses ke input manufaktur.

Febrio menyatakan dana tersebut menandakan bahwa World Bank menyambut positif atas komitmen pemerintah Indonesia dalam akselerasi reformasi struktural untuk menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong inv-

nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. "Pertumbuhan investasi tahun 2021 harus dipastikan positif agar bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan," kata Febrio sehari setelah diskusi dari Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste. •



YANG NAIK-TURUN DAN NAIK TERUS

Para eksportir tampaknya bekerja keras menjual produk Indonesia ke luar negeri. Alhasil, dalam periode Januari-Mei 2021, neraca perdagangan Indonesia surplus terus. Perlu imbalan penanganan pandemi Covid-19 yang juga menjamin kesinambungan.

Angka penularan Covid-19 naik-turun. Namun, ekspor Indonesia naik terus.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2021 mengalami surplus 2,36 miliar dolar AS dengan nilai total ekspor sebesar 16,60 miliar dolar AS dan impor 14,23 miliar dolar AS. Sekaligus menjadi yang tertinggi selama 2021.

"Kalau kita lihat pergerakan neraca

perdagangan mulai Januari sampai dengan Mei 2021, berarti surplus perdagangan Indonesia merupakan yang tertinggi selama 2021. Selain itu artinya Indonesia mengalami surplus perdagangan sebanyak 13 bulan berturut-turut, dan ini patut diapresiasi," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam temu media secara virtual di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.

Suhariyanto mengemukakan, komoditas penyumbang surplus terbesar

berasal dari lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, dan besi baja. Selain itu, perdagangan Indonesia mengalami surplus dengan beberapa negara pada Mei 2021 yakni dengan Amerika Serikat surplus 1 miliar dolar AS, Filipina surplus 539 juta dolar AS, dan dengan Malaysia 444,2 juta dolar AS.

Sedangkan perdagangan dengan beberapa negara masih mengalami defisit. Antara lain, dengan China de-



fisit 512,5 juta dolar AS, Australia defisit 332,6 juta dolar AS, dan dengan Korea Selatan defisit 185,5 juta dolar AS.

Dengan demikian total neraca perdagangan RI sejak Januari-Mei 2021 mengalami surplus 10,17 miliar dolar AS. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan surplus neraca perdagangan pada periode yang sama di tahun 2020 yang angkanya 4,18 miliar dolar AS.

Beberapa negara tercatat sebagai negara tujuan ekspor nonmigas terbesar dari Indonesia. Tiga negara yang masuk sebagai pangsa ekspor nonmigas terbesar yaitu Tiongkok dengan besaran mencapai 3,47 miliar dolar (22,14 persen), disusul Amerika Serikat sebesar 1,70 miliar dolar (10,88 persen) miliar dan Jepang 1,10 miliar dolar (7,01 persen). Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai total 40,02 persen.

Kemudian, tiga negara terendah sebagai pangsa ekspor nonmigas ditempati oleh Taiwan yang hanya

menyentuh 0,48 miliar dolar (3,05 persen), diikuti Thailand sebesar 0,42 miliar dolar (2,69 persen) dan terakhir ditempati Belanda hanya 0,35 miliar dolar (2,23 persen). Sekadar diketahui, ekspor nonmigas di dalamnya meliputi bahan bakar mineral, hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri pengolahan dan lain sebagainya.

Untuk nilai ekspor bahan bakar mineral naik pada periode Mei 2021 yakni mencapai 281,9 juta dolar atau meningkat sebanyak 13,91 persen. Peningkatan ini disebut sebagai peningkatan ekspor nonmigas terbesar selama periode ini.

Selain bahan bakar mineral, sektor ekspor nonmigas lainnya pun mengalami peningkatan seperti ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode Januari sampai Mei 2021 naik 30,53 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Demikian juga ekspor hasil pertanian naik 13,39 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 31,82 persen.

Selanjutnya, sebaran ekspor nonmigas ke negara ASEAN lebih banyak dibandingkan dengan Uni Eropa. Masing-masing tercatat 3,14 miliar dolar (20,03 persen) untuk ASEAN dan 1,41 miliar dolar (8,98 persen) untuk Uni Eropa.

Sedangkan berdasarkan provinsi, yang menjadi pangkalan ekspor Indonesia, menurut data BPS Januari-Mei 2021 terbesar berasal dari Jawa Barat dengan nilai 13,27 miliar dolar (15,80 persen), diikuti Jawa Timur 9,16 miliar dolar (10,91 persen) dan Riau 7,83 miliar dolar (9,32 persen).

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada periode yang sama mencapai 83,99 miliar dolar atau naik 30,58 persen (YoY). Demikian juga ekspor nonmigas mencapai 79,44 miliar dolar atau naik 30,31 persen. Penurunan terbesar terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar 272 juta dolar (34,33 persen), sedangkan nilai ekspor nonmigas Mei 2021 tercatat sebesar 15,66 miliar dolar, turun 10,67 persen

dibandingkan dengan angka April 2021 (MoM). Namun, naik 58,3 persen (YoY) dibandingkan dengan ekspor nonmigas pada Mei 2020.

Nah, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi juga menyoroti surplus perdagangan bulan Mei 2021 dari nonmigas sebesar 3,49 miliar dolar dan defisit neraca migas 1,13 miliar dolar. Ia juga menyebut, negara mitra dagang penyumbang utama surplus yaitu Amerika Serikat, Filipina, dan India dengan kontribusi sebesar 1,72 miliar dolar.

Di sisi lain, transaksi perdagangan

Kamis, 17 Juni 2021.

Kinerja ekspor Indonesia pada Mei 2021 tercatat sebesar 16,60 miliar dolar. Nilai ini naik 58,76 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY), namun turun 10,25 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (MoM). Penurunan tersebut disebabkan turunnya ekspor migas sebesar 2,68 persen dan nonmigas sebesar 10,67 persen.

"Jika melihat data perkembangan kinerja ekspor tahun-tahun sebelumnya, kinerja ekspor di bulan Ramadan dan Lebaran selalu mengalami penurunan

sektor menunjukkan kenaikan ekspor. Sektor pertambangan naik sebesar 95,37 persen, sektor migas naik 66,99 persen, industri pengolahan naik 54,02 persen, dan sektor pertanian naik 0,69 persen, kata Mendag.

Ekspor nonmigas, lanjut Mendag, naik signifikan secara tahunan bukan hanya disebabkan low base effect dari pertumbuhan rendah pada 2020. Kenaikan itu juga ditopang membaiknya harga komoditas ekspor serta mulai membaiknya pertumbuhan perekonomian dunia.

Beberapa komoditas utama ekspor



Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

dengan Tiongkok, Australia, dan Singapura berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan sebesar 1,09 miliar dolar. "Secara kumulatif neraca perdagangan Januari-Mei 2021 surplus 10,17 miliar dolar dan melampaui surplus perdagangan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,18 miliar dolar. Surplus perdagangan Januari-Mei 2021 merupakan surplus perdagangan awal tahun terbesar selama 10 tahun terakhir atau sejak 2012," ungkap Mendag Lutfi,

dan hal tersebut merupakan pola musiman yang wajar. Hal ini akibat adanya hari libur pada bulan tersebut," ujar Mendag Lutfi.

Ia mengungkapkan, pada Mei 2021 kinerja ekspor untuk sektor pertambangan meningkat sebesar 14,29 persen (MoM). Namun, terjadi penurunan di sektor Industri pengolahan sebesar 14,02 persen (MoM) dan pertanian sebesar 30,06 persen (MoM).

Meskipun mengalami penurunan secara bulanan, secara tahunan semua

nonmigas Indonesia yang tumbuh cukup tinggi secara bulanan (MoM) pada Mei 2021, antara lain produk besi baja HS 73 naik 13,92 persen, bahan bakar mineral HS 27 (13,91 persen) tembaga dan produknya HS 74 (9,88 persen), berbagai produk kimia HS 38 (0,55 persen), serta minyak kelapa sawit dan turunannya HS 15 (0,43 persen).

Sementara komoditas/produk yang ekspornya menurun secara bulanan (MoM) pada Mei 2021, yaitu kendaraan

& bagiannya HS 87 turun 34,33 persen, berbagai makanan olahan HS 21 (31,81 persen), karet dan barang dari karet HS 40 (29,17 persen), alas kaki HS 64 (28,91 persen), serta olahan daging dan ikan HS 16 (28,05 persen).

Pada periode Mei 2021, ekspor ke beberapa kawasan tumbuh positif dan cukup signifikan, antara lain ke Karibia 62,83 persen, dan kawasan Eropa Selatan 28,69 persen. "Meningkatnya ekspor nonmigas ke beberapa kawasan menunjukkan mulai pulihnya permintaan negara-negara berkembang yang terdapat di kawasan tersebut. Namun, kasus Covid-19 yang kembali melonjak di beberapa kawasan menyebabkan kinerja ekspor ke beberapa kawasan mengalami koreksi, seperti di kawasan Asia Tengah turun 51,66 persen, Asia Selatan turun 19,70 persen, dan Eropa Tengah turun 17,04 persen," sambung Mendag.

Secara kumulatif, kinerja ekspor periode Januari-Mei 2021 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 30,58 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ditunjukkan oleh kelompok produk bijih, terak, dan abu logam HS 26 dengan peningkatan sebesar 195,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian, besi dan baja HS 72 (76,62 persen), berbagai produk kimia HS 38 (72,20 persen), timah dan barang daripadanya HS 80 (61,47 persen), lemak dan minyak hewan/nabati HS 15 (59,08 persen), serta ampas/sisa industri makanan HS 23 (54,96 persen).

Pada sisi impor, kinerja Mei 2021 menunjukkan angkanya mencapai 14,23 miliar dolar, turun 12,16 persen dari bulan sebelumnya. Namun, angka itu naik 68,68 persen secara tahunan. Penurunan dipicu turunnya impor nonmigas sebesar 14,16 persen (MoM) sedangkan migas naik tipis 1,90 persen (MoM).

Penurunan impor terbesar berasal dari impor logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) dengan nilai impor sebesar USD 0,11 miliar atau turun 58,61 persen dari bulan sebelumnya, gula & kembang gula HS 17 USD 0,21 miliar (35,73 persen), biji dan buah mengandung minyak HS 12 USD 0,17 miliar (31,18 persen), sari bahan samak dan celup HS 32 USD 0,12 miliar (26,20

persen); serta perangkat optik, fotografi, sinematografi HS 90 USD 0,18 miliar (25,41 persen).

Sementara produk impor nonmigas yang mengalami kenaikan terbesar antara lain bijih terak dan abu logam (HS 26) naik 144,29 persen, buah-buahan (HS 08) 11,61 persen, bubur dari kayu (HS 47) 6,39 persen; produk farmasi (HS 30) 5,94 persen; serta kain rajutan (HS 60) 5,72 persen.

Struktur impor Indonesia berdasarkan kelompok penggunaan barang pada Mei 2021 terdiri atas 76,88 persen bahan baku/penolong, 13,25 persen barang modal, dan 9,87 persen barang konsumsi. Penurunan nilai total

nesia pada Mei 2021 sebagaimana ditunjukkan dengan angka Purchasing Managers Index (PMI) sebesar 55,3 tertinggi dalam tiga bulan terakhir," kata Mendag.

Meski begitu, Kepala BPS Suhariyanto mengingatkan, neraca perdagangan yang surplus itu perlu imbalan penanganan Covid-19 yang lebih seksama. Indonesia, kata dia, perlu tetap waspada mengingat masih terdapat risiko terbesar yang membayangi yakni pandemi Covid-19.

"Kita melihat tren jumlah yang terkena kasus Covid-19 selama seminggu terakhir ini meningkat. Juga di India tren pandeminya agak merajalela, se-



Kepala BPS Suhariyanto.

impor Mei 2021 sebesar 12,16 persen disebabkan turunnya impor di semua golongan penggunaan barang. Impor barang modal turun sebesar 14,09 persen, diikuti bahan baku/penolong sebesar 11,60 persen, dan barang konsumsi 13,77 persen, jelas Mendag.

Secara kumulatif, kinerja impor Indonesia pada periode Januari-Mei 2021 menunjukkan peningkatan 22,74 persen dibandingkan periode yang sama 2020. Peningkatan tersebut ditopang impor migas sebesar 34,55 persen dan impor nonmigas sebesar 21,23 persen.

"Naiknya impor Januari-Mei 2021 menunjukkan terjadinya ekspansi industri manufaktur dalam negeri Indo-

hingga itu juga berpengaruh," ujar Suhariyanto pada pertengahan Juni 2021 itu.

Jadi, ia berharap agar program vaksinasi dapat berjalan lancar, dibarengi dengan ketatnya pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga Covid-19 dapat segera menghilang dari Tanah Air. "Dengan begitu akan menumbuhkan kepercayaan diri kepada dunia usaha, sehingga perekonomian dapat kembali pulih," tandas Suhariyanto.

Bagaimana upaya dan hasilnya? Semoga kita dapat melihat yang terbaik bersama-sama. Selamat dari Covid-19 dan ekonomi tumbuh berkesinambungan. ●

MELIHAT NASIB DRONE KOMERSIAL DI INDONESIA

Bahkan di negara Afrika seperti Rwanda, pengiriman kargo menggunakan pesawat tanpa awak (drone) sudah berlangsung sejak 2016. Kabar baru, Malawi menggunakan drone serupa untuk mengirim perlengkapan medis menghadapi pandemi Covid-19 di sana.

Pandemi Covid-19 mendorong upaya baru oleh Kementerian Kesehatan di seluruh dunia untuk memperkuat rantai pasokan kesehatan lokal dan dengan cepat mendistribusikan pasokan medis dan alat pelindung diri (APD). Di Malawi, sebuah negara Afrika yang dekat dengan Madagaskar dan Tanzania, perusahaan logistik aeromedis Australia Swoop Aero melipatgandakan armada pesawat tak berawak Malawi menyusul peningkatan pesat dalam pemanfaatan jaringan untuk mendukung ekspansi lanjutan di selatan negara itu.

Jaringan Swoop Aero menyediakan akses yang lebih baik ke pasokan kesehatan penting bagi lebih dari 650.000 orang di distrik Nsanje dan Chikwawa di Malawi Selatan. Layanan ini terus meningkatkan akses ke layanan kesehatan dengan membangun rantai pasokan kesehatan yang sesuai permintaan, lincah, dan responsif.

Sebelumnya, sejak 2016, Zipline, yang ini perusahaan Amerika Serikat, memulai kemitraan mereka dengan pemerintah Rwanda untuk membangun dan mengoperasikan pusat distribusi medis di Muhanga. Rwanda,

yang memiliki geografi pegunungan, kondisi jalan yang buruk, dan musim hujan yang panjang. Hingga Mei 2018, mereka telah mengirimkan lebih dari 7.000 unit darah menggunakan drone.

Per Oktober 2020, Zipline telah melakukan lebih dari 70.000 pengiriman medis dengan drone dan memperluas operasi di seluruh Rwanda. Layanannya juga meluas hingga ke dan Ghana.

Untuk yang komersial, tak perlu banyak cerita lagi. Wing yang dikembangkan oleh Google sudah beroperasi sejak 2019. Saking banyaknya permintaan, mulai April 2020, layanan



Wing terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan FedEx, Walgreens, Sugar Magnolia, Mockingbird Café, dan Brugh Coffee dan menyampaikannya ke penerima kiriman.

Selanjutnya, layanan pos resmi Amerika Serikat UPS, yang mendapat izin penerbangan sejak Juni 2019, tercatat menjangkau 3.700 pengiriman dengan drone dalam setahun operasinya, sekitar 10 paket per hari rata-rata.

Bagaimana dengan Indonesia? Pada September 2019 lalu, maskapai Garuda Indonesia menyatakan telah siap untuk mengembangkan bisnis pengiriman kargo udara menggunakan drone.

Perusahaan pelat merah itu sudah beberapa kali mengutarakan rencana itu dalam berbagai kesempatan. Garuda Indonesia bahkan mengaku sudah memilih produk drone yang akan dipakai, yakni buatan pabrik Beihang asal China. Drone itu disebutkan bisa mengangkut kargo dengan beban total 5 ton.

Nah, pada Juli 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan telah melakukan diskusi

untuk membuat berbagai aturan untuk pengoperasian drone sebagai pengangkut kargo. Balitbang Perhubungan tak mau kecolongan seperti awal kemunculan transportasi online yang berkembang cepat tapi aturannya belum siap.

Belakangan Garuda menunda rencana pemanfaatan drone kargo itu. Toh muncul pula perusahaan swasta yang ingin merealisasikannya. Adalah PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) yang bersiap-siap belakangan ini.

Jaya Trishindo yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan bisnis utama jasa angkutan udara niaga dan penyewaan helikopter ini kabarnya tengah merintis segmen bisnis cargo drone di tahun ini. Direktur Utama HELI Edwin Widjaja mengemukakan, segera mengembangkan bisnis cargo drone pada akhir tahun ini, sekitar November atau Desember 2021.

Dalam bisnis ini, HELI melalui entitas anak PT Komala Indonesia bekerjasama dengan PT Iter Aero Industri selaku manufacture cargo drone. Nantinya, PT Komala Indonesia yang akan meng-

operasikan cargo drone tersebut.

Meski saat ini belum terlalu besar, HELI melihat bisnis cargo drone akan prospektif dalam beberapa tahun ke depan. "Sangat prospektif, karena dapat menjadi alternatif untuk jasa forwarder," ungkap Edwin.

HELI pun menganggarkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 10 miliar pada tahun ini. Sebagian besar digunakan untuk membeli armada cargo drone sebanyak lima unit beserta peralatan penunjangnya. Agar segmen bisnis cargo drone ini memberikan kontribusi pendapatan yang optimal, HELI pun akan agresif untuk menambah armadanya. Pada tahun depan, HELI berencana menambah armada cargo drone hingga 20 unit.

Sejauh ini, jasa yang ditawarkan HELI mencakup transportasi penumpang, kargo, dan bantuan bencana termasuk water bombing. Segmen jasa untuk bantuan bencana berkontribusi hingga sekitar 90 persen terhadap pendapatan HELI. Dengan cakupan wilayah kerja utama yang tersebar di Sumatera,



Kalimantan dan Papua.

Pada tahun lalu, HELI turut terdampak pandemi covid-19. Pembatasan sosial akibat pandemi menurunkan operasional di industri jasa penerbangan. Meski pada akhir tahun permintaan layanan mulai tumbuh, namun belum bisa mengangkat kinerja di level normal sebagaimana tahun 2019.

Namun untuk 2021, Edwin menyampaikan bahwa prospek pemulihan su-

kecolongan seperti awal kemunculan transportasi online yang berkembang cepat tapi aturannya belum siap.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenuh) Novie Riyanto menuturkan, drone tersebut akan bertugas mengangkut kargo mulai dari di kawasan perkotaan, hingga ke Papua. "Kita tahu teknologi pesawat udara ini berkembang terus. Bahkan, ke depan ini, se-

"Kami mengutamakan SDM kita khususnya yang menjalani pengawasan ini mereka selalu tetap update ilmu safety-nya termasuk komunikasi yang sekarang sangat lancar dengan sarana telekomunikasi kita sudah ke seluruh Indonesia, koordinasi pusat dan daerah, kemajuan dari inspektorat-inspektorat kita yang ada di seluruh Indonesia akan mempunyai standar yang sama," tutur Novie.

Yang tercatat telah mendapat izin pengoperasian pesawat tanpa awak komersial di Indonesia adalah perusahaan Jepang Terra Drone. Melalui investasi di PT Terra Drone Indonesia, perusahaan ini sudah mengantongi izin pengoperasian drone jarak jauh, beyond visual line of sight (BVLOS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Kelai-kudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Dengan izin tersebut, Terra Drone Indonesia akan dapat memanfaatkan potensi penggunaan drone secara utuh dan maksimal, terutama untuk misi seperti survei, pengawasan, dan patroli. "Prosedur operasi yang matang dan teruji menjadi kunci dapat diperolehnya izin ini dari otoritas penerbangan sipil di Indonesia. Terra Drone Indonesia terus berkomitmen untuk memperkenalkan manfaat teknologi drone melalui pengoperasian yang aman, serta mendukung pemerintah dalam menjamin keselamatan penerbangan sipil," kata Michael Wishnu Wardana, CEO Terra Drone Indonesia yang mendapat izin operasi drone pada Juli 2020 itu.

Kementerian Perhubungan memiliki aturan terkait drone dalam bentuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 107 yang mengatur tentang small unmanned aircraft system (SUAS) atau sistem pesawat tanpa awak kecil dengan berat maksimal 25 kilogram. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 163 Tahun 2015 yang mengatur sejumlah hal, termasuk batasan-batasan yang harus diikuti pilot drone seperti larangan terbang di atas kerumunan, larangan terbang dalam keadaan mabuk, dan larangan terbang di luar pandangan mata (BVLOS).



dah terasa hingga pertengahan tahun ini. Oleh sebab itu, HELI pun optimistis bisa mengejar pertumbuhan pendapatan hingga tutup tahun ini. "Pendapatan akan tumbuh sekitar 10-20 persen," tandas Edwin.

Bagaimana dengan soal perizinan? Sejak Juli 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan telah melakukan diskusi untuk membuat berbagai aturan untuk pengoperasian drone sebagai pengangkut kargo. Balitbang Perhubungan tak mau

bentar lagi akan ada drone yang akan dioperasikan baik di perkotaan sampai ke Papua sana untuk mengangkut kargo," kata Novie dalam webinar Kemenuh, pertengahan Agustus tahun lalu.

Novie menuturkan, anak buahnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus memantau perkembangan transportasi udara termasuk drone setiap saat. Sehingga, pihaknya bisa menyiapkan aturan keamanan dan pengawasan yang tepat ketika drone beroperasi.

PKPS Bagian 107 disusun dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjamin keselamatan penerbangan sipil, karena drone berbagi ruang dengan pengguna ruang udara lainnya. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu diperhatikan agar dapat menerbangkan drone secara aman.

Terra Drone tercakup dalam regulasi itu. Perusahaan yang berinduk di Jepang ini merupakan penyedia solusi drone industri paling terkemuka di dunia yang didirikan pada 2016.

Kantor pusat perusahaan berlokasi

Indonesia belum siap untuk kargo komersial.

Pada akhir 2020, misalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, masih beberapa langkah lagi hingga sampai ke regulasi drone komersial di Indonesia.

"Beberapa langkah harus dilakukan untuk meningkatkan mitigasi risiko terkait drone," kata Budi dalam webinar internasional bertajuk Regulations and Challenges in Drone Operation yang diselenggarakan Puslitbang Transportasi Udara Balitbang Perhubungan pada 17 Desember 2020.

2015 serta Permenhub Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

Pada peraturan yang ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Juni 2021 itu terdapat sejumlah peraturan yang diganti. Antara lain pengoperasian drone pada ketinggian di atas 120 meter (400 feet) harus memiliki persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Aturan lainnya, melarang drone dit-



di Tokyo, Jepang, dengan 20 cabang di seluruh dunia termasuk Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Amerika Selatan. Terra Drone menyediakan teknologi drone inovatif yang diberdayakan dengan LiDAR dan metode survei fotogrametri untuk sektor konstruksi, utilitas, tambang, energi, dan minyak dan gas. Terra Drone memiliki spesialisasi pada perangkat keras berkinerja tinggi, perangkat lunak mutakhir, dan layanan dan sistem manajemen drone (UTM).

Namun jelas, Terra Drone bukan perusahaan layanan angkutan kargo. Urusan regulasinya pun tampaknya In-

Sedangkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti menjelaskan, pengoperasian drone di negara lain dapat menjadi pembelajaran untuk diterapkan di Indonesia. "Untuk itu, diperlukan pertukaran informasi dari pakar internasional tentang pengembangan operasi dan praktik penggunaan drone," ujarnya.

Sejauh ini, regulasi yang tersedia adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 yang menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Permenhub Nomor 180 Tahun

erbangkan di kawasan dalam radius 5,5 kilometer (3 Nautical Mile) dari titik Helipad yang berlokasi di luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) suatu bandar udara.

Selain itu, pengoperasian drone harus memerhatikan kaidah batas pandang mata atau VLOS (Visual Line of Sight) serta di luar batas pandang mata atau BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). Terkait dengan BVLOS itu, kini berlaku ketentuan baru. Yang jelas, drone dilarang terbang saat malam hari tanpa izin.

Bagaimana dengan drone komersial? Akan lebih rumit lagi tampaknya. •



KETIKA PRESIDEN BERDIALOG DENGAN PARA PENGEMUDI KONTAINER

Kepolisian menindak sejumlah preman dan pelaku pungutan liar di kawasan dan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok di pertengahan Juni 2021. Awalnya adalah dialog Presiden dengan para sopir truk peti kemas (kontainer) di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu pada Kamis, 10 Juni 2021. Berikut petikannya:

Presiden Joko Widodo: Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-bapak semuanya. Saya

mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Para driver mestinya nyaman. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan. Itu yang mau saya kejar, kalau ada. Silakan.

Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer lantas mengacungkan tangan dan menyampaikan keluhan kesahnyanya selama menjadi sopir kontainer. Pria kelahiran Ngawi, 38 tahun silam

ini menjelaskan bahwa para sopir kontainer kerap menjadi sasaran tindak premanisme. Maka, mulailah sejumlah persoalan terbuka di hadapan Presiden Jokowi

Agung:

Mohon izin Pak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang Pak Presiden dan...saya nggak bisa sebutkan untuk mempersingkat waktu mungkin ya...

Kalau Pak Jokowi tadi menyinggung



tentang adanya yang viral-viral itu kan memang ada di NPCT 1 begitu... Nah, ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas Pak. Itu ketika macet itu. Banyak sekali kawan-kawan itu hampir tiap hari, sampai ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas itu. Pada saat macet itu kawan-kawan ini diambil lah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini disebutnya “as-moro” Pak, yang dia ketika macet itu mengambil barang dari kendaraan begitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir begitu preman-premanya, di setiap daerah-daerah rawan begitu, dia naik ke atas mobil Pak.

Jokowi: Ini kan kontainer kan?

Agung: Iya, kontainer betul Pak.

Jokowi: Apa ya bisa dibuka? Barangnya ambilnya dari mana?

Agung: Barang kendaraan maksudnya Pak.

Jokowi: Oh barang kendaraannya?

Agung Kurniawan: Kan dia ada ban serep, kadang aki, kadang juga handphone kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita Pak. Ditodong kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam uang jalan, habis. Nah, sering terjadi itu kalau kawan-kawan dari luar kota itu Pak. Tetapi yang dari ekspor-impor, itu teman-teman yang bawa kontainer, itu sebelum...ya ini sekarang kami sudah ada wadah untuk menyambung silaturahmi, Pak. Kalau dulu itu kan sebelum kita ada wadahnya, teman-teman sopir itu membangun kaya komunitas begitu, nah itu...dulu sesama sopir kontainer itu saling musuh Pak, tidak ada rasa kebersamaan. Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu nggak ada yang berani menolong Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan

semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan....

Jokowi: Sekarang masih ada nggak itu? Tadi kan ngomongnya dulu-dulu. Sekarang masih?

Agung: Masih Pak. Tapi tidak seperti dulu. Sekarang agak terminimalisir Pak. Kalau sekarang kan, kawan-kawan ini sudah saling kenal ini. Kaya saya misalkan sama Bang Hakim ini kan beda daerah, biasanya kan kawan-kawan sopir yang di sini itu kan merantaunya itu kan satu kampung misalnya dari Jawa, ikut ngernet gitu, nanti sudah bisa menyopir, bekerja diangkat oleh bos-nya, nah itu ngumpul di satu perusahaan. Nah, dia tidak akan kenal dengan yang dari perusahaan yang lain. Dan itu juga misalkan Pak Hakim ini dari Medan, gitu, misalkan di kernetnya dari Medan (juga) begitu, nah itu kaya musuh-musuh gitu...

Jokowi: Ini Pak, saya tanya masalah yang berkaitan dengan tadi yang

saya sampaikan, pungutan. Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di NPCT 1, di depo Dwipa, benar nggak?

Agung: Benar Pak. Jadi, makanya ini kan...

Jokowi: Ini pungutan apa itu?

Agung: Saya mau urai, rangkaikan semua gitu. Tapi kalau ada kawan-kawan

saya adalah Abdul Hakim Sitompul, panggilan sehari-harinya Hakim Pak. Tadi kata Bapak mengenai depo, ya Pak. Itu meminta imbalan lah, kalau nggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa terus MPP, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon sama Depo Purinar, agak bersih sedikit. Lain-



yang mau menyampaikan, Bang Hakim, monggo.

Abdul Hakim Sitompul, Sopir Truk Kontainer:

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan nama saya Bapak, nama

nya hampir rata-rata ada pungli, Pak.

Jokowi: Punglinya itu siapa yang mungli?

Hakim: Dari...karyawannya, Pak. Jadi contoh, Pak. Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah atau pun mau ambil (dalam keadaan) kosongan. Nah, kita

laporan, kan. Diambil lah. Itu...harus ada uang tip, ia bilang "boleh, ya?" atau lima ribu...paling kadang-kadang lima belas ribu, ada yang dua puluh ribu. Itu, kalau nggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, "yang sana dulu, yang ada duitnya" katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu nggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak.

Nah, kembali tadi, saya jelaskan lagi masalah premanisme di sini. Itu premanisme di sini begini sebenarnya. Seperti dibaca kemarin, Depo Aceh, itulah terjadi namanya premanisme itu. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Seperti contoh kemarin, mungkin Bapak dengar, kemacetan sudah viral, kan. Itu, pada saat itu, namanya premanisme itu naudzubillah min dzalik, sampai itu kalau nggak salah hari itu ada...pada saat itu, Pak mengantre macet itu, Pak di jalan raya, mulai dari pos 8 sampai sini pos 9, sampai ke macetnya sampai sana. Mulai arah dari utara atau pun dari Cakung, macet lagi. Nah, di situlah kejadian itu namanya premanisme itu, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya, kami. Karena kami, Pak sakit hati sebenarnya, Pak kalau dibilang sakit hati. Saya kira begitu.... Begitu Pak kira-kira, Pak. Ya, kurang-lebihnya mungkin dari teman-teman atau pun dari kawan-kawan kita mau ngomong lagi, nih.

Nuratmo Angga Setiawan, Sopir Truk Kontainer:

Izin, Bapak Presiden. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Pak Presiden yang saya hormati. Perkenalkan saya Nuratmo... Jadi ini kedua kalinya saya ketemu Bapak Presiden. Yang pertama tahun 2019, waktu itu saya dipanggil ke Istana, waktu itu saya jadi sopir awak mobil tangki Pertamina, Pak. Mungkin Pak Presiden masih ingat. Lha teman saya bilang, "Kasus kamu yang di Pertamina sudah selesai, belum?", "Belum selesai", "Ya sudah, mumpung sekalian nanti bisa disampaikan ke Pak Presiden bahwa persoalan saya belum selesai".

Jadi, persoalan saya yang dulu di Pertamina itu belum selesai, belum dikasih apa-apa, pesangon atau apa pun, sama sekali belum. Yang kurang-lebih 1.000 orang itu. Saya berharap ini...saya berharap banget lah ini bisa ditindaklanjuti secepatnya.

Lha terkait saya ngomongin masalah kemacetan, karena saya dari tahun '97 memang di kontainer. Saya masuk Pertamina tahun 2010. Berharap setelah masuk Pertamina itu ada kebaikan lah, ada jenjang yang lebih baik ternyata juga sama, sama saja. Di-PHK juga nggak dapat pesangon. Jadi terkait kemacetan memang benar, tadi Depo Fortune. Ini Depo Fortune kalau di kelompok sopir ini kategorinya depo laknat...

Mendengar aneka keluhan itu, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris untuk menghubungkan sambungan telepon dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Maka berlangsung pula dialog Presiden Jokowi yang berada di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan Kapolri

Jokowi: Pak Kapolri? Selamat pagi.

Kapolri Sigit: Siap. Selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon dikutip dari Sekretariat Presiden.

Jokowi: Iya, saya ini di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar (pungli) di Fortune, di NPCT 1, kemudian di depo Dwipa, pertama itu.

Kapolri: Siap....

Jokowi: Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Pak Kapolri.

Kapolri: Siap Bapak,,,

Jokowi: Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, oke, nggak apa-apa. Oke, itu saja. Terima kasih.

Usai pembicaraan telepon dengan Kapolri, Nuratmo masih menyambung

penuturannya. Usai itu Presiden Jokowi pun menanggapi.

Jokowi: Nggih, saya kira sudah... saya sudah nangkap semuanya apa yang diinginkan oleh Bapak-bapak semuanya. Tadi juga sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan. Nanti pasti akan melapor ke



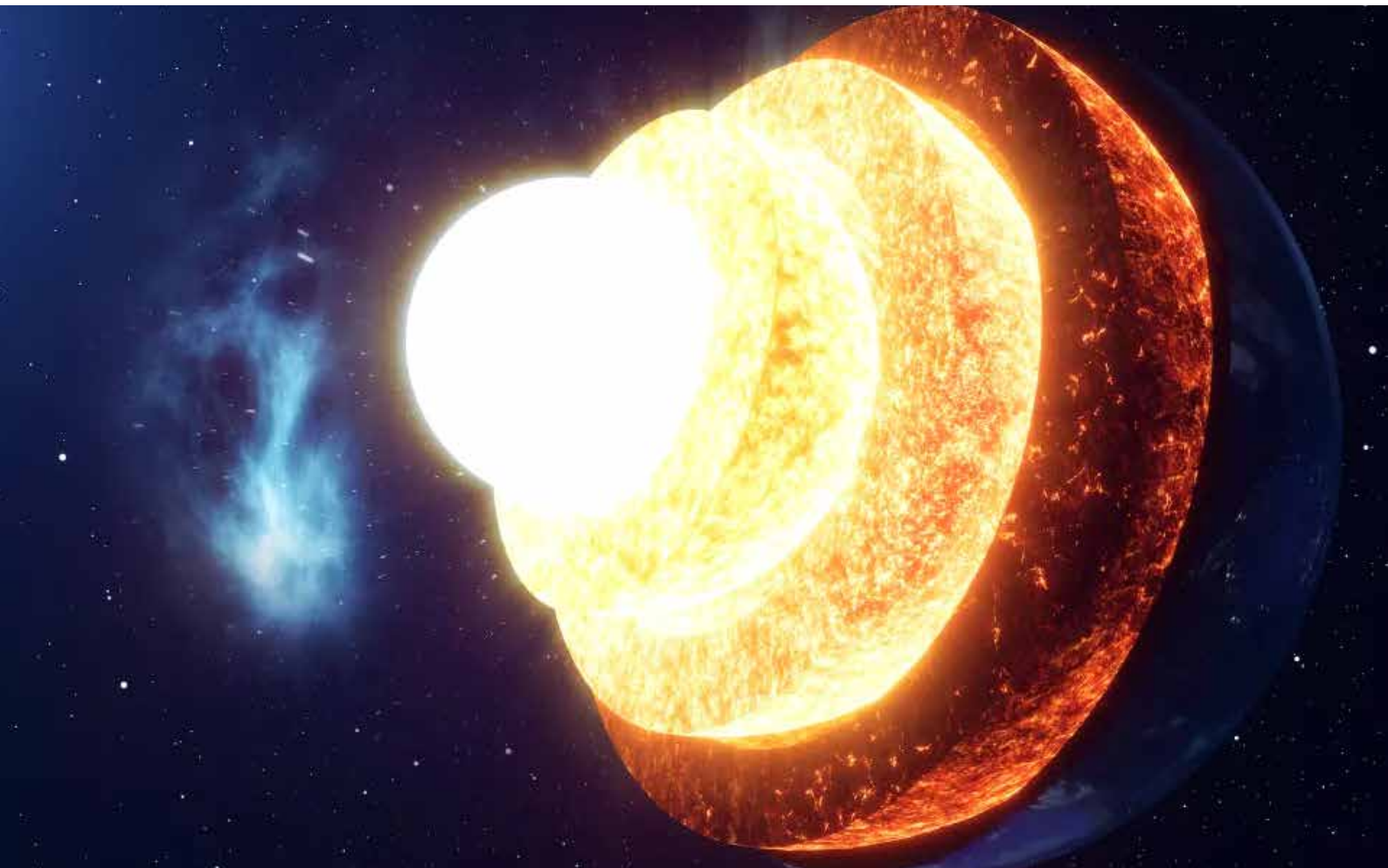
saya. Di sini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro Jaya tapi saya nggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas. Dan, bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti ini, proses ini. Nah, kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit dan masih kena

preman, masih kena pungli, itu yang...itu yang saya baca di status, di media sosial. Yang saya lihat... keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya (sampaikan) terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Nanti coba saya...prosesnya ini

akan saya ikuti. Nanti saya akan cek ke Bapak-bapak tadi yang menyampaikan apakah ada...sudah terjadi perbaikan atau belum. Kalau ndak, nanti saya undang lagi di lain waktu. Nggih. Terima kasih.

Karena saya masih ada acara yang lain, saya tutup. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.●



SESEKALI MENGENALI PERUT BUMI

Begitu banyak kajian tentang luar angkasa di atas sana. Bagaimana dengan kajian yang menembus bumi? Indonesia adalah salah satu titik penting tempat inti bumi berlokasi di sisi timur, dengan sisi barat berada di perut bumi kawasan Amerika Selatan.

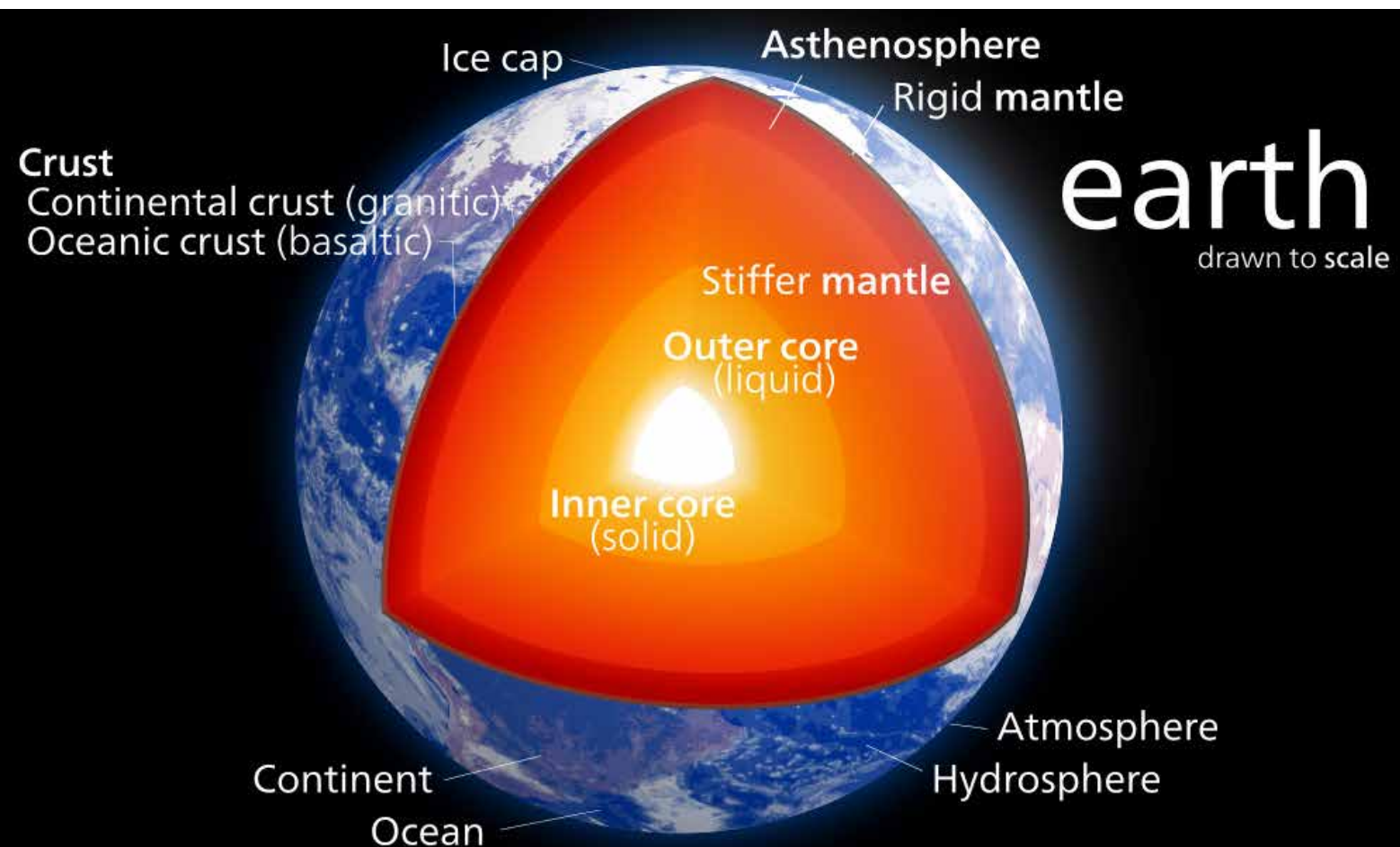
Pada 1997, peneliti inti bumi asal Jepang, Satoru Tanaka dan Hiroyuki Hamaguchi menyimpulkan, berdasarkan data seismik, bahwa anisotropi (ragam arah dinamika) bahan atau material inti dalam (inner core) bumi, berorientasi utara-selatan, namun lebih menonjol di belahan "timur" (kira-kira di bawah Kalimantan) daripada di belahan bumi "barat" (kira-kira di bawah Kolombia)

yang berada di utara Khatulistiwa.

Namun, penelitian terbaru menunjukkan, inti bumi di sisi timur berada di bawah kawasan Laut Banda, di selatan Khatulistiwa dan lebih timur dari Kalimantan. Sedangkan sisi baratnya berlokasi di bawah wilayah Brasil. Satu hal yang tak berubah, inti bumi bagian barat atau timur senantiasa berdekatan dengan garis khatulistiwa, lingkaran terluar permukaan bumi.

Menurut temuan seismolog di University of California di Berkeley, Amerika Serikat, inti besi padat di tengah planet telah tumbuh lebih cepat di bawah Laut Banda di Indonesia. Hal ini membuat suhu planet di bawah Indonesia lebih dingin dibandingkan dengan di Amerika Latin.

Pertumbuhan di satu sisi logam cair adalah produk dari kristal besi yang terbentuk saat besi cair mendingin, tetapi



sesuatu di inti luar bumi atau mantel di bawah negara Asia selatan khatulistiwa ini mengeluarkan panas pada tingkat yang lebih cepat daripada di sisi yang berlawanan, di bawah Brasil.

Itu artinya, inti bumi di bawah Indonesia kehilangan panas lebih cepat daripada yang berada di bawah Brasil. Implikasinya, menurut laporan media Independent, semakin cepat pendinginan, kian lekas pula kristalisasi besi terjadi sehingga semakin cepat juga pertumbuhannya.

Perbedaan seperti itu memiliki implikasi signifikan terhadap medan magnet bumi, dan arus konveksi di inti yang menghasilkan medan. Hal inilah yang melindungi kita dari partikel matahari yang berbahaya.

"Kami memberikan batasan yang agak longgar pada usia inti dalam yakni antara setengah miliar dan 1,5 miliar tahun - yang dapat membantu dalam perdebatan tentang bagaimana medan magnet dihasilkan sebelum keberadaan inti dalam yang solid," kata

Barbara Romanowicz, Profesor UC Berkeley dari Sekolah Pascasarjana di Departemen Ilmu Bumi dan Planet dan direktur emeritus Laboratorium Seismologi Berkeley.

"Kita tahu medan magnet sudah ada tiga miliar tahun yang lalu, jadi proses lain pasti telah mendorong konveksi di inti luar pada waktu itu," ungkapnya.

Pertumbuhan asimetris pada inti bumi bagian dalam itu, bukan berarti ada kecacatan atau berisiko, sehingga menjadikannya tidak seimbang. Rata-rata, jari-jari inti bumi bagian dalam tumbuh merata sekitar 1 milimeter setiap tahun. Gravitasi mengoreksi pertumbuhan condong (lopsided) di timur dengan mendorong kristal baru ke arah barat.

Lalu apa penyebab inti bumi tumbuh timpang atau lebih menonjol di bagian timur? Penulis utama studi Daniel Frost, seismolog di University of California, Berkeley, Amerika Serikat menjelaskan, setiap lapisan bumi dikendalikan oleh apa yang ada di

atasnya, dan mempengaruhi apa yang ada di bawahnya.

Toh pertumbuhan inti yang asimetris atau tak merata memang menjawab misteri yang telah dicari jawabannya oleh para ilmuwan untuk dipecahkan selama 30 tahun: Mengapa inti besi yang mengkristal tampak lebih selaras di sepanjang sumbu rotasi bumi di barat daripada di timur?

Jawabannya, gelombang seismik bergerak lebih cepat ke arah kutub utara-selatan daripada di sepanjang khatulistiwa, karena asimetri kristal besi, dan inilah yang membuat perbedaan pertumbuhan. "Model paling sederhana tampak agak tidak biasa - bahwa inti bagian dalam asimetris. Sisi barat terlihat berbeda dari sisi timur sampai ke tengah, tidak hanya di bagian atas inti dalam, seperti yang dikatakan beberapa orang. Satu-satunya cara kami dapat menjelaskannya adalah di satu sisi tumbuh lebih cepat dari yang lain," kata Frost.

Jadi, gelombang seismik terse-

but bergerak melalui inti bumi secara signifikan lebih cepat saat bergerak di antara kutub utara dan selatan, dibandingkan dengan ketika mereka bergerak melintasi khatulistiwa. Para peneliti telah mengetahui perbedaan pergerakan gelombang seismik tersebut selama beberapa dekade, yang dikenal sebagai anisotropi seismik.

dengan kristal besi yang baru terbentuk lebih cepat di sisi timur inti daripada di sisi barat. "Pergerakan besi cair di inti bumi bagian luar membawa panas menjauh dari inti dalam, menyebabkannya membeku," kata penulis utama studi Daniel Frost, seismolog di University of California, Berkeley, Amerika Serikat.

dalam tumbuh merata sekitar satu milimeter setiap tahun.

Gravitasi mengoreksi pertumbuhan miring di timur dengan mendorong kristal baru ke arah barat. Di sana, kristal menggumpal menjadi struktur kisi yang membentang di sepanjang sumbu utara-selatan inti.

Menurut pemodelan dari studi



Akan tetapi, para ilmuwan ini tidak dapat memberikan penjelasan yang konsisten dengan data yang tersedia.

Di masa kini, dengan menggunakan simulasi komputer dari pertumbuhan inti bumi selama miliaran tahun terakhir, tampaknya menawarkan solusi. Studi baru ini telah dipublikasikan di jurnal *Nature Geoscience* edisi 3 Juni 2021 lalu.

Setiap tahun, sedikit demi sedikit, inti bumi tumbuh dalam pola condong,

"Jadi ini berarti inti luar telah mengambil lebih banyak panas dari sisi timur (di bawah Indonesia) daripada barat (di bawah Brasil)," sambung Frost. Artinya, inti bumi di bawah Indonesia kehilangan panas lebih cepat daripada yang berada di bawah Brasil.

Pertumbuhan asimetris inti bumi bagian dalam itu, kata peneliti, bukan berarti ada kecacatan atau berisiko, sehingga menjadikannya tidak seimbang. Rata-rata, jari-jari inti bumi bagian

tersebut, struktur kristal ini, sejajar dengan kutub bumi, adalah jalan raya super seismik yang memungkinkan gelombang gempa bergerak lebih cepat ke arah itu. "Inti bagian dalam perlahan membeku dari inti luar yang cair, seperti bola salju yang menambahkan lebih banyak lapisan. Kemudian inti luar didinginkan oleh mantel bumi di atasnya," jelas Frost.

Lempeng tektonik sebagian bisa menjadi penyebab fenomena ini. Frost

menjelaskan saat lempeng tektonik dingin menyelam jauh di bawah permukaan bumi di zona subduksi, mereka mendinginkan mantel di bawahnya.

Namun, kata Frost, apakah pendinginan di mantel bumi dapat berdampak pada inti dalam, hal itu masih menjadi perdebatan. Misteri ini masih membingungkan para ilmuwan. Sama



membangungkannya apakah pendinginan miring di inti bumi dapat mempengaruhi medan magnet bumi atau tidak.

Medan magnet modern ditenagai oleh pergerakan besi cair di inti luar bumi. Gerakan cairan ini ditenagai oleh panas yang hilang dari inti dalam. Jika inti bumi bagian dalam kehilangan lebih banyak panas di timur daripada di barat, maka inti luar akan bergerak lebih banyak ke timur juga, jelas Frost.

"Pertanyaannya adalah, apakah ini mengubah kekuatan medan magnet?" lanjut Frost. Ini adalah pertanyaan besar yang berada di luar makalah studi baru ini. Kendati demikian, Frost mengatakan bahwa dia telah mulai mengerjakan penelitian baru dengan tim geomagnetis untuk menyelidiki beberapa kemungkinan dari misteri pertumbuhan inti bumi yang condong lebih cepat di bagian timur.

Mengutip IFL Science, ada banyak hal yang tidak manusia pahami tentang apa yang terjadi beberapa ribu kilometer di bawah pijakan kaki. Yang diketahui sejak lama adalah bumi memiliki inti dalam yang padat, telah mengkristal setidaknya selama 500 juta tahun, tetapi mungkin lebih lama dari itu. Kristalisasi ini melepaskan panas, menjaga inti luar tetap cair. Gerakan inti luar menghasilkan medan magnet, melindungi kita dari radiasi kosmik.

Namun, kristalisasi inti bagian dalam tampaknya tidak seragam. Dengan mempelajari gerakan beberapa gelombang seismik yang dapat merambat melalui inti dalam, para ilmuwan memperhatikan bahwa beberapa bagian lebih baik dalam membuat gelombang melewatinya lebih cepat.

Untuk menjelaskan hal ini, model baru menunjukkan bahwa inti bumi tumbuh lebih cepat di satu sisi (di bawah Indonesia) daripada di sisi lain (di bawah Brasil) sekitar 60 persen. "Model paling sederhana tampak agak tidak biasa - bahwa inti bagian dalam asimetris," kata Frost.

Hasil penelitian terbaru ini merupakan sebenarnya merupakan koreksi dari studi Frost dan Romanowicz pada 2017 lalu. Saat itu temuan mereka menyebutkan, anisotropi inti bumi yang condong lebih kuat di bagian timur tidaklah terlalu signifikan.

Apapun, pemahaman tentang isi perut bumi telah mengalami perkembangan dan kemajuan sejak ahli seismologi Denmark Inge Lehmann menemukan keberadaan inti dalam padat di perut bumi yang berbeda dari intinya yang cair. Temuan pada 1936 itu berasal dari kajian terhadap seismogram dari gempa bumi di Selandia Baru.

Lehmann mengamati bahwa gelombang seismik memantul dari batas inti dalam dan dapat dideteksi oleh seismograf sensitif di permukaan bumi. Dia menyimpulkan radius 1.400 km untuk inti dalam, tidak terlalu melreset dari angka yang diterima saat ini, yakni 1.221 km.

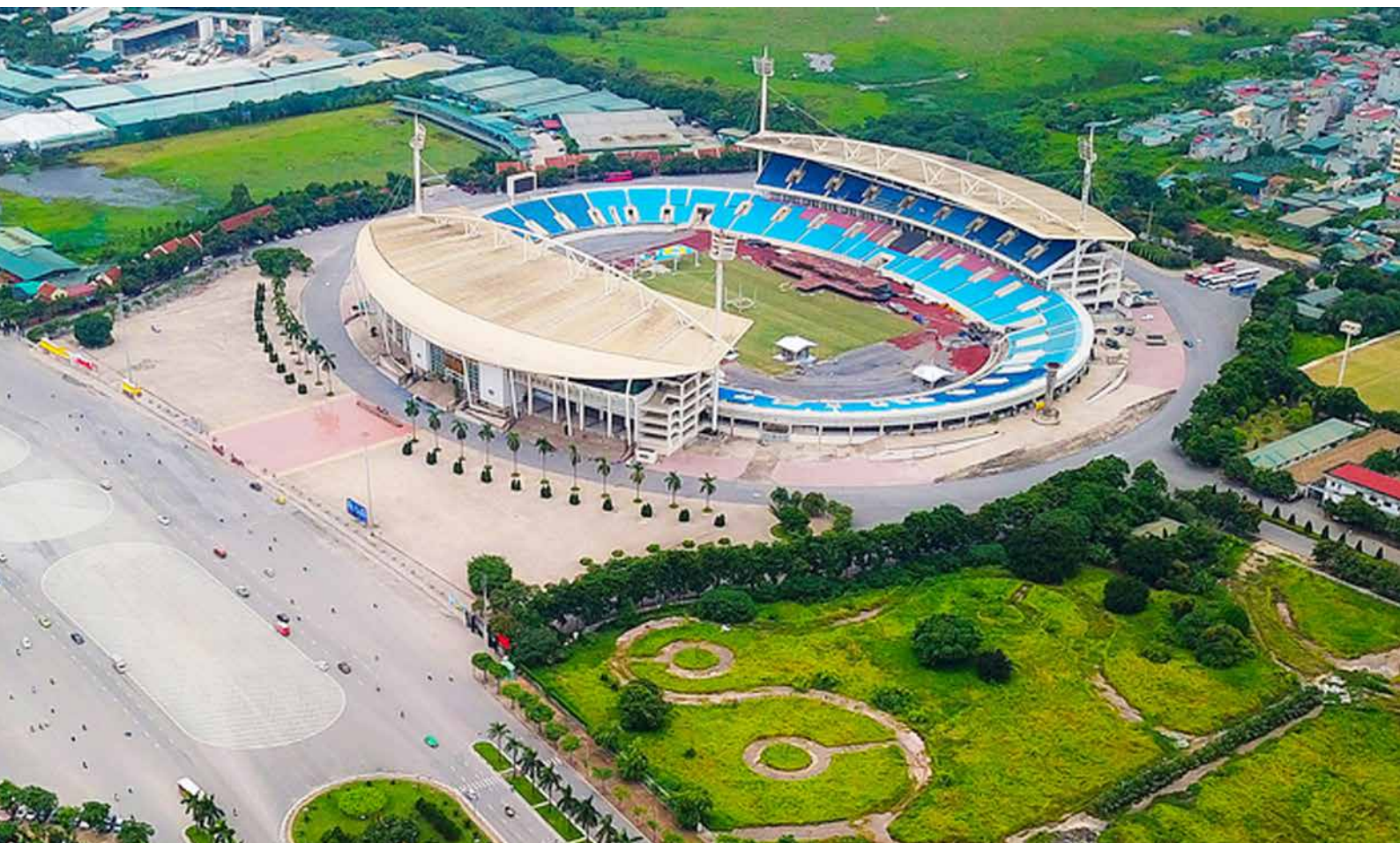
Dua tahun setelah studi Lehmann, Beno Gutenberg dan Charles Francis Richter dari Amerika Serikat menganalisis kumpulan data yang lebih luas. Alhasil, Gutenberg dan Richter memperkirakan ketebalan inti luar memiliki radius 1950 km dengan transisi setebal 300 km yang curam tetapi terus menerus ke inti dalam; menyiratkan radius antara 1.230 dan 1.530 km untuk inti dalam.

Selanjutnya, pada 1940, dihipotesiskan bahwa inti dalam perut bumi terbuat dari besi padat. Sedangkan pada 1952, Francis Birch menerbitkan analisis rinci dari data yang tersedia dan menyimpulkan bahwa inti bagian dalam mungkin besi kristal.

Perkembangan berikutnya, banyak ilmuwan memperkirakan bahwa inti dalam bumi bersifat homogen, karena proses yang sama seharusnya berjalan secara seragam selama seluruh pembentukannya. Bahkan muncul anggapan bahwa inti bagian dalam bumi mungkin berupa kristal besi tunggal. Namun, ilmu pengetahuan tentang perut bumi berkembang terus.

Dziewonski dan Gilbert menyimpulkan bahwa pengukuran mode normal getaran bumi yang disebabkan oleh gempa besar konsisten dengan inti luar yang cair. Sedangkan dinamika gelombang yang melintas di inti dalam perut bumi baru diterima komunitas ilmuwan pada 2005 lalu.

Sementara penelitian ruang angkasa mengarah kepada kemungkinan manusia hidup di planet lain, juga kemungkinan temuan makhluk lain di sana, lantas apa hikmah perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perut bumi? Melihat para ahli yang berasal dari kalangan ahli gempa, sangat boleh jadi kajian-kajian tentang perut bumi akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang prediksi maupun mitigasi bencana alam. Wallahu'alam. ●



SEA GAMES 2021 DI VIETNAM (JUGA) TERANCAM RUNYAM

Pandemi Covid-19 menambah satu lagi ajang olahraga antarnegara terancam runyam: Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau Southeast Asian Games 2021 di Vietnam. Ada juga yang menolak penundaan.

Sementara bayang-bayang suram masih menyelimuti rencana penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2021, Vietnam berencana menunda penyelenggaraan SEA Games 2021 yang terdjadwal akan berlangsung pada 21 November-2 Desember 2021. Apalagi jika bukan pandemi Covid-19 yang memicunya.

Dalam pernyataan resmi, Vietnam berencana menjadwalkan ulang SEA Games 2021 menjadi Juli 2022. "Komite Olimpiade Vietnam, tuan ru-

mah SEA Games ke-31, telah mengirim surat ke negara-negara yang berisi informasi tentang proposal untuk menunda SEA Games ke-31 hingga Juli 2022 karena situasi rumit pandemi COVID-19," ungkap pernyataan resmi tuan rumah SEA Games 2021 pada Rabu, 9 Juni 2021.

"Karena meningkatnya jumlah kasus Covid-19, maka menjadi keinginan Panitia Penyelenggara Vietnam untuk menjadi tuan rumah SEA Games edisi ke-31 dengan cara yang aman dan terjamin," sambung pernyataan itu

Toh delapan dari sebelas negara anggota Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara menolak dengan proposal Vietnam untuk menunda kompetisi itu. Ini terungkap dari hasil pertemuan Federasi SEA Games yang berlangsung menyusul datangnya surat usulan penundaan dari Vietnam.

Sebagian besar negara anggota keberatan dengan penundaan karena jadwal olahraga tahun depan sangat padat. Selain itu, pernyataan itu menyebutkan bahwa telah banyak negara sudah melakukan banyak persiapan



untuk Olimpiade.

Sedangkan Federasi SEA Games (SEAGF) menyatakan akan bekerja sama dengan Panitia Penyelenggara Vietnam hingga akhir Juni 2021 untuk solusi yang akan diajukan ke Dewan Federasi SEA Games dan mendapatkan pengesahan. Secara rinci, sebagaimana laporan ESPN, Presiden Komite Olimpiade Filipina Abraham Tolentino, mengatakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina Singapura, Thailand dan Timor Leste memilih menolak penundaan.

Dua suara yang menolak datang dari Vietnam dan Myanmar, sementara Laos abstain. Tolentino mengatakan dalam laporan itu bahwa keputusan akhir masih ada di Vietnam.

Vietnam menjadi tuan rumah event olahraga dua tahunan yang sudah berlangsung 30 kali dengan tuan rumah terakhir adalah Filipina. Untuk SEA Games ke-31 pada 2021 ini, menurut rencana, akan mempertandingkan 40 cabang olahraga, sebagian besar tercakup pula dalam Olimpiade. Ini

adalah kali kedua bagi Vietnam untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia Tenggara sejak 2003.

Hanoi dan Kota Ho Chi Minh mengajukan diri sebagai tuan rumah secara terpisah. Walaupun Kota Ho Chi Minh lebih disukai menjadi tuan rumah, Hanoi dinilai lebih baik mengingat kondisi infrastruktur yang tersedia. Terlebih Perdana Menteri Vietnam kala itu Nguyen Tan Dung ingin menunda pembangunan fasilitas olahraga baru untuk acara olahraga demi penghematan biaya, usai pengunduran diri Vietnam dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 terkait masalah dana.

Menurut proposal anggaran yang diajukan oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam, Hanoi bersedia mengeluarkan dana hingga 1,7 triliun dong Vietnam (setara 77 juta dolar AS) untuk persiapan dan pelaksanaan acara selama dua-minggu pada akhir November - awal Desember 2021 itu. Sedangkan hak siar, iklan, sponsor dan kontribusi lainnya, dianggarkan mendatangkan pemasu-

kan hanya sekitar. 97 juta dong, setara 4,3 juta dolar AS.

Sedangkan Kota Ho Chi Minh mengalokasikan biaya hingga 7,48 triliun dong, setara 330 juta dolar AS, termasuk 6,6 triliun dong (290 juta dolar AS) untuk peningkatan fasilitas olahraga dan 904 miliar dong (40 juta dolar) biaya pelaksanaan. Tambahan pula 8,2 triliun dong (360 juta dolar AS) untuk pembangunan Kompleks Olahraga Rach Chiec Sports Complex dan Kampung Atlet.

Alhasil, Hanoi diputuskan menjadi tuan rumah. Kemudian Komite Pelaksana Pesta Olahraga Vietnam (SEAGOC) terbentuk pada April 2020 dengan tugas mempersiapkan, mengajukan, dan melaksanakan rencana pelaksanaan acara termasuk di sebelas lokasi lainnya.

Di samping Hanoi sebagai tuan rumah utama, beberapa provinsi tetangga juga akan membantu pelaksanaan acara ini. Kampung atlet tidak akan dibangun, melainkan para atlet akan menghuni hotel yang dekat dengan tempat pelaksanaan acara. Pada rencana awal,

kompleks tenis baru di Pusat Pelatihan dan Pertandingan Hanoi dan Stadion Hàng Day yang baru dipugar akan menjadi tempat pelaksanaan penyisihan grup sepak bola putra.

Namun, kedua proyek ini menghadapi hambatan pengembangan dan tidak dapat selesai tepat waktu.. Maka, tempat pelaksanaan laga tenis diusulkan pindah ke Provinsi Bac Ninh, dan Stadion Viet Tri dipertimbangkan untuk digunakan untuk penyisihan sepak bola putra bersama dengan Stadion Thiên Truong.

menurut data yang dikumpulkan. Vietnam sebenarnya yang relatif berhasil menangani pandemi Covid-19 tahun lalu, namun tahun ini berjuang melawan situasi lebih buruk.

Menurut Bloomberg, saat ini lebih dari 5.600 kasus telah dilaporkan di 39 dari 63 provinsi dan kota sejak akhir April 2021. Kota-kota besar seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh telah menerapkan aturan jaga jarak.

Berbagai media domestik di Vietnam melaporkan bahwa SEA Games berisiko tidak berlangsung sesuai jad-

Wilayah Asia Tenggara memang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 sejak Mei 2021. Indonesia misalnya melaporkan sekitar 1,86 juta kasus dan lebih dari 51.000 kematian. Thailand juga berada dalam cengkeraman gelombang ketiga dan paling mematikan. Sejauh ini telah terjadi 179.886 total infeksi dan 1.269 kematian di Negeri Gajah Putih, sebagaimana laporan Reuters.

Di Malaysia, infeksi Covid-19 sedang dalam tren menurun, tetapi jumlah infeksi harian tetap tinggi. Total kasus menembus 600.000 dalam beberapa hari terakhir, dengan lebih dari



Masalah kini bertambah dengan lonjakan kasus Covid-19 di Vietnam. Meskipun jumlahnya rendah dibandingkan dengan sebagian besar tetangganya di Asia Tenggara, tingkat vaksinasi per kapita Vietnam adalah yang terendah di kawasan tersebut dan di antara yang terendah di Asia, menurut penghitungan AFP. Sedangkan acara SEA Games akan berlangsung di beberapa provinsi yang terkena dampak terburuk COVID-19, termasuk Bac Ninh dan Bac Giang, di timur laut negara tersebut.

Sejak akhir April 2021 Vietnam mencatat penularan Covid-19 hingga mencapai lebih dari 9.500 orang, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Kasus harian baru melebihi 200 pada sebagian besar hari dalam pekan pertama Juni 2021.

Negara ini telah mencatat 55 kematian. Hanya 0,04 persen dari populasinya yang telah divaksinasi penuh,

wal. Laman Vietnam Net, misalnya, melaporkan pemerintah telah meminta kementerian olahraga mengajukan rencana pengunduran penyelenggaraan SEA Games berdasarkan risiko yang ditimbulkan oleh pandemi, sebelum mereka mengambil keputusan tentang apakah SEA Games akan dilanjutkan atau tidak.

Laporan itu juga menyatakan bahwa seorang pemimpin di departemen umum Olahraga mengatakan bahwa, "Sangat sulit menemukan solusi untuk mencegah penyebaran Covid dengan puluhan ribu orang". Setidaknya, menurut dia, ada tiga tantangan yang dihadapi Vietnam jika berkeras menyelenggarakan SEA Games sesuai jadwal, yaitu: Standard atlet yang rendah karena banyak atlet tidak dapat berlatih dengan bebas, kesulitan dalam memasarkan ajang itu, dan mengamankan keselamatan lebih dari 10.000 atlet, ofisial, dan peserta lainnya.

“

Sejak akhir April 2021 Vietnam mencatat penularan Covid-19 hingga mencapai lebih dari 9.500 orang

3.000 orang meninggal karena virus sejak pandemi dimulai tahun lalu.

Namun, penundaan SEA Games 2021 juga akan menimbulkan masalah karena sejumlah negara juga akan berpartisipasi di sejumlah ajang yang sudah dijadwalkan tahun depan seperti Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Cina (Februari), Commonwealth Games di Birmingham, Inggris (July) dan Asian Games di Hangzhou, Cina (September).

Bulan lalu, Vietnam telah menerapkan kebijakan bahwa semua atlet yang berlaga di SEA Games 2021 harus sudah mendapatkan vaksinasi. Dalam sejarahnya, ajang SEA Games yang pertama kali dimulai pada tahun 1959, hanya pernah dibatalkan sekali, yaitu pada tahun 1963, ketika kekacauan politik di Kamboja membuat negara tersebut tidak dapat menyelenggarakan acara dua tahunan itu.

Masih ada upaya agar SEA Games 2021 tak menjadi runyam. Namun, semua kembali kepada tuan rumah Vietnam. ●

INDONESIA TOLAK PENUNDAAN SEA GAMES 2021

Di Rapat Kerja Federasi SEA Games (SEAGF) yang berlangsung secara virtual pada Rabu, 9 Juni 2021, Indonesia menolak usulan penundaan SEA Games 2021 di Vietnam. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari mengemukakan, beberapa hal yang menjadi alasan penolakan itu.

"Kami keberatan jika SEA Games 2021 ditunda ke 2022 karena anggaran SEA Games tahun ini sudah dialokasikan dan harus ada pertanggung jawaban anggarannya. Jika ditunda ke 2022, pengajuan anggaran tahun depan belum ada," kata Okto, nama ringkas Raja Sapta Oktohari. Selain itu, sambungnya, penundaan akan menyebabkan SEA Games berikutnya di Kamboja pada 2023 hanya berselang satu tahun.

Okto menghadiri rapat kerja yang dipimpin oleh Chief Operating Officer SEAGF Datuk Seri Chaiyapak Siriwat. Rapat kerja dibuka dengan penutupan notulen rapat terakhir pada 18 Mei

2021 berlanjut dengan paparan situasi terakhir dari tuan rumah, Vietnam.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan NOC Vietnam menyampaikan keinginan menunda SEA Games ke-31 ini ke pertengahan tahun depan. Vietnam mengusulkan pesta olahraga dua tahunan se-Asia Tenggara ini dilaksanakan pada medio Mei atau Juni 2022. Alasan penundaan memang kasus Covid-19 di Vietnam tengah meningkat.

Namun, tujuh dari 11 negara peserta SEAGF yaitu Indonesia, Brunei, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menolak usulan tersebut. Myanmar setuju penundaan SEA Games 2021. Sedangkan Laos dan Timor Leste mengikuti apa pun keputusan yang ditetapkan SEAGF.

Ketujuh negara yang menolak menilai penundaan SEA Games hingga tahun depan akan menyebabkan kalender multievent olahraga menjadi semakin padat. Jadi, atlet tidak dapat tampil maksimal. Sebagai con-

toh, pada 2022, Indonesia setidaknya bakal mengikuti tiga multievent olahraga, yaitu Asian Indoor Martial Arts Games (AIMAG) Bangkok, Islamic Solidarity Games (ISG) Konya, serta Asian Games Hangzhou.

"Semua atlet, pelatih, hingga official Indonesia sudah divaksin dan masih ada waktu lima bulan lagi untuk merealisasikan SEA Games Hanoi berlangsung tepat waktu. Olimpiade 2020 Tokyo juga masih sesuai jadwal dan kita bisa mengadopsi protokol kesehatan untuk diterapkan saat SEA Games. Jika tuan rumah menghadapi kesulitan, kami rasa semua negara ASEAN tentu akan saling membantu," ujar Okto.

Menanggapi penolakan dari mayoritas negara anggota SEAGF, NOC Vietnam meminta waktu untuk berdiskusi dengan pihak pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya terkait nasib SEA Games. SEAGF memutuskan untuk kembali menggelar rapat lanjutan pada 24 Juni 2021. •





MERINTIS PEMULIHAN WISATA DENGAN PESTA KESENIAN

Bali menghadapi pandemi dengan seni. Jadilah pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 pada 12 Juni 2021 hingga agenda penutupan sebulan kemudian. Semoga tanpa kendala sehingga sukses menjadi rintisan pemulihan pariwisata pulau dewa-dewi ini.

Festival tahunan ini sempat takluk oleh pandemi. Kala itu Gubernur Bali Wayan Koster meniadakan Pesta Kesenian Bali ke-42 pada 2020, padahal jadwal sudah tersebar akan berlangsung pada 13 Juni-11 Juli 2020.

Sekadar kilas balik, Gubernur Koster

memberitahukan para Bupati dan Wali Kota se-Bali tentang pembatalan acara pada awal masa pandemi itu. "Ini memang keputusan yang tidak mudah, Bapak Gubernur setelah berdiskusi dengan bupati/wali kota se-Bali dan Ketua DPRD sepakat meniadakan Pekan Kesenian Bali (PKB) ke-42 tahun

ini," kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali saat itu, I Wayan "Kun" Adnyana di Denpasar, akhir Maret 2020.

Kun Adnyana mengungkapkan beberapa pertimbangan terkait peniadakan PKB ke-42 tahun 2020. Pertama, arahan dan kebijakan Presiden RI Joko



Widodo agar pemerintah dan pemerintah daerah fokus dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Arahan presiden ini didasarkan pada data penyebaran Covid-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia yang belak-kangan semakin meningkat.

"Kondisi ini mendorong seluruh negara termasuk Indonesia melakukan upaya serius dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 dengan men-empuh berbagai kebijakan termasuk 'social/physical distancing' sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucapnya.

Pertimbangan berikutnya adalah pandemi Covid-19 belum bisa dipas-tikan kapan akan berakhir, sehingga secara psikologis kurang kondusif bagi masyarakat. Sementara PKB ke-42 pada 2020 yang akan dilaksanakan pada 13 Juni-11 Juli 2020, sangat dekat dari batas waktu Masa Tanggap Darurat Nasional atas penyebaran Covid-19, yakni 29 Mei 2020.

Situasi ini, lanjut Kun Adnyana, akan berdampak pada tidak optimalnya

segala persiapan. "Dengan memper-timbangkan hal tersebut dan masukan lisan dari bupati/wali kota, Gubernur Wayan Koster menyetujui untuk meni-adakan penyelenggaraan PKB ke-42 tahun ini," ucapnya.

Ia menambahkan, Pesta Kesenian Bali seperti juga pilkada serentak, tentu membutuhkan tahapan latihan, peny-iapan properti dan juga penyeleng-garaan PKB di tingkat kabupaten/kota. "Dengan kondisi seperti ini, daripada tidak maksimal dan terjadi ketidak-pastian, boleh berkumpul atau tidak, sehingga opsi ditiadakan ini menjadi paling tepat," ujarnya.

Selain itu, kata Kun Adnyana, PKB secara historis yang digelar sejak tahun 1978 tersebut, juga berhubun-gan dengan jeda sekolah, sehingga masyarakat termasuk peserta didik dapat maksimal terlibat.

"Sempat diperbincangkan untuk mengundur PKB, tetapi kalau mundur, kan banyak lomba yang melibatkan peserta didik. Mereka juga sudah lama mereka belajar di rumah, jadi agak su-

sah memberikan kelonggaran peserta didik untuk terlibat maksimal, belum lagi kegiatan seni lain yang menunggu di bulan Oktober," ucap pria yang juga akademisi ISI Denpasar itu.

Jika tetap dipaksakan untuk digelar, perwakilan kabupaten/kota juga menyatakan akan mundur. "Ini memang menjadi pertama kalinya PKB ditiadakan, karena pandemi COVID-19. Jadi, banyak even-even' besar yang bergeser," ucapnya.

Untuk pembatalan tahun lalu, Gubernur Koster meminta masyarakat Bali memaklumi keputusan yang diambil dengan berat hati ini. Ia berjanji mengupayakan Pesta Kesenian Bali akan berlangsung lagi pada 2021. "Lebih meriah dari sebelumnya," kata Koster saat itu.

Nah, sejak awal 2021, muncul tagi-han untuk Gubernur Koster. Terutama dari kalangan budayawan. Antara lain dari Prof Dr I Made Bandem.

Ia mengusulkan Pesta Kesenian Bali yang menjadi pesta tahunan terbesar di Pulau Dewata itu tetap digelar pada

2021 ini, meskipun berlangsung di tengah kondisi pandemi COVID-19. "Saya usulkan PKB tetap ada dan dilaksanakan, sekecil apapun itu. Saya rasa ada cara yang baik untuk melaksanakan PKB," kata Prof Bandem di Denpasar, Kamis, 21 Januari 2021.

Pergelaran Pesta Kesenian Bali selama ini berlangsung rutin sejak 1978 hingga yang ke-41 pada 2019. Namun PKB ke-42 pada tahun 2020, pelaksanaannya dibatalkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengantisipasi

diatur sedemikian rupa untuk pementasan kesenian yang termasuk berskala besar, menengah dan kecil. "Misalnya untuk pementasan Sendratari, kalau biasanya dibawa oleh 150-200 orang, kini misalnya dibawa dengan 50-75 orang (penari dan penabuh)," ucapnya.

Demikian juga dari sisi jumlah penonton Sendratari yang biasanya hingga 5.000-6.000 orang di Panggung Terbuka Ardha Candra, kini hanya boleh dengan maksimal 1.000

antara cara atau sistem daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) itu perlu dukungan teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia yang mumpuni. "Selain itu, tantangan bagi para seniman untuk membuat karya seni yang atraktif dan berkualitas agar bisa mendapatkan klik dari penonton yang ingin melihat pertunjukan itu secara daring," ujar pria yang juga mantan Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar itu.

Alhasil, janji Gubernur Koster mengupayakan pertunjukan seni itu terwujud. Pesta Kesenian Bali ke-43 tetap akan meriah karena melibatkan sekitar 10 ribu seniman dari berbagai komunitas dan sekaa (sanggar) unggulan kabupaten/kota se-Bali serta delegasi luar negeri. "Sebanyak 73 mata acara akan dihadirkan selama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) dengan melibatkan 10.000 seniman," kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang kini dijabat oleh I Gede Arya Sugiarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Namun Koster memasang syarat dan ketentuan. "Peserta atau seniman yang berpartisipasi dalam PKB, juga pengunjung, diharapkan disiplin, tertib, dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, agar tidak menimbulkan kluster baru," ujarnya.

Gubernur Koster juga meminta kerja sama semua pihak yang terkait, terutama "leading sector" Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan didukung dinas-dinas lainnya, agar dapat melaksanakan penyelenggaraan PKB dengan sebaik-baiknya, sebagaimana direncanakan dan diharapkan.

PKB ke-43 mengambil tema "Purna Jiwa: Prananing Wana Kerthi (Jiwa Paripurna Napas Pohon Kehidupan)" yang bermakna memuliakan pohon/hutan sebagai simfoni harmoni semesta raya menuju kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Tema ini secara visual direpresentasikan melalui ikon utama pohon Kalpataru yang dapat dimaknai sebagai nafas kehidupan sekaligus pengetahuan utama yang mengajarkan manusia tentang sumber pangan, farmakologi, budaya, ekonomi, industri, bahkan juga spiritual. Pohon diyakini sebagai



atau mencegah penularan COVID-19.

"Saya rasa untuk PKB tahun ini harus tetap dilaksanakan, baik itu secara daring maupun luring, 50:50 kalau dimungkinkan," ucap pria yang juga mantan Rektor ISI Yogyakarta itu.

Menurut dia, untuk pelaksanaan PKB yang berlangsung di tengah pandemi tentunya memang harus

orang dan dengan pengawasan yang ketat. "Kalau untuk kesenian yang skala menengah misalnya Gambuh, saya rasa tidak terlalu masalah dengan jumlah seniman yang dilibatkan," ujar pria yang pada 2019 meraih bintang jasa dari Kaisar Jepang itu.

Prof Bandem memaklumi juga bahwa pertunjukan yang memadukan

RESTU PRESIDEN MENYERTAI

Presiden Joko Widodo merestui penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun ini. Ia pun membuka langsung acara tahunan yang sempat terhalang penyelenggaraannya pada 2020 lantaran pandemi Covid-19 masih mencekam.

"Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas masyarakat Bali tetap tumbuh dan tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia," ujar Presiden di Istana Merdeka, Sabtu, 12 Juni 2021.

Jokowi secara khusus menyoroti tema "Purna Jiwa: Prananing Wana Kerthi" yang berarti bahwa jiwa yang paripurna merupakan napas pohon kehidupan. "Saya juga mengapresiasi pilihan tema yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi, serta hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi," kata Presiden.

Presiden mengatakan, warisan-warisan susastra yang mengingatkan

kan datangnya wabah dan mengajarkan cara untuk mencegah dan beradaptasi perlu dibuka kembali dan dikembangkan untuk diambil pelajaran dan kaitannya terhadap pandemi yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, Kepala Negara menegaskan



bahwa kunci utama dari pemulihan ekonomi Bali ialah kemampuan kita dalam menangani pandemi.

Jadi, kata Presiden, disiplin protokol kesehatan harus terus diterapkan, vaksinasi dilakukan secara cepat dan masif, serta PPKM mikro berbasis banjar dan desa adat di Bali harus diefektifkan untuk mencegah penularan. "Kita tunjukkan pada dunia bahwa Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman untuk dikunjungi," ucapnya.

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, dan seluruh masyarakat Bali yang mampu untuk terus berkarya, mengekspresikan seni, dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terukur.

Semoga pesta seni kali ini dapat ikut menaklukkan pandemi.

Untuk kemudian pariwisata di Bali pulih kembali. •

saudara tertua manusia dalam kehidupan di Bumi.

Pembukaan PKB tahun berlangsung (live) di Gedung Ksiramawa Taman Budaya Provinsi Bali. Presiden Joko Widodo merestui dengan membuka langsung acara ini secara virtual di Istana Merdeka Jakarta pada Sabtu, 12 Juni 2021.

Acara pembukaan diawali penayangan video Peed Aya (pawai) Pratiti Wana Kerthi dan Rekasadana Sendratari "Wreksa Kastuba" garapan ISI Denpasar. "Konsep adiluhung dalam tema PKB akan menjadi pemantik kreativitas berbasis tradisi dan motivasi generasi Bali masa kini untuk selalu mencintai kebudayaan leluhur, membangun karakter, jati diri dan kes-

ejahteraan," ucap Arya yang pernah menjabat Rektor ISI Denpasar itu.

Agenda PKB, tahun ini terdiri atas 43 rekasadana (pergelaran) merujuk pada tahun penyelenggaraannya. Selain itu akan tampil pula tiga jenis utsawa (parade), 13 wimbakara (lomba), dua kandarupa (pameran), enam kegiatan kriyaloka (lokakarya), dan enam topik widyatula (sarasehan).

Masing-masing perwakilan sembilan kabupaten/kota se-Bali akan unjuk kepiawaian dan kebolehan membawakan aneka pertunjukan, antara lain seni klasik gambuh, gambang, wayang wong, gamelan, topeng, dan wayang kulit. Guna mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya nusantara dan negara sahabat, ditampilkan pula,

antara lain pertunjukan seni virtual dari Papua, tari tradisi Paser dari Kalimantan Timur, dan tari klasik India.

Seluruh program dihadirkan secara konvensional dan daring melalui kanal Youtube Disbud Prov Bali serta tayangan langsung maupun siaran di TVRI Bali, Bali TV, dan KOMPAS TV, serta berbagai media sosial terpilih. "Hadirin yang menonton langsung ke lokasi acara sangat terbatas jumlahnya, hanya para seniman beserta rombongan kru dan pelaksana teknis," tandas Arya.

Tapi semoga tetap menjadi rintisan untuk pemulihan wisata Bali. Kita lihat hingga Juli, awal musim puncak wisata Bali yang berlangsung hingga September nanti. •

UPAYA MEMBUKA BALI JULI NANTI

Mudah melihat Pesta Kesenian Bali 2021 sebagai upaya pemulihan pariwisata pulau dewa-dewi ini. Tapi, dapatkah Bali terbuka lagi bagi wisatawan mancanegara sesuai dengan target Juli 2021?

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menempatkan Pesta Kesenian Bali Ke-43 tahun ini sebagai salah satu program “Kharisma Event Nusantara (KEN) 2021” yang meluncur pada April 2021 lalu. KEN 2021 adalah program kementerian yang bertujuan menggerakkan kembali roda perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama di bidang event.

KEN jelas menjadi cara menyesuaikan diri di tengah pandemi berbingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin untuk menjamin rasa nyaman dan menyenangkan para wisatawan. Jadi, program ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama para pelaku event yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Terlebih, ada sekitar 34 juta

masyarakat Tanah Air yang bekerja di sektor pariwisata. Tak mengherankan KEN juga berupaya memantik semangat dan motivasi para penyelenggara event di seluruh Indonesia sampai ke level desa bahwa event selama dilakukan dengan protokol kesehatan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) dan bisa berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menghadirkan geliat ekonomi kembali. Khususnya setelah satu tahun ini event tidak bergerak.

Pada Pesta Kesenian Bali ke-43 pun diterapkan protokol kesehatan CHSE yang ketat. Dimana Panitia, pengisi acara, dan pengunjung melakukan tes swab antigen. Lalu juga melakukan penyemprotan disinfektan di area dan lokasi kegiatan. Selain itu yang terpenting penerapan strategi Penerapan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan,

dan Menjaga Jarak).

Sedangkan CHSE merupakan salah satu dari tiga strategi pemulihan pariwisata secara keseluruhan. Dua strategi lainnya adalah percepatan pelaksanaan vaksinasi dan langkah jangka menengah dan panjang untuk mengaktifkan sektor lain yang terkait dengan pemulihan pariwisata. Strategi jangka menengah dan panjang itu melibatkan diversifikasi kegiatan ekonomi terkait pariwisata, pengembangan infrastruktur transportasi multimoda (darat, laut, udara) serta fasilitas pariwisata. Termasuk destinasi dan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakui Bali merupakan destinasi unggulan dalam menerapkan strategi pemulihan itu. “Kami terus menyiapkan pemulihan



pariwisata di Bali," kata Sandiaga usai bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Jumat, 11 Juni 2021.

Mengenai strategi, Menteri Sandi menjelaskan tiga juta atau sekitar 70 persen penduduk Bali ditargetkan bisa mendapatkan vaksinasi. Jumlah penduduk Bali diketahui sebanyak 4,3 juta orang. "Sesuai dengan arahan Presiden vaksinasi itu harus sudah diselesaikan pada Juli 2021," ujarnya.

Strategi berikutnya adalah pengetahuan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Sandi menyebut Gerakan BISA yang juga bergulir di destinasi wisata di luar Bali. BISA adalah singkatan Bersih, Indah, Sehat dan Aman yang merupakan padanan CHSE ((Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability).

Rupanya CHSE juga menerapkan sertifikasi. "Mulai Juli 2021, kita akan memulai program CHSE dan Bali kita targetkan dua kali lipat dari tahun lalu, menjadi 1.200 destinasi wisata, hotel, dan restoran yang akan tersertifikasi CHSE," kata Menteri Sandi.

Untuk jangka menengah panjang, upayanya berlangsung di dalam dan di luar. Yang di dalam jelas banyak melibatkan warga Bali sebagai tuan rumah. Sedangkan yang keluar termasuk promosi untuk datang ke Bali sebagai etalase destinasi wisata.

Untuk Bali sendiri, pemulihan pariwisata adalah inti perekonomiannya. Sebagai gambaran, sebelum Covid-19 datang, pada 2019, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali mencapai 54 persen. Namun, akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Bali minus hingga 9,3 persen secara kumulatif. Angka itu merupakan kontraksi terdalam yang pernah dialami Bali.

Maka pergelaran Pesta Kesenian Bali Ke-43 Juni-Juli 2021 ini akan menjadi salah satu barometer upaya pemulihan pariwisata Bali dan dapat berdampak langsung bagi daerah lainnya.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kemenparekraf, Rizki Handayani mengemukakan, berdasar arahan dari Menteri Sandi, setiap event KEN 2021 seperti Pesta Kesenian Bali 2021

ini, ada empat poin-poin yang perlu menjadi perhatian. Pertama Localize, mengangkat potensi lokal, otentik dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Kedua, Personalize, memberikan kesan. Ketiga, Customize, dimana target audience dan spesifikasinya harus jelas. Terakhir, Smaller in Size, bentuk kegiatan hybrid dan dukungan promosi diperkuat.

"Dan ke depannya, amanat dari Pak Menteri (Sandiaga Salahuddin Uno), dalam pelaksanaan event ada tiga hal

wisatawan mancanegara pada Juli 2021. Sandiaga mengungkapkan dalam upaya menyiapkan pemulihan pariwisata Bali, pihaknya telah melaksanakan beberapa event, yakni Bali and Beyond Travel dan Arabian Travel Market (ATM) Dubai.

Selain itu, Sandiaga juga terus mengupayakan agar musyawarah nasional (munas) ke-VIII dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar tetap dilaksanakan di Bali, setelah sebelumnya sempat tertunda. "Berkenaan Munas



lain yang harus diperhatikan. Pertama, Relevan. Temanya harus berkaitan dengan kondisi saat ini, seperti kesehatan. Kedua, Digitalize. Bersifat digital dengan teknologi terkini dan dekat dengan milenial. Ketiga, Sustainable. Harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, budaya dan ekonomi," kata Rizki.

Ini terkait dengan target pembukaan kembali Pulau Dewata Bali bagi

Kadin kami terus mengupayakan agar bisa diselenggarakan di Bali, tentunya karena ini merupakan ajang yang sangat strategis bagi dunia usaha. Dan kita juga ingin memperlihatkan kepada wisatawan mancanegara bahwa Bali terus mempersiapkan diri," ungkap Sandi.

Untuk urusan Munas Kadin, agak lain lagi ceritanya. Tapi boleh juga kalau berlangsung di Bali. ●



PARA PESOHOR BERINVESTASI DI KLUB BOLA LOKAL

Pesohor terjun ke bisnis klub sepakbola memang bukan barang baru di liga negara maju. Sebut saja misalnya Elton John, penyanyi Inggris, yang relatif akrab dengan publik Indonesia. Elton John malah pernah maju-mundur sebagai pemilik klub sepak bola favoritnya: Watford.

Di Indonesia, sejumlah pesohor pun terjun langsung dalam industri sepakbola, cabang olahraga yang paling banyak penontonnya, meskipun secara bisnis belakangan ini ikut terdampak oleh wabah penyakit virus corona alias Covid-19. Berikut beberapa antaranya:

ATTA HALILINTAR

Pesohor yang melambung namanya sebagai youtuber, Atta Halilintar, resmi mengakuisisi klub asal Jawa Tengah, PSG Pati. Pada unggahan media sosialnya, Atta memposting nama dan logo baru klub sepak bola

tersebut.

"Bismillah @ahhps.fc. Semoga bisa ikut bangun sepak bola Indonesia! Dan melahirkan pemain-pemain hebat untuk Indonesia! ASHIA! MER-AKYAT!!" tulis Atta Halilintar di akun resminya @attahalilintar, Sabtu, 5 Juni 2021.

Atta memilih klub PSG Pati untuk membangun kembali performanya di lapangan hijau. Suami Aurel Hermansyah ini juga mengubah nama dari PSG Pati menjadi AHHA PS Pati FC. Tak hanya itu, perombakan juga dilakukan dari segi lambang menjadi kuda hitam.

Kabar tersebut membuat ramai kolom komentar. Banyak netizen mendoakan kesuksesannya dalam mengawali langkahnya menjadi pemilik klub sepak bola.

Sebelumnya pesohor bernama lengkap Muhammad Attamimi Halilintar itu terlihat menyambangi Wakil Bupati Pati Saiful Arifin. Pertemuan keduanya membenarkan dugaan mereka melakukan negosiasi.

"Terima kasih sudah meluangkan waktunya @attahalilintar, @putrasiregarr17, @thariqhalilintar sobat muda pecinta bola. Kemarin nonton bareng dengan protokol kesehatan melihat latihan bersama teman-teman @psg_pati dan @borneofc.id di Lapangan Yogyakarta Independen School (31/5)," tulis @massaifularifin, juga Sabtu, 5 Juni 2021

GADING MARTEN

Sehari sebelum Atta Halilintar, muncul pesohor lain yang terjun ke bisnis klub sepakbola: Gading Marten. Ia berinvestasi di klub Liga 3, Persikota Tangerang, Banten.

Kabar Gading Marten yang seka-





rang jadi pemilik klub Liga 3 tersebut diinformasikan Persikota lewat akun Instagram klub, Jumat, 4 Juni 2021. "Selamat bergabung Gading Marten di Persikota Tangerang," tulis unggahan Instagram resmi klub berjudul Bayi Ajaib itu.

"Persikota Tangerang secara resmi telah mencapai kata sepakat dengan salah satu tokoh, artis, pengusaha dan pegiat sepak bola ternama tanah air untuk bersama memajukan Bayi Ajaib lolos ke Liga 2 musim ini."

"Welcome @gadiiing! Gading Marten is Baby Force!" demikian pernyataan Persikota.

Nama Raffi Ahmad sendiri belakangan memang jadi perbincangan hangat pecinta sepak bola dalam negeri. Pasalnya, artis berusia 34 tahu ini baru saja mengakuisisi salah satu klub Indonesia, Cilegon United.

RAFFI AHMAD

Sebelum Atta dan Gading, Raffi Ahmad melalui Rans Entertainment bersama Prestige Motorcars, resmi mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United FC yang lantas berubah nama

paling tidak mewujudkan mimpinya sejak kecil, apa lagi kalau bukan memiliki klub sepak bola. "Kami mengumumkan bahwa ia benar kami, Rans, bersama Prestige, telah mengakuisisi Cilegon FC menjadi Rans Cilegon FC," cetus Raffi Ahmad.

Mengutip salah satu percakapannya bersama Darius Sinathrya di channel YouTube The Sinathrya, Raffi Ahmad mengakui jika pengakuisisian Cilegon United memerlukan dana yang tidak sedikit, bahkan jumlah uang yang dikeluarkan mencapai angka miliar.

Berprofesi sebagai pembawa acara, aktor, produser, pengusaha, dan penyanyi papan atas Indonesia, tak heran jika Raffi Ahmad yang berjudul Sultan Andara ini mampu membeli saham klub sepak bola Tanah Air.

KAESANG PANGAREP

Jika boleh tergolong sebagai pesohor, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang

berada di jajaran pemegang saham besar di klub Persis Solo. Kaesang kini menjabat sebagai Direktur Utama klub yang berlaga di Liga 2 tersebut.

Sejak diumumkan jadi Direktur Utama PT Persis Solo Saestu (PSS), Kaesang menegaskan promosi ke Liga 1 adalah tujuan utama Persis Solo. "Liga 1 harga mati," ucap Kaesang saat memberikan sambutan sebagai petinggi klub di kota kelahirannya itu.

Kaesang Pangarep merupakan direktur utama yang juga pemilik saham mayoritas PT Persis Solo Saestu (PT PSS), perusahaan yang menaungi klub Liga 2 Indonesia Persis Solo. Inilah menjadi pengalaman perdana Kaesang mengelola perusahaan klub sepak bola Tanah Air.

Ia mengaku sudah mendapatkan dukungan dari sang ayah, Presiden Joko Widodo, untuk menjadi direktur utama PT Persis Solo Saestu, perusahaan yang menaungi klub Liga 2 Indonesia Persis Solo. "Bapak cuma bilang satu kata: 'lanjut'. Memang bapak tidak banyak ngomong karena sibuk," ujar Kaesang usai bertemu dengan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan di Kantor PSSI, Jakarta, April 2021 lalu.

YANG LAINNYA

Sejumlah pesohor lain sebenarnya sudah terlibat lebih dulu dalam manajemen klub sepak bola. Sebut saja mis-

alnya Anang Hermansyah, Andre Taulany, Baim Wong, bahkan perempuan pesohor Inul Daratista. Yang sekarang menjadi harapan, terjunnya para pesohor di liga sepakbola lokal Indonesia akan membuat prestasi cabang olahraga ini lebih menanjak lagi. Semoga demikian adanya. ●



menjadi Rans Cilegon FC pada Rabu 31 Maret 2021.

Raffi Ahmad sebagai CEO Rans Cilegon FC, mengaku proses akuisisi ini

Pangarep, yang aktif menjadi youtuber, kini





PEMBATALAN HAJI DAN PENGELOLAAN DANA TENTU BERBEDA

Jelas sudah, yang merintangi keberangkatan haji tahun ini, sama dengan tahun sebelumnya: Kondisi dan upaya menahan laju perluasan wabah Covid-19. Sedangkan pengelolaan dana haji soal lain, meskipun ada yang menyoal dan mengaitkannya dengan pembatalan haji tahun ini.

Akhirnya Arab Saudi membatasi jamaah yang boleh melaksanakan ibadah haji tahun ini untuk warga negaranya dan warga asing yang sudah bermukim di Kerajaan tuan rumah pengawal dua tempat suci umat Islam itu: Masjid Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Alasannya, sama seperti tahun sebelumnya,

mencegah perluasan pandemi virus corona, penyebab Covid-19 yang masih mengglobal.

Kementerian Kesehatan dan Haji Saudi mengumumkan pada Sabtu, 12 Juni 2021 bahwa total 60.000 jamaah akan mendapat izin pelaksanaan ibadah haji yang mulai berlangsung pada pertengahan Juli 2021. Pengumuman yang sama menyebutkan

para jamaah haji harus bebas dari penyakit kronis apa pun, dan berusia antara 18 hingga 65 tahun serta telah mendapat vaksinasi lengkap sesuai program vaksinasi di Kesultanan itu.

Keputusan itu "berdasarkan pada keinginan tetap Kesultanan untuk memungkinkan para tamu dan pengunjung di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk melakukan ritual

haji dan umrah," ungkap pernyataan Kementerian itu. "Kesultanan mengutamakan kesehatan dan keselamatan manusia."

Sedangkan wakil menteri haji mengatakan bahwa Arab Saudi juga mengakui adanya pemahaman besar dari negara-negara muslim atas keputusan untuk membatasi peserta haji tahun ini. Meskipun tak menyebut langsung Indonesia, toh negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar ini mengumumkan pembatalan haji sebelum pengumuman resmi dari Saudi keluar.

Indonesia mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini pada awal Juni 2021. Sedangkan Saudi baru mengumumkan pembatasan jamaah haji selang sembilan hari kemudian.

Sebenarnya Kerajaan Saudi sudah membuka lagi jalur penerbangan internasional pada Senin, 17 Mei 2021. Namun, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan maskapai penerbangan Saudi menyatakan tetap melanjutkan pengecualian penerbangan dari dan ke 20 negara, termasuk Indonesia, untuk mencegah laju penyebaran wabah penyakit virus corona (Covid-19).

Selain Indonesia, larangan penerbangan itu mencakup pula 19 negara lainnya: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Brasil, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Lebanon, Mesir, Pakistan, Portugal, Prancis, Swedia, Swiss, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Klarifikasi dari otoritas Kerajaan itu muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan warga tentang kelanjutan penangguhan perjalanan yang ditetapkan pada awal Februari 2021 lalu. Dalam paket kebijakan ini, larangan juga berlaku untuk penumpang yang tiba setelah melewati salah satu negara terlarang dalam 14 hari sebelum aplikasi perjalanan mereka ke Saudi.

Belakangan Saudi mencabut pembatasan perjalanan untuk 11 negara yang semula masuk daftar. Mulai Minggu, 30 Mei 2021 pukul 01:00, penumpang dari Uni Emirat Arab, Jerman, AS, Irlandia, Italia, Portugal,

Inggris, Swedia, Swiss, Prancis, dan Jepang dapat memasuki Kerajaan itu dengan penerapan karantina. Menurut Otoritas Kesehatan Masyarakat Saudi, negara-negara ini telah menunjukkan stabilitas dalam menahan laju penularan Covid-19. Jelas Indonesia bukan salah satu dari yang 11 itu.

Memang ada 13 negara tetap berada dalam "daftar merah" penerbangan yang dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri: Libya, Suriah, Lebanon, Yaman, Iran, Turki, Armenia, Somalia, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Venezuela, Belarusia, dan India. Warga Saudi yang ingin bepergian ke negara-negara ini memerlukan izin sebelumnya.



Sedangkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang dikutip Kantor Berita Saudi SPA pada Minggu, 30 Mei 2021, mengungkapkan, otoritas kesehatan kerajaan "terus menilai kondisi" dan akan mengambil semua tindakan perlindungan kesehatan manusia di tengah pandemi virus corona. Untuk itu, kementerian mengeluarkan sebuah pernyataan tentang niat kerajaan untuk menyelenggarakan haji tahun ini, 1442 H, "dengan cara yang menjamin menjaga kesehatan dan keselamatan peziarah."

Toh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas berketetapan untuk mengumumkan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. "Menetapkan pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H atau 2021 bagi warga negara

Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya," kata Menteri yang biasa disebut Gus Yaquut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.

Sejak pengumuman yang muncul lebih awal dari pernyataan pembatasan jamaah haji oleh Saudi ini muncul kemudian tanggapan positif maupun negatif. Toh dua organisasi massa Islam terbesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memaklumi pembatalan itu.

"Jika tidak memberangkatkan haji, pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,

Abdul Mu'ti, Kamis, 3 Juni 2021. Menurut dia, perjalanan haji secara syariat dapat dilakukan jika perjalanan dan pelaksanaan para jamaah haji dipastikan dalam kondisi aman. Hal itu juga dituangkan dalam UU Haji.

Sedangkan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Moqsih Ghazali menyatakan pembatalan haji tahun ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi penyebaran Covid-19. "Mudah-mudahan para calon jamaah haji Indonesia bisa menerima kenyataan ini karena ini baik buat para jamaah haji sendiri dan juga buat keluarga," katanya.

Namun polemik tak terhindarkan menyangkut nasib dana jamaah haji yang telah disetorkan di muka. Untuk soal ini memang lain lagi ceritanya. ●

MENYOAL PENGELOLAAN DANA HAJI

Usai pembatalan penyelenggaraan haji untuk jamaah Indonesia yang lebih awal dari pengumuman Arab Saudi membatasi haji domestik saja, wacana yang berkembang di dalam negeri adalah tata kelola dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) jadi sasaran. Bagaimana kondisi sebenarnya?

Maka, pada tahun kedua pandemi Covid-19 masih mendunia, pemerintah pun dua kali membatalkan keberangkatan jamaah haji secara berturut-turut. Pembatalan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. "Kami mempertimbangkan keselamatan haji dan melihat aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi," kata Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas

dalam konferensi pers virtual Kamis, 3 Juni 2021.

Lepas pengumuman pemerintah yang meniadakan penyelenggaraan haji 1442 hijriyah tahun ini, muncul polemik tentang pengelolaan dana haji. Rentang polemik mulai dari Indonesia memiliki utang atau belum melunasi biaya-biaya yang menjadi kewajiban jamaah selama menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah dan Madinah hingga berbagai salah kelola dana haji

yang telah disetorkan di muka oleh yang hendak melaksanakan ibadah itu.

Harap maklum, dana haji terakumulasi karena daya tampung penyelenggaraan haji di Saudi terbatas dan Indonesia biasanya mendapat kuota 10 persen penduduk muslim atau sekitar 200 ribuan jamaah yang dapat melaksanakan ibadah haji pada setiap musimnya, awal hingga pertengahan bulan zulhijah dalam kalender hijri atau



Jemaah Haji sedang berdoa.

lunar yang menjadi patokan penanggalan Islam. Itu pun pada saat normal, maksudnya ketika tak ada rintangan semacam pandemi Covid-19.

Dengan jatah sekitar 200 ribuan jamaah per tahun, sementara kemampuan dan minat beribadah haji jauh lebih besar dari itu, makin terjadilah antrean jamaah haji reguler kelolaan Kementerian Agama. Antren tersusun berdasarkan setoran awal para jamaah sebagai tanda daftar tunggu.

Nah, hingga kini antrean para jamaah haji sudah menumpuk hingga pendaftar hari ini baru akan berangkat pada 20-25 tahun ke depan.

Namun, pelunasan biaya haji dapat dicicil. Pada tahun keberangkatannya, para jamaah haji harus melunasi biaya haji secara keseluruhan.

Ketika, haji batal karena terhalang pandemi Covid-19, biaya pelunasan ini dapat ditarik kembali. Sedangkan biaya pendaftaran awal tetap berada dalam kelolaan BPKH untuk menjamin

bahwa jamaah tetap pada daftar tunggu atau nomor antrean sesuai dengan pendaftaran dan setoran awalnya.

Pada pembatalan haji akibat pandemi Covid-19 yang pertama kali pada 2020, ternyata mekanisme penarikan dana pelunasan ini berlangsung mulus hampir tanpa polemik. Catatan Kementerian Agama, pada 2020 atau musim haji 1441 hijriyah, sekitar dua ribuan jamaah yang menarik biaya pelunasannya.

"Untuk 2020, ada 1.688 jamaah reguler dan 438 khusus yang mengajukan pengembalian setoran lunas," ungkap Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Ramadhan Harisman, Jumat, 10 Juni 2021.

Bagaimana dengan tahun ini? "Sepakan pembatalan keberangkatan, ada 59 jamaah haji yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan," jawab Ramadhan.

Jumlah tersebut, sambungnya, terdiri atas 25 jamaah haji khusus dan 34

jamaah haji reguler. Jamaah yang telah mengajukan pengembalian pelunasan ini langsung diproses untuk diajukan ke BPKH agar bisa ditindaklanjuti sesuai alur yang sudah ditetapkan.

"Secara ketentuan, proses pengembalian ini berlangsung kurang lebih sembilan hari sampai dana jamaah ditransfer ke rekening masing-masing," ucapnya.

Ramadhan menambahkan, Sistem Informasi dan Komputer Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag mencatat bahwa ada 15.476 jamaah haji khusus dan 198.371 jamaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan.

Keputusan Menteri Agama No 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020M memberikan pilihan kepada jamaah untuk mengambil kembali setoran pelunasannya. Jamaah haji reguler dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran



Kepala BPKH Anggito Abimanyu.

pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota) tempat mereka mendaftar. Sementara untuk jamaah haji khusus dapat mengajukan permohonan pengembaliannya ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat mendaftar.

Toh melihat gelagat sejauh ini, polemik yang menyasar salah kelola dana haji oleh BPKH tak terlalu berpengaruh terhadap sikap jamaah terhadap biaya pelunasan haji tahun ini. Begitu pun,

Fiskal itu.

"Mohon dicek, apakah ada lokasi untuk infrastruktur? Ya, tidak ada," sambungnya.

Penjelasan lainnya menyangkut pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia yang batal tahun ini karena ada utang kepada pengelola haji di Arab Saudi. "Dan, apakah ada utang kita kepada pihak ketiga, termasuk Arab Saudi? Ya, tidak ada juga," katanya lagi.

Anggito menyarankan agar pihak-

Penjamin Simpanan (LPS). Jadi terlindungi dari gagal bayar. "Sekali lagi tidak ada kesulitan dan gagal investasi," tukasnya.

Toh soal dana haji masuk ke pembiayaan infrastruktur memang masuk akal. Isu dana haji masuk di proyek infrastruktur sebenarnya timbul-tenggelam sejak 2017.

Pemicunya, antara lain pernyataan Presiden Jokowi usai melantik pimpinan BPKH pada 26 Juli 2017. Jokowi saat itu mengemukakan, daripada mengendap, dana haji semestinya diinvestasikan ke hal-hal yang tak berisiko tinggi tapi memberi keuntungan besar. Proyek infrastruktur, menurut Jokowi, masuk dalam kriteria tersebut.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Daerah Tamsil Linrung, misalnya, meyakini pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Alasannya, ia tidak melihat adanya garansi dana haji yang disimpan dalam bentuk Sukuk atau obligasi syariah.

Tamsil mengemukakannya dalam perbincangan di Kanal YouTube Her-subeno Arief. "Siapa yang menjamin proyek infrastruktur tidak pakai dana haji?" ujarnya.

Kendati pemerintah sudah membantah tuduhan tersebut melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Tamsil Linrung tetap mempertanyakan penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Senator dari Sulawesi Selatan itu mengatakan kalau sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka tidak ada garansi dana itu tidak boleh dipakai di sana atau infrastruktur.

Tamsil mengutip keterangan BPKH bahwa dana haji selama ini diinvestasikan dalam bentuk Sukuk dan instrumen keuangan syariah. Di institusi itu, dana haji juga diinvestasikan dalam bentuk Sukuk demi keamanan.

Artinya, lanjut Tamsil, keduanya masuk dalam APBN dan dicatat sebagai penerimaan negara lainnya. "Kalau sudah masuk di keranjang APBN siapa yang bisa membatasi? Artinya, setiap proyek yang dibiayai APBN kemungkinan di situ juga ada dana haji," ujar mantan Wakil Ketua Badan Anggaran



Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Ramadhan Harisman.

persoalan dana kelolaan BPKH itu telanjur sudah menyebar dari mulut ke mulut maupun viral di media sosial.

Menanggapi polemik itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, ini adalah kesempatan baik untuk mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk penggunaan tabungan haji juga digunakan pemerintah untuk memuluskan berbagai proyek infrastruktur.

"Dana hajinya aman. Alhamdulillah, kami mengelolanya dengan prudent dan profesional. Bisa dilihat di laporan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang juga ada di website kami," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan

pihak yang tertarik mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana atau tabungan haji dapat merujuk pada sumber informasi yang dapat dipercaya. Antara lain website resmi juga akun-akun media sosial kelolaan BPKH sendiri.

Dari berbagai publikasi resmi, BPKH membukukan surplus lebih dari Rp5 triliun pada 2020 dengan dana kelolaan yang mencapai sekitar Rp135 triliun. Pada periode yang sama, dana kelolaan BPKH tumbuh lebih dari 15 persen.

Lagi pula, kata Anggito, dana haji milik jamaah dijamin oleh Lembaga

(Banggar) DPR itu.

Oleh sebab itu, ia mengaku heran mengapa narasinya seragam, pemerintah dan DPR ramai-ramai membantah dana haji terpakai untuk infrastruktur. "Seolah-olah itu hal yang terlarang atau mungkin karena sudah melihat proyek infrastruktur gagal sehingga khawatir dana haji yang terpakai susah dcairkan?" ujar Tamsil.

Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mengimbau BPKH agar

lain menyatakan 90 persen investasi dalam bentuk surat berharga syariah negara (SBSN) dan Sukuk Korporasi," ungkapnya Minggu, 13 Juni 2021.

Alasannya, kata Rahmat, SBSN merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN yang kemudian diwujudkan dalam bentuk belanja negara. Adapun anggaran infrastruktur dalam APBN 2021 mencapai Rp 414 triliun, sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp 281 triliun. "Dengan masuknya dana

but dapat dilihat pada laporan 2020 dimana ada 3 keputusan penting, yakni: Pertama, menurunnya alokasi penempatan pada bank sebesar Rp9,0 triliun, dari Rp 54,2 triliun pada 2019 turun menjadi Rp 45,2 triliun pada 2020.

Kedua, menurunnya investasi jangka pendek sebesar Rp 1,1 triliun, dari Rp 9,9 triliun pada 2019 turun menjadi Rp 8,8 triliun pada 2020. Ketiga, meningkatnya investasi jangka panjang sebesar Rp 30,7 triliun, dari Rp 60,0



Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Daerah Tamsil Linrung.

tidak ikut-ikutan menjadi corong pemerintah seolah-olah memberikan jaminan tentang dana haji. "BPKH tidak bisa menjamin itu," tegasnya.

Senada dengan Tamsil, Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Muhammad Rahmat mempertanyakan penjelasan Anggito bahwa alokasi investasi ditujukan kepada bidang dengan profil risiko low to moderate. Sehingga 90 persen adalah dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

"Dari jawaban tersebut, BPKH perlu menjelaskan lebih rinci lagi perihal di satu sisi menyatakan tidak ada pembiayaan infrastruktur. Namun, di sisi

haji ke dalam APBN, apakah ada jaminan tidak ada yang dialokasikan untuk belanja infrastruktur?" ungkap Rahmat

Selain SBSN, sambungnya, alokasi investasi lainnya adalah sukuk korporasi. Meskipun investasinya dengan profil risiko low to moderate, namun tidak ada jaminan keamanan investasi 100 persen. BPKH juga perlu membeberkan korporasi-korporasi yang menjadi tujuan investasi Sukuk sehingga publik bisa menilai tingkat keamanan investasi di korporasi tersebut.

Selanjutnya, masih kata Rahmat, BPKH juga perlu menjelaskan alasan lebih memilih investasi jangka panjang dibanding jangka pendek. Hal terse-

but dapat dilihat pada laporan 2020 dimana ada 3 keputusan penting, yakni: Pertama, menurunnya alokasi penempatan pada bank sebesar Rp9,0 triliun, dari Rp 54,2 triliun pada 2019 turun menjadi Rp 45,2 triliun pada 2020.

Kedua, menurunnya investasi jangka pendek sebesar Rp 1,1 triliun, dari Rp 9,9 triliun pada 2019 turun menjadi Rp 8,8 triliun pada 2020. Ketiga, meningkatnya investasi jangka panjang sebesar Rp 30,7 triliun, dari Rp 60,0

Jadi, lanjutnya, di samping persoalan tiadanya keberangkatan jamaah haji Indonesia pada musim haji 2021 sudah terjawab dengan jelas sebagaimana penjelasan resmi Saudi. "Nah, persoalan kedua perihal pengelolaan dana haji perlu juga diperjelas agar umat mendapat jawaban yang tepat dan bertanggung jawab," tandasnya. ●



MENCARI YANG MASIH TERSEMBUNYI

Penjelasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang dana kelolaannya sudah menyebar melalui berbagai media. Namun, mungkin masih ada yang ingin melihat yang tersembunyi. Ekonom Rizal Ramli menawarkan, jika bukan menantang, audit investigasi terhadap pengelolaan dana haji.

Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menegaskan berulang kali bahwa dana haji milik calon jamaah haji saat ini aman dan tidak ada kerugian atas investasi yang dilakukan oleh BPKH. Menurut dia, hingga Mei 2021 lalu dana yang dikelola BPKH mencapai Rp 150 triliun.

Selain itu, Anggito juga menepis soal anggapan adanya kerugian atas investasi yang dikeluarkan BPKH. Berdasarkan Laporan Keuangan BPKH tahun 2020 lalu, tepatnya di Laporan

Arus Kas dalam laporan keuangan tersebut terlihat bahwa arus kas dari aktivitas investasi negatif, tepatnya minus Rp 20,48 triliun, sehingga muncul anggapan bila investasi yang dikelola BPKH tahun lalu mengalami kerugian dengan jumlah tersebut.

Tak ingin banyak orang salah paham atas laporan keuangan tersebut, Anggito menjelaskan bahwa itu bukan laporan rugi laba melainkan laporan arus kas. "Ini adalah mutasi dari kas ke pengeluaran investasi," ujarnya, Rabu, 9 Juni 2021.

Anggito bilang sepanjang tahun 2020 lalu, BPKH menggelontorkan dana hingga Rp 20 triliun untuk investasi. Sedangkan instrumen investasi yang dipilih adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk, Reksadana Syariah Terproteksi, dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) Syariah. Ini sekaligus penegasan Anggito bahwa BPKH mengutamakan investasi yang berisiko rendah.

Secara normatif atau aturan yang berlaku, ada lima kriteria yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dana haji

berdasarkan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pertama, kata Anggito, BPKH hanya diizinkan bertransaksi dengan lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, pengelolaannya harus optimal agar cukup untuk membiayai pelaksanaan haji. Ketiga, transaksi dengan keuangan syariah yang memiliki peringkat A. Keempat, dana haji dikelola dengan hanya bertransaksi dengan keuangan syariah yang berisiko rendah. Kelima, dana haji likuid untuk, minimal pelaksanaan untuk dua kali musim haji. "Dengan mengacu pada lima kriteria tersebut, Insyaa Al-

bahwa investasi dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Dia menyebutkan alokasi investasi selama ini diarahkan pada investasi yang memiliki profil risiko low to moderate, dengan sekitar 90 persen pada surat berharga syariah negara (SBSN) dan sukuk korporasi.

Anggito mengatakan besaran

Jumlah nilai manfaat tersebut merujuk pada dana setiap calon jamaah haji. Pada 2020, dana yang ditempatkan di instrumen investasi syariah seperti di SBSN, sukuk korporasi, dan reksa dana pasar uang syariah naik menjadi Rp99,53 triliun atau 69,6 persen. Sedangkan, penempatan di bank syariah sebesar Rp43,53 triliun atau 30,4

“

Ke mana investasinya, kami putuskan yang pertama ke investasi langsung, lainnya, dan juga ke emas. Kalau itu tidak tercapai, kami ada di surat berharga yang merupakan komponen di mana kita bisa menetapkan dana tersebut.

lah pengelolaan dana haji aman," kata Anggito, Rabu, 9 Juni 2021.

Mantan Direktur Jenderal Haji dan Umrah, Kementerian Agama ini mengatakan bahwa dalam laporan keuangan 2020, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen. "Ini tertuang dalam Laporan Keuangan 2020 (unaudited)," kata dia.

Lebih dari itu itu, Anggito juga menepis kabar yang muncul berkali-kali



Pengamat ekonomi syariah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syaqui.



dana haji yang dikelola hingga akhir 2020 sebesar Rp143,1 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan dengan posisi akhir 2019 yang sebesar Rp124,32 triliun. "Tahun lalu kami memberikan nilai manfaat Rp1,7 juta rupiah. Nilai manfaatnya setara dengan deposito di bank syariah," kata Anggito.



persen.

Dalam laporan Keuangan BPKH 2019 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), alokasi penempatan dana haji untuk instrumen investasi syariah sebesar Rp70,02 triliun atau 56,32 persen. Sedangkan, penempatan dana haji di bank syariah mencapai Rp54,30 triliun atau 43,68

persen.

Pada laporan 2018, penempatan dana haji untuk instrumen investasi syariah mencapai Rp46,92 triliun atau 41,76 persen. Sedangkan penempatan dana di bank syariah mencapai Rp65,43 triliun atau 58,24 persen. Saat ini, penempatan di instrumen investasi lebih besar dibandingkan di perbankan syariah.

Anggito mengatakan BPKH berusaha mengoptimalkan investasi pada instrumen yang memberikan imbal hasil yang lebih baik berdasarkan prinsip syariah. Pengalihan alokasi dari perbankan syariah ke instrumen investasi merupakan bagian dari upaya optimalisasi tersebut.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono menjelaskan dana haji diinvestasikan ke instrumen yang memiliki risiko rendah hingga moderat sesuai arahan peraturan pemerintah (PP). Adapun persentasenya yaitu, dana yang disimpan di bank syariah 30 persen dan sisanya untuk investasi sebesar 70 persen.

"Ke mana investasinya, kami putuskan yang pertama ke investasi langsung, lainnya, dan juga ke emas. Kalau itu tidak tercapai, kami ada di surat berharga yang merupakan komponen di mana kita bisa menetapkan dana tersebut," ujar Beny, Kamis, 10 Juni 2021.

"Kita tahu dalam perjalanan risk dan return tadi, surat berharga adalah paling kita bisa lakukan karena bisa diterima dalam jumlah besar, dalam waktu yang pendek. Dan juga kemudian effort kita bisa maksimal dengan sumber daya dan sarana dan prasarana yang dimiliki baru berdiri sejak 2017 kami langsung harus mengelola dana sebesar Rp 90 triliun, ketika itu surat berharga menjadi pilihan terbaik," jelasnya.

Beny juga menjelaskan surat berharga yang dipilih ialah surat berharga syariah nasional (SBSN) yang memiliki porsi terbesar maupun korporasi. Lalu untuk imbal hasil dari investasi tersebut, baik dari penyimpanan dan investasi langsung, mencapai hampir enam persen.

"Kami memiliki instrumen dua

tadi, penempatan 30 persen memiliki proyeksi imbal hasil mengikuti rate 3,4 persen-an ketika kami masih belum terkecualikan pajak. Nah untuk surat berharga proyeksi sekitar 7,5-8 persen, karena masih dipotong pajak, ini belum tercapai. Nah kami paham dalam perjalanan rate imbal hasil cenderung menurun, tahun ini kami belum bisa mengejar ke angka itu. Kalau di-blending (dua instrumen tadi baru mencapai) hampir enam persen-an," ungkap Beny.

Ia menjelaskan bahwa imbal hasil investasi dana haji tersebut sejatinya diamanatkan digunakan untuk menutup subsidi penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 7-8 triliun setiap tahun. Makanya kalau imbal hasil dalam setahun itu mencapai sekitar Rp 8 triliun, 90 persen lebihnya digunakan untuk menutup subsidi tersebut.

"Yang kedua kami juga pakai untuk virtual account atau rekening haji jamaah yang belum berangkat, masa tunggu, itu kami sediakan. Per ta-

hun lalu kami anggarkan Rp 2 triliun, sekitar Rp 1,7 jutaan per jamaah yang menjelang berangkat. Yang keempat untuk operasional kami sekitar 5 persen, kami sejak menjalankan tugas 2017 belum pernah di atas 5 persen dan kami kembalikan," ujarnya.

Beny pun menegaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa dana haji tidak ada yang digunakan langsung ke infrastruktur. Ia mengungkapkan bahwa posisi BPKH di sini sebagai investor.

"Bisa kita yakinkan ke masyarakat, tidak ada satupun yang kita salurkan ke infrastruktur. Pertanyaan memang berkembang SBSN apakah tidak (digunakan) langsung ke infrastruktur. Kami posisinya investor, investor itu ikut lelang-lelang Kemenkeu, kami sudah mengusulkan dana haji dioptimalkan untuk sarana ibadah haji, untuk kemaslahatan dana haji. Yang kita pahami yang SBSN itu yang menjalankan pemerintah. Kami mendapat penjelasan bahwa itu dioptimalkan bersama pelaksanaannya itu," tandasnya.

Sedangkan pengamat ekonomi syariah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik berpendapat BPKH sudah sangat berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana haji yang disetorkan masyarakat. "Saya kira sudah melalui proses skrining dan analisis yang baik sehingga dananya aman dan memberikan return," ungkapnya.

Menurut dia BPKH sudah pasti berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji ini dengan memilih instrumen yang memiliki profil risiko rendah sesuai ketentuan dan undang-undang. Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini, investasi di sukuk negara merupakan investasi yang aman karena mendapat jaminan dari negara. "Sukuk negara ini juga memberikan imbal hasil yang menjadi nilai manfaat yang ditujukan untuk membantu mensubsidi biaya

**Anggota Badan Pelaksana
BPKH Beny Witjaksono**

penyelenggaraan haji," kata dia.

Irfan mengatakan, biaya riil pemberangkatan haji saat ini sekitar Rp70 juta per orang, tapi calon jamaah haji hanya membayar Rp35 juta per orang. "Pada 2019 misalnya, BPKH mencatatkan nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp7,3 triliun," kata Irfan.

Sebagian dari nilai manfaat itu, kata Irfan, yang digunakan untuk mensubsidi setiap jamaah dengan besaran hampir 50 persen. "Kalau investasi di sukuk negara, BPKH bisa langsung

tidak dikelola dengan benar," ungkapnya.

Mengenai soal ketidakpercayaan yang merupakan sisi nonteknis, ekonom Rizal Ramli menyarankan audit investigasi pengelolaan dana haji. "DPR juga dapat membuat panitia khusus," ungkapnya dalam acara Karni Ilyas Club yang mulai tayang di media sosial Youtube pada 12 Juni 2021.

Juga soal keamanan investasinya. Rizal Ramli membedakan keamanan normatif dan keamanan dana secara

aman dan tidak aman itu kita buat audit investigasi dan Pansus. "Baru setelah itu kita nilai," ungkapnya.

Malah Rizal berani menyatakan bahwa dana haji yang berupa tunai hanya Rp18 miliar. "Yang lain-lain itu dalam bentuk deposito. Ketahuan enam bulan atau satu tahun (jatuh tempo)," sambungnya.

Lebih jauh Ramli menjelaskan, dana haji itu diinvestasikan secara syariah melalui sukuk dan masuk ke Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara



Rizal Ramli bersama dengan Karni Ilyas.

menjualnya di secondary market ketika mereka membutuhkan uang, kapan pun," ujarnya

Hal inilah, Irfan menambahkan, yang membedakannya dengan investasi langsung di proyek-proyek infrastruktur. "Kalau investasi langsung di infrastruktur, uangnya berubah menjadi fixed asset di mana return merupakan hasil pengelolaan asetnya dan investasi ini memiliki risiko yang lebih harus diperhatikan," kata dia.

Menurut Irfan, isu pengelolaan dana haji ini bukan pada persoalan ketersediaan dana jika nanti dibutuhkan, tetapi ada faktor di luar itu. "Yakni adanya ketidakpercayaan pada pemerintah sehingga seolah-olah dana tersebut

teknis atau riil. Rizal membandingkannya dengan skandal asuransi semisal Asabri dan Jiwasraya. "Pengusaha pinjam ke bank bunganya belasan persen (per tahun). Sedangkan pinjam ke asuransi bunganya bisa hanya tiga persen dengan menyogok direksinya," kata dia mencontohkan.

Nah, lanjut Rizal, untuk dana haji, memang secara normatif harus mengikuti investasi syariah. "Tapi berapa bunga bank syariah? Rata-rata tujuh persen. Sedangkan bunga bank konvensional bisa 14-15 persen. Semangat nggak mencari dana haji? Ya semangat dong," tandas mantan Menko Maritim itu.

Maka, kata Rizal, untuk menilai

(APBN). Juga lewat produk syariah juga investasi masuk ke Badan Usaha Milik Negara yang kebanyakan di bidang infrastruktur. Kemudian investasi juga ke lembaga keuangan syariah.

"Ketiga jenis investasi ini rata-rata nggak aman," tukas Rizal Ramli. Karena apa? Rizal menjawab, karena planning proyek infrastruktur itu banyak yang ngasal. Selain itu, lanjutnya, keamanan investasi di Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar pun tidak lebih baik dari negara lain seperti Malaysia.

Mungkin masih ada, sengaja atau tidak, yang masih tersembunyi. Jawabannya adalah akuntabilitas dan transparansi. ●

CONTOH

Gunawan Effendi

Mungkin sudah banyak yang lupa Indonesia pernah memiliki program TV umum. Warga dapat menonton TV itu di tempat terbuka. Entah balai desa, pos ronda, atau tempat umum lain yang menyediakannya. Di Abad XX tentu saja. Pada pertengahan dasawarsa 1970-1980-an.

Dengan TV umum itu warga desa, antara lain, mengenal nama-nama bintang sepakbola dunia. Terutama dari Eropa dan Amerika Latin yang menjadi kawasan terkemuka cabang olahraga paling populer di Indonesia ini. Mungkin juga TV umum kala itu dapat menjelaskan pemberian nama anak Indonesia mirip seperti bintang sepak bola pada masanya: Maldini, Maradona, Zico, dan Zola, misalnya.

Kini Indonesia tak perlu TV umum lagi. Revolusi Industri IV berbasis teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kita menonton kepaiwaan bintang sepak bola dunia dari saluran media sosial youtube, selain televisi yang teknologinya juga semakin rumit. Dengan layar datar dan lebih lebar.

Ingin layar lebih lebar lagi untuk nobar (nonton bareng)? Sila manfaatkan teknologi proyektor in focus yang juga tergolong baru. Namun harap tetap menerapkan protokol 5M untuk menekan laju penularan pandemi Covid-19.

Terlebih lagi, pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021 berlangsung UEFA Euro 2020 di 11 kota Eropa. Turnamen empat tahunan yang menjadi puncak kompetisi sepakbola negara-negara Eropa itu pada tahun ini tetap menggunakan angka 2020, pengingat rintangan pandemi Covid-19 yang mengganggu jadwalnya.

Penyelenggaraan Euro 2020 jelas terkait dengan upaya pemulihan roda perekonomian. Sepakbola di Eropa adalah industri dengan rentetan dampak ekonomi: selain industri olahraga, juga wisata, kuliner, transportasi, make up, fashion, banyak lagi. Jangan lupa pula industri media dengan kontrak tayang dan iklannya.

Di Indonesia, kita akan menyelenggarakan PON XX 2020 di Papua yang tertunda pula oleh Covid-19. Kita pun meli-

hat jumlah pesohor yang memasuki industri sepakbola bertambah dengan nama-nama baru. Sementara ini kita masih harus menunggu perkembangan selanjutnya sambil menonton Euro 2020 di 11 kota Eropa.

Namun, layak pula menyimak bahwa Euro 2020 terselenggara melalui persiapan sangat rinci dan terencana dengan baik. Termasuk tata laksana penyesuaian menghadapi pandemi Covid-19 yang masih merajalela. Masing-masing kota tuan rumah --Amsterdam, Baku, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, London, Munich, Roma, Sevilla, dan Saint Petersburg-- menerapkan protokol kesehatan berbeda sesuai dengan kondisi lokal.



Ada yang mengharuskan wajib masker bagi penonton dan jarak antarpemonton hingga 1,5 meter, namun ada pula yang membebaskannya. Toh, tetap ada yang mewajibkan penonton tes usap lebih dulu sebelum hadir di stadion. Tergantung kondisi setempat.

Jelas pula bahwa penyelenggaraan Euro 2020 adalah upaya menggerakkan ekonomi lokal lebih

dulu dengan melibatkan sumber daya regional. Upaya mengatasi Covid-19 dan dampaknya seiring serta sejalan. Skala ekonominya diperhitungkan benar, dengan basis kapasitas tampung stadion dan juga cakupan media.

Tata laksana atau manajemen Euro 2020 memang layak menjadi contoh. Selain persiapan matang juga rinci, sosialisasinya seluas mungkin pula. Itu sebabnya kita masih perlu melihat bagaimana perkembangan liga sepak bola Indonesia yang mulai menjadi mainan para pesohor, serta penyelenggaraan PON XX di Papua.

Yang tampak lebih siap menyelenggarakan tata laksana perhelatan besar agaknya industri pariwisata. Itu pun baru sebatas etalase pariwisata kita: Bali. Antara 12 Juni hingga 11 Juli 2021, berlangsung Pesta Kesenian Bali ke-43, setelah tertunda dari jadwal pada 2020 oleh Covid-19.

O ya, untuk menonton Pesta Kesenian Bali, pun tak perlu TV umum. Cukup memanfaatkan saluran media sosial youtube. Sambil berharap dan megupayakan pariwisata daerah lain bangkit juga. ●



www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

Network

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
iNFO
kepada
masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397



INOVASI UNTUK NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #09 JUNI 2021

**YANG KAYA
DAPAT PPnbbM 0%
YANG MISKIN BELI
SEMBAKO
KENA
PPN 12%**

